pendapatan, serta meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu perlu difokuskan pada transformasi struktur ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, peningkatan investasi, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi kreatif, serta optimalisasi potensi sektor kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026**, pertumbuhan ekonomi memiliki peran sentral sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperluas kesempatan berusaha, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Berdasarkan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Tahun 2010 menurut lapangan usaha selama periode **2021–2025**, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan kecenderungan mengalami penguatan pada tahun 2025. Laju pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar **12,74% pada tahun 2021**, kemudian melambat menjadi **3,46% pada tahun 2022** dan **2,60% pada tahun 2023**, sebelum kembali meningkat menjadi **4,51% pada tahun 2024** dan **5,63% pada tahun 2025**. Pola tersebut mencerminkan proses normalisasi ekonomi setelah pemulihan pascapandemi COVID-19 yang diikuti oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada berbagai sektor usaha.

Sektor **pertanian, kehutanan, dan perikanan** sebagai sektor utama perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan pertumbuhan yang stabil, yaitu berkisar antara **1,82% hingga 3,42%**, dan mencapai **2,41% pada tahun 2025**. Stabilitas pertumbuhan sektor ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya alam tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah sekaligus berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan penyerapan tenaga kerja.

Sektor **pertambangan dan penggalian** mencatat pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2021 sebesar **107,31%**, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi atau investasi yang signifikan pada sektor tersebut. Setelah mengalami normalisasi pada tahun-tahun berikutnya, sektor ini kembali menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2025 sebesar **13,62%**, sehingga tetap menjadi salah satu sektor potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa sektor jasa juga memperlihatkan perkembangan yang positif, antara lain **perdagangan besar dan eceran**, **transportasi dan pergudangan**, **jasa keuangan dan asuransi**, **administrasi pemerintahan**, serta **real estat**. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin berkembangnya aktivitas perdagangan, meningkatnya mobilitas masyarakat, bertambahnya pelayanan publik, serta meningkatnya aktivitas investasi dan jasa pendukung ekonomi daerah.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor yang mengalami perlambatan bahkan pertumbuhan negatif pada periode tertentu. Sektor **konstruksi** mengalami kontraksi sebesar **-3,48% pada tahun 2025**, sedangkan sektor **penyediaan akomodasi dan makan minum** mengalami pertumbuhan negatif sebesar **-2,26% pada tahun 2024**. Selain itu, sektor **jasa kesehatan dan kegiatan sosial** juga mengalami sedikit kontraksi sebesar **-0,44% pada tahun 2024**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

beberapa sektor masih dipengaruhi oleh dinamika investasi, perubahan permintaan masyarakat, maupun kebijakan pembangunan yang bersifat temporer.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu selama beberapa tahun terakhir, berikut disajikan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu menurut lapangan usaha dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Analisis terhadap indikator tersebut memberikan informasi mengenai sektor-sektor yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN PULAU TALIABU (PERSEN), 2021–2025

Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Pulau Taliabu Regency (percent), 2021–2025

	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	1,82	3,42	2,46	1,87	2,41
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	107,31	4,78	3,14	1,80	13,62
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	-15,40	1,76	3,30	3,52	5,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	3,04	9,55	10,84	7,13	7,66
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	24,83	1,43	10,15	4,31	4,98
F	Konstruksi/*Construction*	10,00	1,95	1,42	6,68	-3,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	3,61	3,80	3,43	11,88	8,22
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	1,37	11,14	1,38	-9,10	2,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	4,26	0,63	0,56	-2,26	3,72
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	8,65	5,43	0,91	4,59	2,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	9,74	0,72	1,84	11,73	9,46
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,51	0,43	2,22	12,58	5,37

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	5,71	1,80	0,03	6,18	4,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	0,18	0,17	1,34	13,64	6,77
P	Jasa Pendidikan/Education	2,00	1,83	1,71	3,80	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	3,84	1,98	3,76	-0,44	4,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,82	1,84	1,28	4,77	5,38
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	**12,74**	**3,46**	**2,60**	**4,51**	**5,63**

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

2.4 DAYA SAING SDM

2.4.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu dimensi fundamental dalam pembangunan manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*). Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih luas, tingkat pendapatan yang lebih baik, serta kemampuan yang lebih tinggi dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk kesehatan, informasi, teknologi, dan peluang ekonomi.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang pendidikan adalah **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Harapan Lama Sekolah (HLS)**. Kedua indikator tersebut merupakan komponen utama dalam penyusunan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu daerah.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan aktual yang berhasil dicapai oleh masyarakat sebagai hasil akumulasi pembangunan pendidikan selama bertahun-tahun. Semakin tinggi nilai RLS, semakin baik kualitas modal manusia yang dimiliki suatu daerah karena menunjukkan semakin banyak penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sementara itu, **Harapan Lama Sekolah (HLS)** menggambarkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia tujuh tahun apabila pola partisipasi sekolah yang berlaku saat ini tetap berlangsung. Indikator ini mencerminkan peluang generasi muda dalam memperoleh pendidikan pada masa yang akan datang sekaligus menjadi ukuran terhadap akses dan keberlanjutan sistem pendidikan di suatu daerah.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, peningkatan nilai RLS dan HLS menjadi tantangan sekaligus peluang pembangunan mengingat karakteristik wilayah yang berupa daerah kepulauan dengan persebaran penduduk yang relatif terpencar. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap pemerataan akses pendidikan, terutama pada wilayah-wilayah terpencil yang masih menghadapi

keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, akses transportasi, serta fasilitas penunjang pembelajaran. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi sekolah, angka putus sekolah, maupun keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan lama sekolah akan meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja, produktivitas ekonomi, serta peluang memperoleh pekerjaan formal dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas masyarakat, terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, serta tingginya risiko kemiskinan struktural.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, indikator RLS dan HLS menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan, kompetensi kerja, dan daya saing tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan pendidikan melalui perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan pendidikan kesetaraan, serta penyediaan sarana pendidikan yang merata hingga ke wilayah terpencil.

Selain itu, pembangunan pendidikan perlu didukung melalui sinergi lintas sektor, antara lain peningkatan infrastruktur jalan menuju satuan pendidikan, penyediaan transportasi sekolah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, menekan angka putus sekolah, memperpanjang rata-rata lama sekolah, serta meningkatkan harapan lama sekolah generasi muda Kabupaten Pulau Taliabu.

Dengan demikian, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan pendidikan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Untuk memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, berikut disajikan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) beserta perkembangan indikator tersebut selama beberapa tahun terakhir sebagai salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dasar dalam penyusunan strategi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu. *Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) – Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)*. https://taliabukab.bps.go.id

Berdasarkan perkembangan **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Harapan Lama Sekolah (HLS)** Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2020–2025**, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembangunan sektor pendidikan menunjukkan tren yang semakin baik. Nilai **Rata-Rata Lama Sekolah** meningkat secara konsisten dari **7,45 tahun pada tahun 2020** menjadi **8,15 tahun pada tahun 2025**, atau mengalami peningkatan sebesar **0,70 tahun**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pulau Taliabu yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal rata-rata hingga jenjang **kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP)**. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menyelesaikan pendidikan menengah atas sehingga peningkatan akses pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.

Di sisi lain, **Harapan Lama Sekolah** juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dari **12,59 tahun pada tahun 2020** menjadi **12,89 tahun pada tahun 2025**. Kondisi ini menggambarkan bahwa anak-anak usia sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga mendekati jenjang **Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat** apabila pola partisipasi sekolah saat ini dapat dipertahankan. Peningkatan HLS mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, meskipun laju peningkatannya relatif melambat pada dua tahun terakhir.

Perbandingan antara nilai **Harapan Lama Sekolah** dan **Rata-Rata Lama Sekolah** menunjukkan masih terdapat kesenjangan sekitar **4,74 tahun** pada tahun 2025. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi telah tersedia, namun belum seluruh penduduk mampu menyelesaikan pendidikan sesuai dengan harapan tersebut. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, angka putus sekolah, kondisi geografis wilayah kepulauan, aksesibilitas menuju satuan pendidikan, serta terbatasnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu strategi fundamental untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*). Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan RLS dan HLS perlu didukung melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, penyediaan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

2.4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator utama dalam analisis ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai penduduk yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perekonomian suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia sebagai faktor produksi. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga menunjukkan tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif lebih baik.

Dalam konteks pembangunan daerah, TPAK memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki motivasi dan kesempatan yang lebih besar untuk memasuki pasar kerja. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mengindikasikan masih adanya hambatan dalam memperoleh pekerjaan, keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, maupun faktor sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi.

Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, serta jasa pemerintahan memiliki karakteristik pasar tenaga kerja yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Sebagian besar angkatan kerja bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Selain itu, kondisi geografis yang terdiri atas wilayah kepulauan dan persebaran permukiman yang berjauhan turut memengaruhi akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan vokasi, serta pelatihan keterampilan kerja.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pulau Taliabu mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan TPAK umumnya menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki pasar kerja sebagai dampak meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, maupun berkembangnya sektor-sektor produktif. Sebaliknya, penurunan TPAK dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti menurunnya kesempatan kerja, meningkatnya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan, perubahan struktur umur penduduk, maupun kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, peningkatan TPAK harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kesempatan kerja (*decent work*) sebagaimana tercantum dalam **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tujuan 8**, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi angkatan kerja, tetapi juga dari kemampuan pasar kerja dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang produktif, aman, dan memberikan pendapatan yang layak.

Dalam kaitannya dengan **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan salah satu indikator strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan. Meningkatnya partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi akan memperluas kesempatan memperoleh pendapatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun demikian, peningkatan TPAK perlu didukung oleh tersedianya lapangan pekerjaan yang berkualitas agar mampu mengurangi pengangguran, setengah pengangguran, serta pekerja rentan yang masih mendominasi sektor informal.

Oleh karena itu, strategi peningkatan TPAK di Kabupaten Pulau Taliabu perlu diarahkan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti pertanian modern, perikanan, perkebunan, industri pengolahan berbasis komoditas lokal, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, serta jasa. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, penguatan kewirausahaan, serta kemitraan dengan dunia usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu, pada bagian berikut disajikan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) beserta indikator ketenagakerjaan lainnya. Analisis terhadap indikator tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara. *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka* (edisi 2021–2025) dan *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara*. Data diolah dari **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari dan Agustus**

Berdasarkan perkembangan **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** selama periode **2020–2025**, dapat disimpulkan bahwa partisipasi penduduk usia kerja di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Nilai TPAK mengalami penurunan dari **72,65% pada tahun 2020**

menjadi **61,56% pada tahun 2022**, kemudian meningkat secara bertahap menjadi **66,00% pada tahun 2025**. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa setelah mengalami perlambatan aktivitas ekonomi pada periode sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam pasar kerja mulai mengalami pemulihan, meskipun belum kembali mencapai tingkat partisipasi sebagaimana pada tahun 2020.

Apabila dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, TPAK Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2025 masih berada di bawah **Provinsi Maluku Utara** yang mencapai **69,57%** dan **Indonesia** sebesar **70,95%**. Selisih tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya potensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya terserap ke dalam pasar kerja, baik karena keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya keterampilan, maupun karakteristik geografis wilayah kepulauan yang memengaruhi akses terhadap aktivitas ekonomi.

Tren peningkatan TPAK sejak tahun 2023 hingga 2025 merupakan sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi daerah mulai membaik seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, aktivitas perdagangan, sektor pertanian, perikanan, serta jasa pemerintahan. Namun demikian, peningkatan tersebut masih perlu dioptimalkan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan produktif agar mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan (*decent employment*). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti pertanian modern, perikanan, perkebunan, industri pengolahan berbasis komoditas lokal, UMKM, ekonomi kreatif, serta pariwisata berbasis potensi daerah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kewirausahaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

2.5 ASPEK KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia yang berperan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kondisi bebas dari penyakit, tetapi juga sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap individu menjalankan kehidupan secara produktif. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor kesehatan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, khususnya Tujuan 3 yaitu *Good Health and Well-being*, yang menekankan pentingnya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di semua kelompok umur. Di tingkat daerah, pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu indikator utama dalam pembentukan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** melalui komponen umur harapan hidup, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pembangunan daerah.

Kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai determinan yang saling berkaitan, antara lain status gizi, lingkungan hidup, perilaku hidup bersih dan sehat, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektor.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Pulau Taliabu menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Persebaran penduduk yang tidak merata, kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau, keterbatasan infrastruktur transportasi, serta jarak antarwilayah menjadi faktor yang memengaruhi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem rujukan masih memerlukan penguatan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

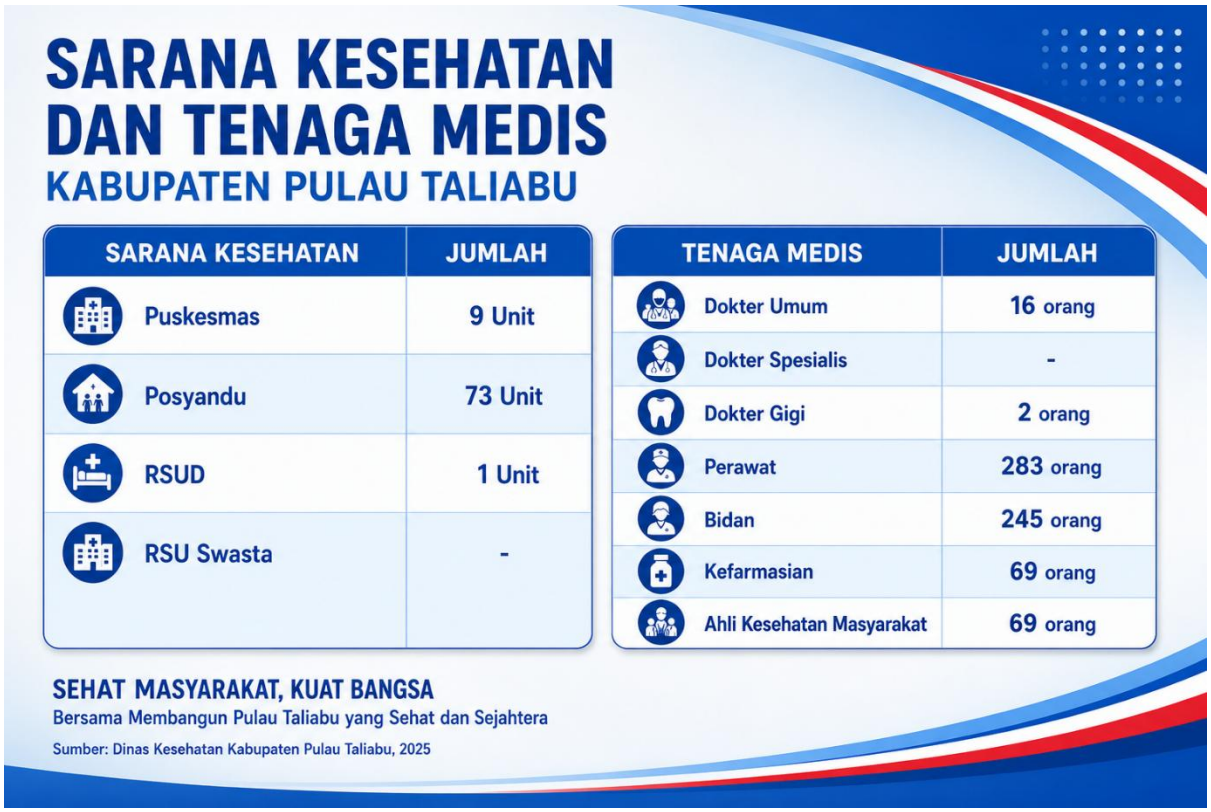
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Rumah tangga miskin umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi yang layak, air minum aman, serta pemenuhan gizi yang seimbang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit, menurunkan produktivitas kerja, serta memperbesar beban pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan. Sebaliknya, masyarakat yang sehat memiliki kapasitas kerja yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, serta peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Strategi tersebut meliputi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan cakupan imunisasi, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil melalui pemerataan tenaga kesehatan dan pengembangan sistem pelayanan berbasis komunitas.

Selain itu, pembangunan kesehatan perlu didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan akses air minum yang aman, sanitasi layak, pengelolaan sampah, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menurunkan angka kesakitan, meningkatkan angka harapan hidup, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama pembangunan daerah.

Dengan demikian, pembangunan sektor kesehatan tidak hanya bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat ketahanan sosial ekonomi rumah tangga, dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Kesehatan yang baik akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengurangi beban pembiayaan kesehatan rumah tangga, serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu, pada subbab berikut akan disajikan berbagai indikator kesehatan, antara lain Umur Harapan Hidup (UHH), angka kesakitan, status gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta indikator kesehatan lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan kesehatan dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.



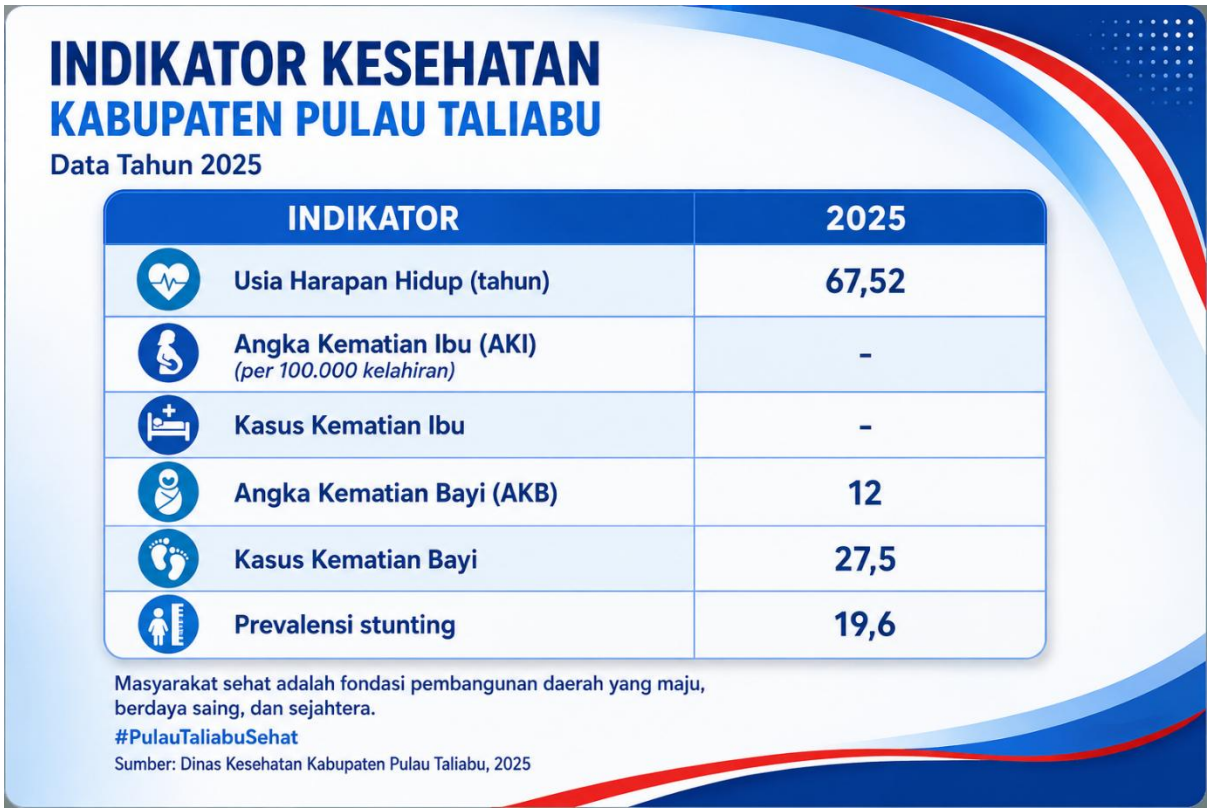
Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang profesional menjadi faktor utama dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kesakitan, peningkatan angka harapan hidup, serta mendukung produktivitas penduduk sebagai modal utama pembangunan daerah.

Kabupaten Pulau Taliabu terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas kesehatan dasar, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan pelayanan promotif dan preventif hingga ke tingkat desa. Ketersediaan puskesmas, posyandu, rumah sakit, serta tenaga medis menjadi indikator penting dalam menggambarkan kapasitas pelayanan kesehatan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026**, pembangunan sektor kesehatan memiliki peran strategis karena masyarakat yang sehat memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, pemenuhan tenaga kesehatan, penguatan pelayanan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu, berikut disajikan data mengenai jumlah sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Data tersebut menggambarkan kesiapan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka* (berbagai tahun), diolah, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, *Profil Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu* (berbagai tahun), diolah

2.6 ASPEK PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu. Selain berperan sebagai penyedia bahan pangan, sektor ini juga menjadi sumber utama mata pencaharian sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pulau Taliabu merupakan yang terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya, sehingga keberhasilan pembangunan sektor pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan tingkat kemiskinan.

Secara geografis, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya lahan yang cukup luas dengan kondisi agroklimat tropis yang mendukung pengembangan berbagai komoditas pertanian, perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan. Ketersediaan lahan, curah hujan yang relatif tinggi, suhu udara yang stabil, serta kondisi tanah yang cukup subur menjadi modal dasar dalam pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan. Komoditas unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh, kakao, kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, serta berbagai tanaman hortikultura memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan. Produktivitas lahan pada beberapa komoditas masih relatif rendah akibat keterbatasan penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, akses terhadap sarana produksi, irigasi, mekanisasi pertanian, serta pendampingan penyuluhan yang belum optimal. Selain itu, kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya distribusi hasil pertanian relatif tinggi sehingga memengaruhi daya saing produk di pasar regional maupun nasional.

Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya kegiatan pengolahan hasil pertanian (*agroprocessing*) yang menyebabkan sebagian besar komoditas dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai tambah yang diterima petani masih rendah dan pendapatan rumah tangga

petani belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan hilirisasi produk pertanian melalui industri pengolahan, penguatan rantai pasok, peningkatan akses pasar, serta pengembangan kemitraan usaha menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, sektor pertanian memiliki posisi yang sangat strategis karena sebagian besar penduduk miskin berada pada rumah tangga yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan perkebunan. Peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan, penciptaan kesempatan kerja, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, pembangunan pertanian menjadi salah satu instrumen utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Strategi pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi pertanian modern, penyediaan benih unggul, peningkatan akses pembiayaan petani, pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, serta pengembangan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain itu, diversifikasi komoditas dan pengembangan pertanian berbasis potensi lokal menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi risiko terhadap fluktuasi harga komoditas.

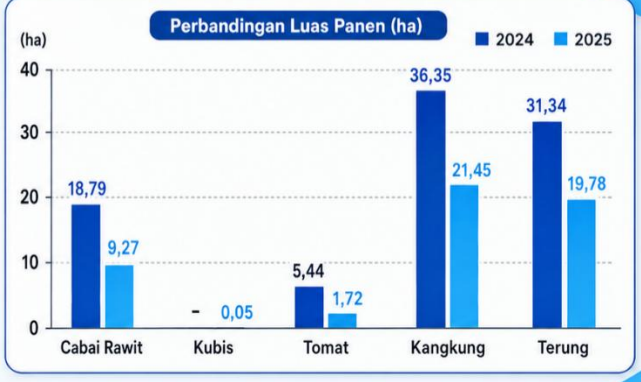
Pengembangan sektor pertanian juga perlu diintegrasikan dengan pengembangan sektor perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal sehingga mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi pedesaan yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pulau Taliabu, berikut disajikan data mengenai luas lahan, produksi komoditas unggulan, produktivitas pertanian, serta perkembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan pertanian dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.

Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pulau Taliabu (ha), 2024 dan 2025

Tanaman Sayuran	Luas Panen (ha)	
	2024	2025
Cabai Rawit	18,79	9,27
Kubis	-	0,05
Tomat	5,44	1,72
Kangkung	36,35	21,45
Terung	31,34	19,78

Keterangan: "-" = Tidak ada data / tidak dipanen

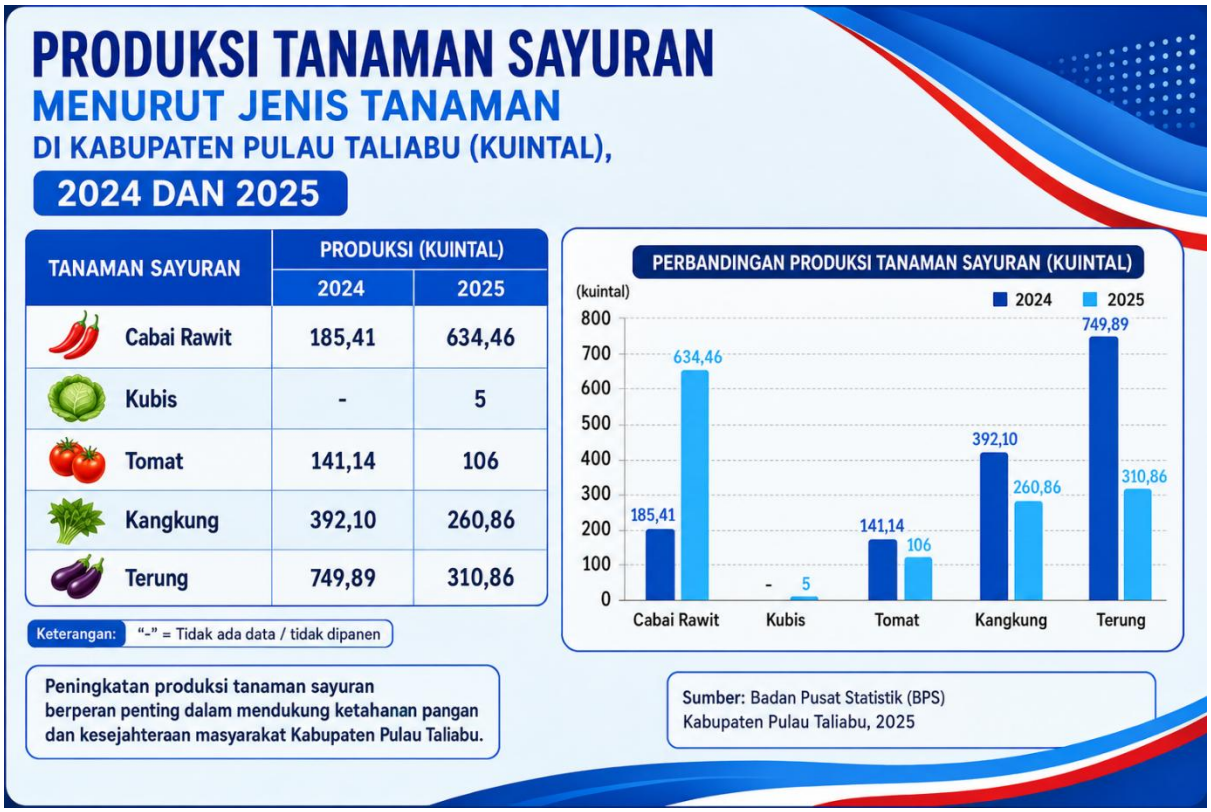


Data luas panen tanaman sayuran menunjukan variasi antar jenis tanaman. Kangkung dan terung menjadi komoditas dengan luas panen terbesar.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, 2025

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Produksi tanaman sayuran merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat produktivitas subsektor hortikultura. Untuk itu, berikut disajikan data produksi tanaman sayuran menurut jenis tanaman di Kabupaten Pulau Taliabu selama Tahun 2024 dan 2025.



Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Luas panen merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kapasitas produksi, tingkat pemanfaatan lahan, serta perkembangan usaha tani hortikultura di suatu daerah. Perubahan luas panen dari waktu ke waktu dapat mencerminkan dinamika aktivitas budidaya, minat petani terhadap komoditas tertentu, serta pengaruh berbagai faktor, seperti kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, teknologi budidaya, dan permintaan pasar. Informasi mengenai luas panen juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan pertanian, penyusunan kebijakan ketahanan pangan, serta pengembangan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, peningkatan luas panen komoditas hortikultura memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien, penggunaan benih unggul, serta penguatan penyuluhan pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian. Selain itu, pengembangan komoditas hortikultura yang memiliki keunggulan komparatif dan permintaan pasar yang tinggi dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi usaha tani, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja di pedesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung percepatan pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, berikut disajikan data luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode Tahun 2022–2025 sebagai gambaran perkembangan subsektor

hortikultura dan potensi pengembangannya dalam mendukung peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan masyarakat.

LUAS PANEN TANAMAN SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM MENURUT JENIS TANAMAN DI KABUPATEN PULAU TALIABU (ha), 2022–2025

Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant in Pulau Taliabu Regency (ha), 2022–2025

JENIS TANAMAN / *KIND OF PLANTS*	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SAYURAN / *VEGETABLES*				
Bawang Daun / *Scallion*	1,35	–	–	1,50
Bawang Merah / *Shallots*	0,08	0,45	–	–
Bawang Putih / *Garlic*	–	–	–	–
Bayam / *Spinach*	3,65	6,00	13,69	10,20
Buncis / *String Bean*	0,04	0,54	0,19	–
Cabai Besar/TW/Teropong / *Chili/Big chili*	–	–	–	–
Cabai Keriting / *Curly Chili*	6,75	4,90	0,92	0,17
Cabai Rawit / *Chili / Cayenne Pepper*	6,85	5,25	18,79	9,27
Jamur Tiram / *Oyster Mushrooms*	–	–	–	–
Jamur Merang / *Straw Mushrooms*	–	–	–	–
Jamur Lainnya / *Other Mushrooms*	–	–	–	–
Kacang Panjang / *Long Beans*	4,75	2,80	11,79	6,94
Kangkung / *Water Spinach*	4,75	19,72	36,35	21,45
Kembang Kol / *Cauliflower*	–	–	–	–
Kentang / *Potato*	–	–	–	–
Ketimun / *Cucumber*	3,15	5,05	7,37	–
Kubis / *Cabbage*	–	–	–	–
Labu Siam / *Chayote*	0,15	1,60	–	3,40
Petsai / *Chinese Cabbage / Mustard Green*	11,90	6,76	6,94	10,91
Terung / *Eggplant*	7,50	16,15	31,34	19,78
Tomat / *Tomato*	2,35	2,35	5,44	1,72
Wortel / *Carrot*	–	–	–	–

JENIS TANAMAN / *KIND OF PLANTS*	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BUAH-BUAHAN / *FRUITS*				
Melon / *Melon*	–	–	–	–
Semangka / *Watermelon*	1,90	1,13	1,29	1,50

Keterangan (*Note*): "–" = Tidak ada data / *No data available*

Sumber (*Source*): Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, 2025

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja subsektor hortikultura, karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan komoditas pangan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat maupun mendukung perekonomian daerah. Tingkat produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain luas panen, produktivitas lahan, penggunaan benih unggul, penerapan teknologi budidaya, kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, serta kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya secara efisien. Oleh karena itu, perkembangan produksi hortikultura menjadi salah satu parameter penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan sektor pertanian.

Data produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim juga memberikan informasi mengenai komoditas yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan produksi tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja di sektor pertanian, serta mendorong tumbuhnya kegiatan agribisnis dan agroindustri berbasis komoditas lokal. Dengan demikian, pengembangan subsektor hortikultura memiliki nilai strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperkuat daya saing daerah.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, peningkatan produksi tanaman hortikultura menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi masyarakat perdesaan. Melalui peningkatan produktivitas lahan, penerapan inovasi teknologi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan hilirisasi hasil pertanian, diharapkan pendapatan rumah tangga petani dapat meningkat secara berkelanjutan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendukung penciptaan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan produksi subsektor hortikultura di Kabupaten Pulau Taliabu, berikut disajikan data produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman selama periode Tahun 2022–2025. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tren produksi masing-masing komoditas serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

PRODUKSI TANAMAN SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN SEMUSIM MENURUT JENIS TANAMAN DI KABUPATEN PULAU TALIABU (KUINTAL), 2022–2025

Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant in Pulau Taliabu Regency (quintal), 2022–2025

JENIS TANAMAN / *KIND OF PLANTS*	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SAYURAN / *VEGETABLES*				
Bawang Daun / *Scallion*	5,40	–	–	38,95
Bawang Merah / *Shallots*	0,32	4,00	–	–
Bawang Putih / *Garlic*	–	–	–	–
Bayam / *Spinach*	55,48	39,84	140,17	225,40
Buncis / *String Bean*	0,48	5,10	1,44	–
Cabai Besar/TW/Teropong / *Chili / Big chili*	112,40	46,29	9,46	23,34
Cabai Keriting / *Curly Chili*	–	–	–	–
Cabai Rawit / *Chili / Cayenne Pepper*	120,30	54,54	185,41	634,46
Jamur Tiram / *Oyster Mushrooms*	–	–	–	–
Jamur Merang / *Straw Mushrooms*	–	–	–	–
Jamur Lainnya / *Other Mushrooms*	–	–	–	–
Kacang Panjang / *Long Beans*	56,60	36,47	245,90	248,27
Kangkung / *Water Spinach*	134,00	223,29	392,10	260,86
Kembang Kol / *Cauliflower*	–	–	–	–
Kentang / *Potato*	–	–	–	–
Ketimun / *Cucumber*	48,00	94,93	171,36	208,92
Kubis / *Cabbage*	–	–	–	5,00
Labu Siam / *Chayote*	2,80	28,34	–	60,00
Petsai / *Chinese Cabbage / Mustard Green*	46,85	34,97	34,70	368,38
Terung / *Eggplant*	93,55	292,60	749,89	310,86
Tomat / *Tomato*	52,80	45,94	141,14	106,00
Wortel / *Carrot*	–	–	–	–

JENIS TANAMAN / *KIND OF PLANTS*	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BUAH-BUAHAN / *FRUITS*				
Melon / *Melon*	–	–	–	–
Semangka / *Watermelon*	7,85	69,61	5,16	47,00

Keterangan (*Note*): "–" = Tidak ada data / *No data available*

Sumber (*Source*): Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, 2025

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan perkembangan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim selama periode 2022–2025, dapat disimpulkan bahwa subsektor hortikultura di Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Beberapa komoditas menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan, seperti cabai rawit yang meningkat dari 120,30 kuintal pada tahun 2022 menjadi 634,46 kuintal pada tahun 2025, bayam dari 55,48 kuintal menjadi 225,40 kuintal, serta petsai yang meningkat menjadi 368,38 kuintal pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami fluktuasi bahkan penurunan produksi, seperti terung, kangkung, dan tomat, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pengelolaan usaha tani, antara lain perubahan luas panen, kondisi iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan sarana produksi, serta akses terhadap teknologi budidaya. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan melalui penyediaan benih unggul, pendampingan penyuluh pertanian, pengembangan irigasi, serta penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, pengembangan subsektor hortikultura memiliki peran strategis sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya rumah tangga petani. Peningkatan produksi hortikultura akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan.

Selain itu, pengembangan komoditas unggulan yang didukung oleh kegiatan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran, dan kemitraan usaha akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga harus diarahkan sebagai strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha tani, serta penguatan rantai nilai agribisnis. Strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

2.7 ASPEK PARIWISATA

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing wilayah. Pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan, transportasi, perhotelan, kuliner, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, didukung oleh karakteristik wilayah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, pantai berpasir putih, perairan yang masih alami, pulau-pulau kecil, kawasan hutan tropis, serta kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Potensi tersebut menjadi modal dasar dalam pengembangan pariwisata berbasis alam (*nature-based tourism*), wisata bahari (*marine tourism*), ekowisata (*ecotourism*), maupun wisata budaya (*cultural tourism*) yang memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa lokal, seperti akomodasi, transportasi, kuliner, kerajinan tangan, serta produk unggulan daerah. Dengan demikian, sektor pariwisata berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan berusaha di tingkat lokal.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 6.806 orang, yang terdiri atas 132 wisatawan mancanegara dan 6.674 wisatawan domestik. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh wisatawan domestik dengan proporsi sekitar 98,06%, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 1,94% dari total kunjungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar wisata domestik masih menjadi penopang utama perkembangan sektor pariwisata daerah, sementara peluang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara masih terbuka luas melalui penguatan promosi destinasi, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, sektor pariwisata memiliki nilai strategis sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan destinasi wisata yang melibatkan masyarakat lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta mendorong tumbuhnya UMKM berbasis pariwisata. Selain itu, pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, kuliner lokal, kerajinan tradisional, dan jasa wisata diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan pesisir.

Ke depan, pembangunan sektor pariwisata perlu diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pengembangan sumber daya manusia

pariwisata, promosi destinasi berbasis digital, serta pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam mewujudkan sektor pariwisata yang kompetitif dan berdaya saing.

Dengan demikian, sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya berfungsi sebagai sektor jasa yang menghasilkan devisa dan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif yang mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu, berikut disajikan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik pada Tahun 2025 sebagai salah satu indikator perkembangan aktivitas pariwisata daerah dan dasar dalam penyusunan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN DOMESTIK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PULAU TALIABU

TAHUN 2025

No.	Kecamatan / *District*	Wisatawan / *Visitors*		
		Mancanegara / *International*	Domestik / *Domestic*	Jumlah / *Total*
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taliabu Barat	123	5.792	5.915
2	Taliabu Selatan	–	–	–
3	Tabona	1	–	1
4	Taliabu Timur Selatan	–	–	–
5	Taliabu Timur	–	–	–
6	Taliabu Utara	–	329	329
7	Lede	8	553	561
8	Taliabu Barat Laut	–	–	–
	Kabupaten Pulau Taliabu	132	6.674	6.806

Memperkenalkan Keindahan Taliabu Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menciptakan Lapangan Kerja Destinasi Wisata Alam dan Bahari

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta kualitas pelayanan kepada wisatawan. Fasilitas seperti akomodasi, rumah makan, akses transportasi, kawasan wisata, dan infrastruktur pendukung lainnya berperan penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Oleh karena itu, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan infrastruktur pendukung sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Taliabu, berikut disajikan data jumlah sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersedia pada tahun 2025.



No.	Kecamatan / *District*	2024	2025
	(1)	(2)	(3)
1	Taliabu Barat	14	19
2	Taliabu Selatan	–	–
3	Tabona	–	–
4	Taliabu Timur Selatan	–	–
5	Taliabu Timur	–	–
6	Taliabu Utara	14	14
7	Lede	4	4
8	Taliabu Barat Laut	2	2
	Kabupaten Pulau Taliabu	**34**	**39**

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Akomodasi hotel merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata, karena berfungsi sebagai sarana utama bagi wisatawan selama berkunjung ke suatu daerah. Ketersediaan akomodasi yang memadai mencerminkan tingkat kesiapan destinasi wisata dalam memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan berkualitas. Selain mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, keberadaan hotel juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan berkembangnya sektor usaha pendukung lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas akomodasi di Kabupaten Pulau Taliabu, berikut disajikan data jumlah hotel menurut kecamatan selama periode Tahun 2024–2025.

JUMLAH AKOMODASI HOTEL
MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN PULAU TALIABU, 2024–2025

No.	Kecamatan / *District*	Hotel / *Hotels*		Jumlah Kamar / *Number of Rooms*		Tempat Tidur / *Beds*	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Taliabu Barat	17	17	209	209	217	217
2	Taliabu Selatan	–	–	–	–	–	–
3	Tabona	–	–	–	–	–	–
4	Taliabu Timur Selatan	–	–	–	–	–	–
5	Taliabu Timur	–	–	–	–	–	–
6	Taliabu Utara	3	3	11	11	11	11
7	Lede	3	3	28	28	28	28
8	Taliabu Barat Laut	2	2	12	12	12	12
	KABUPATEN PULAU TALIABU	25	25	260	260	268	268

Mendukung Sektor Pariwisata | Meningkatkan Kunjungan Wisatawan | Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Memberikan Kenyamanan Bagi Wisatawan

Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025.Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan data sektor pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pariwisata menunjukkan potensi yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah kunjungan wisatawan mencapai 6.806 orang, yang terdiri atas 132 wisatawan mancanegara dan 6.674 wisatawan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar wisata Kabupaten Pulau Taliabu masih didominasi oleh wisatawan domestik (98,06%), sementara kunjungan wisatawan mancanegara (1,94%) masih relatif rendah sehingga memiliki peluang yang besar untuk terus ditingkatkan melalui promosi destinasi, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan daya tarik wisata.

Distribusi kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di Kecamatan Taliabu Barat sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, dengan jumlah kunjungan mencapai 5.915 wisatawan, atau sekitar 86,9% dari total kunjungan wisatawan. Kecamatan Lede dan Taliabu Utara juga mulai menunjukkan kontribusi terhadap aktivitas pariwisata, sedangkan kecamatan lainnya masih memerlukan pengembangan destinasi, infrastruktur, serta fasilitas pendukung agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Dari sisi sarana pendukung, Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2025 memiliki 25 hotel dengan 260 kamar dan 268 tempat tidur, serta 39 rumah makan/restoran yang sebagian besar berada di Kecamatan Taliabu Barat. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dasar bagi wisatawan telah tersedia, namun penyebarannya masih belum merata antarwilayah sehingga perlu ditingkatkan seiring dengan pengembangan destinasi wisata baru.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, sektor pariwisata memiliki potensi yang besar sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan destinasi wisata yang didukung oleh peningkatan kualitas infrastruktur, akomodasi, rumah makan, transportasi, serta promosi pariwisata berbasis potensi lokal diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas aktivitas ekonomi di kawasan perdesaan maupun pesisir.

Secara keseluruhan, sektor pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu masih berada pada tahap pengembangan, namun memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Optimalisasi potensi wisata alam, bahari, budaya, dan ekowisata yang didukung oleh peningkatan kualitas sarana-prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi destinasi secara berkelanjutan akan menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi nyata terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

KABUPATEN PULAU TALIABU

BAB III
PROFIL KEMISKINAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH



BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. KONDISI UMUM KEMIKSINAN DI KABUPATEN PULAU TALIABU

3.1.1. Kondisi Kemiskinan Makro

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesempatan kerja, serta berbagai layanan dasar lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, pengukuran kemiskinan menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Menurut **Badan Pusat Statistik (BPS)**, **kemiskinan makro** didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan ekonomi seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan nonmakanan. Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan **pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)**, yaitu pendekatan yang mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi standar kebutuhan hidup minimum. Dalam pendekatan ini, status kemiskinan ditentukan berdasarkan **tingkat pengeluaran per kapita**, bukan berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh. Pendekatan tersebut dipilih karena pengeluaran dianggap lebih stabil dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dibandingkan pendapatan yang cenderung berfluktuasi, terutama pada masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Dalam pendekatan *basic needs*, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah **Garis Kemiskinan (GK)**. Garis kemiskinan sendiri merupakan penjumlahan dari **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** yang mencerminkan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta **Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)** yang meliputi kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan esensial lainnya.

Untuk menggambarkan kondisi kemiskinan secara lebih komprehensif, BPS menggunakan tiga indikator utama, yaitu:

1. **Persentase Penduduk Miskin (P0)**, yaitu proporsi penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Indikator ini menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang tergolong miskin di suatu wilayah.
2. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*)**, yaitu indikator yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh tingkat pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sehingga menunjukkan semakin besar upaya yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin hingga mencapai garis kemiskinan.
3. **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*)**, yaitu indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin. Nilai P2 yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dan kesenjangan antarpenduduk miskin semakin besar.

Ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi kemiskinan suatu daerah. Persentase penduduk miskin (P0) menunjukkan besarnya jumlah penduduk miskin, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai tingkat kesenjangan dan tingkat keparahan kemiskinan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap ketiga indikator tersebut menjadi sangat penting dalam

mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

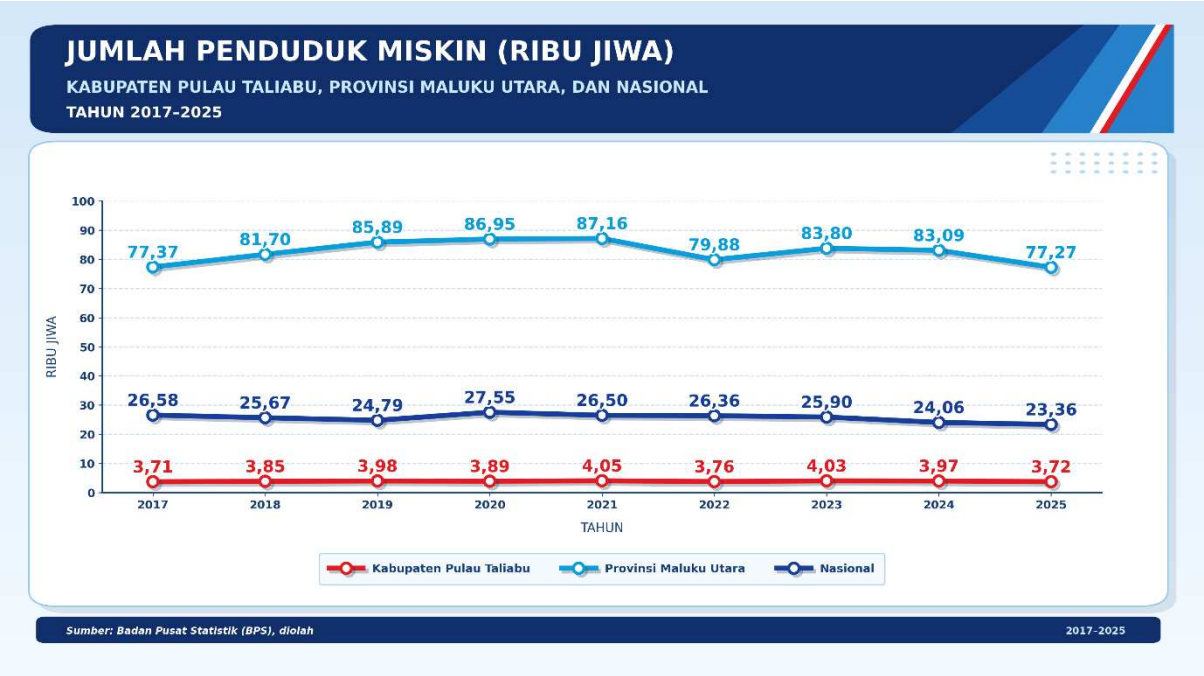
Dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, indikator kemiskinan makro menjadi dasar utama dalam mengidentifikasi kondisi kesejahteraan masyarakat, menentukan kelompok sasaran prioritas, serta mengevaluasi keberhasilan berbagai intervensi pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Analisis terhadap indikator Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu serta menjadi landasan dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase Penduduk Miskin (**P0**) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kemiskinan secara umum dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data periode **2017–2025**, jumlah penduduk miskin di **Kabupaten Pulau Taliabu** menunjukkan kecenderungan yang relatif fluktuatif, namun secara umum mengalami penurunan pada akhir periode. Jumlah penduduk miskin meningkat dari **3,71 ribu jiwa pada tahun 2017** menjadi **4,05 ribu jiwa pada tahun 2021**, kemudian menurun menjadi **3,72 ribu jiwa pada tahun 2025**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial mulai memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Apabila dibandingkan dengan **Provinsi Maluku Utara**, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari **77,37 ribu jiwa pada tahun 2017** menjadi **74,81 ribu jiwa pada tahun 2025**, meskipun sempat mengalami peningkatan pada beberapa tahun. Sementara itu, secara **nasional**, jumlah penduduk miskin turun dari **26,58 juta jiwa pada tahun 2017** menjadi **23,36 juta jiwa pada tahun 2025**, setelah sempat meningkat menjadi **27,55 juta jiwa pada tahun 2020** akibat dampak pandemi COVID-19.



Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara diolah

TABEL JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)

KABUPATEN PULAU TALIABU, PROVINSI MALUKU UTARA, DAN NASIONAL
TAHUN 2017-2025

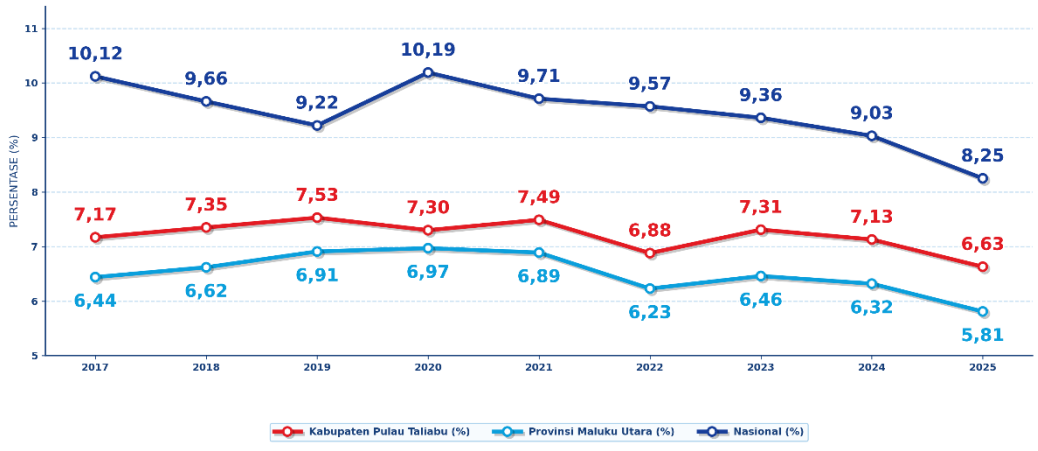
TAHUN	KABUPATEN PULAU TALIABU (RIBU JIWA)	PROVINSI MALUKU UTARA (RIBU JIWA)	NASIONAL (RIBU JIWA)
2017	3,71	77,37	26,58
2018	3,85	81,70	25,67
2019	3,98	85,89	24,79
2020	3,89	86,95	27,55
2021	4,05	87,16	26,50
2022	3,76	79,88	26,36
2023	4,03	83,80	25,90
2024	3,97	83,09	24,06
2025	3,72	77,27	23,36

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2017-2025

Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara diolah

PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)

KABUPATEN PULAU TALIABU, PROVINSI MALUKU UTARA DAN NASIONAL
TAHUN 2017-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan perkembangan **persentase penduduk miskin** di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode **2017–2025**, terlihat bahwa ketiga wilayah menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan, meskipun sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19. Kabupaten Pulau Taliabu mencatat persentase penduduk miskin yang berfluktuasi, dari **7,17% pada tahun 2017** menjadi **6,63% pada tahun 2025**. Penurunan tersebut menunjukkan adanya

perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, walaupun laju penurunannya masih relatif lebih lambat dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.

Pada tingkat **Provinsi Maluku Utara**, persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari **6,44% pada tahun 2017** menjadi **5,59% pada tahun 2025**, sedangkan secara **nasional** menurun dari **10,12%** menjadi **8,25%** pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pembangunan ekonomi dan berbagai program perlindungan sosial telah memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan di berbagai tingkatan wilayah.

Meskipun demikian, **tingkat kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2025 (6,63%) masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara (5,59%)**, namun **lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (8,25%)**. Hal ini mengindikasikan bahwa Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja, produktivitas sektor pertanian, akses terhadap pelayanan dasar, serta kondisi geografis sebagai daerah kepulauan.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (RAD-PK) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, kondisi tersebut menegaskan perlunya intervensi yang lebih terarah melalui penguatan sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, yang merupakan sektor unggulan daerah. Di samping itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, pengembangan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat miskin perlu terus diperkuat agar penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren penurunan persentase penduduk miskin hingga mencapai 6,63% pada tahun 2025 merupakan capaian yang positif bagi Kabupaten Pulau Taliabu. Namun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu dioptimalkan agar tingkat kemiskinan daerah dapat terus menurun hingga berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan target pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Selain melihat perkembangan kemiskinan dari waktu ke waktu, analisis spasial antar kabupaten/kota juga diperlukan untuk mengetahui posisi relatif Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Maluku Utara. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pembangunan daerah dalam menurunkan kemiskinan sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antarwilayah yang masih memerlukan perhatian. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, berbasis karakteristik wilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan di tingkat provinsi.

Berikut disajikan data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara selama periode Tahun 2017–2025 beserta tren perkembangannya sebagai bahan analisis dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

TREN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2017–2025

TAHUN 2017–2025



PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2017–2025 (Persen)

No.	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Halmahera Barat	8,74	8,74	8,59	8,82	8,95	8,43	8,74	8,75	7,90
2.	Halmahera Tengah	14,15	13,94	14,12	13,56	13,52	12,00	11,44	10,71	9,16
3.	Kepulauan Sula	8,59	8,89	8,98	8,35	8,23	7,64	8,17	7,96	7,65
4.	Halmahera Selatan	4,10	4,80	5,03	5,21	5,19	4,99	5,68	5,63	4,81
5.	Halmahera Utara	4,22	4,51	4,55	4,45	5,22	4,58	4,62	4,71	4,35
6.	**Halmahera Timur**	**15,25**	**15,02**	**15,39**	**15,45**	**15,04**	**13,14**	**12,47**	**11,91**	**10,54**
7.	Pulau Morotai	7,07	7,16	7,27	6,46	6,52	5,42	5,38	5,11	4,49
8.	Pulau Taliabu	7,17	7,35	7,53	7,30	7,49	6,88	7,31	7,13	6,63
9.	Kota Ternate	2,73	3,00	3,14	3,46	3,55	3,11	3,39	3,14	3,34
10.	Kota Tidore Kepulauan	5,45	5,95	6,10	6,52	6,58	5,99	6,35	6,56	6,54
11.	**PROVINSI MALUKU UTARA**	**6,35**	**6,64**	**6,77**	**6,78**	**6,89**	**6,23**	**6,46**	**6,32**	**5,81**

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Profil Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017–2025.*

Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara diolah

Berdasarkan perkembangan **persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara selama periode 2017–2025**, terlihat bahwa sebagian besar daerah mengalami tren penurunan tingkat kemiskinan, meskipun dengan laju yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi pascapandemi, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten **Pulau Taliabu** menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan persentase penduduk miskin menurun dari **7,17% pada tahun 2017** menjadi **6,63% pada tahun 2025**. Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2018–2024, secara keseluruhan tren yang terbentuk adalah menurun. Penurunan sebesar **0,54 poin persentase** selama sembilan tahun mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, **Pulau Taliabu berada pada kelompok menengah** dalam tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2025, persentase kemiskinan Pulau Taliabu (**6,63%**) masih berada **di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara (5,81%)**, namun jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu **Halmahera Timur (10,54%)** dan **Halmahera Tengah (9,16%)**. Sementara itu, **Kota Ternate** tetap menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah (**3,34%**), mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi dan akses pelayanan yang relatif lebih baik.

Data tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama Kabupaten Pulau Taliabu adalah mempercepat penurunan kemiskinan agar dapat mencapai bahkan melampaui rata-rata provinsi. Oleh karena itu, **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026** perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat

miskin, serta pembangunan infrastruktur dasar perlu terus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan antardaerah.

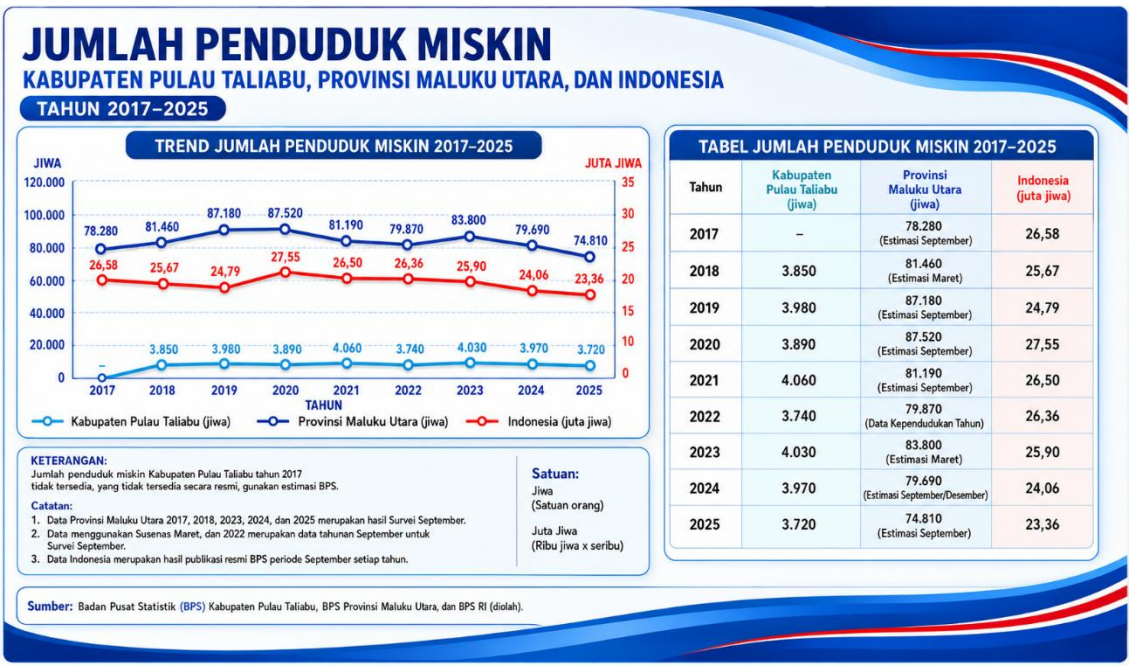
Secara keseluruhan, capaian Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **arah yang positif**, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan berkelanjutan serta mendukung tercapainya target pembangunan daerah dan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**.

3.1.1.2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator makro yang menggambarkan banyaknya penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan ekonomi dan kebijakan perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penentuan penduduk miskin didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach), yaitu penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan berdasarkan tingkat pengeluarannya.

Analisis jumlah penduduk miskin menjadi penting karena tidak hanya menunjukkan besarnya beban kemiskinan yang harus ditangani oleh pemerintah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan data Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Provinsi Maluku Utara dan tingkat nasional, dapat diketahui posisi relatif daerah, arah perkembangan kemiskinan, serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu, berikut disajikan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode Tahun 2017–2025. Data ini menjadi dasar dalam mengevaluasi perkembangan kemiskinan, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026.



TABEL JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2017–2025

Tahun	Kabupaten Pulau Taliabu (jiwa)	Provinsi Maluku Utara (jiwa)	Indonesia (juta jiwa)
2017	–	78.280 (Estimasi September)	26,58
2018	3.850	81.460 (Estimasi Maret)	25,67
2019	3.980	87.180 (Estimasi September)	24,79
2020	3.890	87.520 (Estimasi September)	27,55
2021	4.060	81.190 (Estimasi September)	26,50
2022	3.740	79.870 (Data Kependudukan Tahun)	26,36
2023	4.030	83.800 (Estimasi Maret)	25,90
2024	3.970	79.690 (Estimasi September/Desember)	24,06
2025	3.720	74.810 (Estimasi September)	23,36

Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara diolah

Berdasarkan perkembangan **jumlah penduduk miskin** di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode **2017–2025**, terlihat bahwa secara umum terjadi tren penurunan jumlah penduduk miskin, meskipun sempat mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat mulai memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan.

Di **Kabupaten Pulau Taliabu**, jumlah penduduk miskin berfluktuasi selama periode 2018–2025. Jumlah penduduk miskin mencapai **4.050 jiwa pada tahun 2021**, kemudian menurun menjadi **3.760 jiwa pada tahun 2022**, kembali meningkat menjadi **4.030 jiwa pada tahun 2023**, dan akhirnya turun menjadi **3.720 jiwa pada tahun 2025**, yang merupakan jumlah terendah selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika ekonomi yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu cenderung membaik.

Pada tingkat **Provinsi Maluku Utara**, jumlah penduduk miskin juga menunjukkan kecenderungan menurun dari **87.520 jiwa pada tahun 2020** menjadi **74.810 jiwa pada tahun 2025**. Sementara itu, secara **nasional**, jumlah penduduk miskin berhasil ditekan dari **27,55 juta jiwa pada tahun 2020** menjadi **23,36 juta jiwa pada tahun 2025**, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan penguatan program perlindungan sosial pascapandemi.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, penurunan jumlah penduduk miskin menjadi indikator positif bahwa berbagai program pembangunan telah memberikan hasil. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih terintegrasi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja, penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

3.1.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

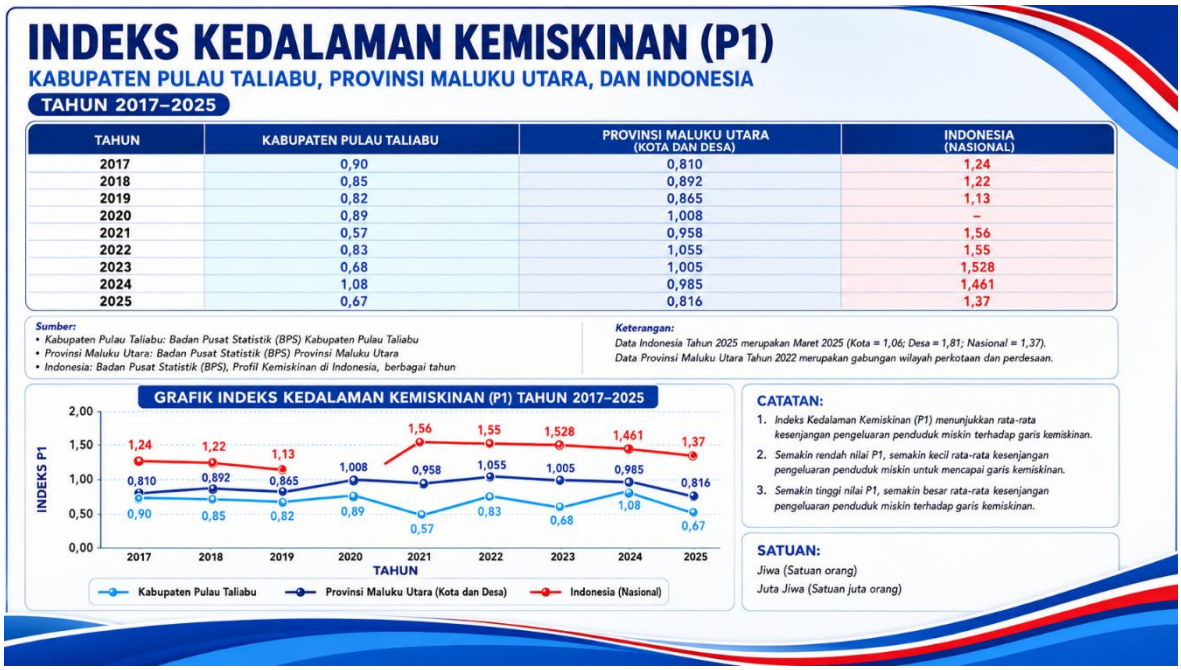
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) merupakan salah satu indikator kemiskinan makro yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indikator ini tidak hanya menunjukkan berapa banyak penduduk yang tergolong miskin, tetapi juga menggambarkan seberapa jauh kondisi ekonomi penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), semakin besar rata-rata kekurangan pengeluaran yang harus dipenuhi agar penduduk miskin dapat mencapai garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin rendah nilai P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan relatif lebih ringan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penurunan persentase penduduk miskin belum tentu diikuti oleh penurunan tingkat kedalaman kemiskinan. Oleh karena itu, analisis P1 diperlukan untuk mengetahui apakah program-program pengentasan kemiskinan telah mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk miskin secara nyata atau hanya mengurangi jumlah penduduk yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan memiliki arti strategis dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026. Nilai P1 dapat memberikan gambaran mengenai besarnya kesenjangan ekonomi yang masih dialami oleh rumah tangga miskin sehingga menjadi dasar dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Program peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan

pariwisata, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial diharapkan mampu mengurangi kedalaman kemiskinan sehingga masyarakat miskin dapat lebih cepat keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

Berikut disajikan data Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode Tahun 2017–2025 sebagai dasar analisis tingkat kesejahteraan penduduk miskin dan evaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.



TAHUN	KABUPATEN PULAU TALIABU	PROVINSI MALUKU UTARA (KOTA DAN DESA)	INDONESIA (NASIONAL)
2017	0,90	0,810	1,24
2018	0,85	0,892	1,22
2019	0,82	0,865	1,13
2020	0,89	1,008	–
2021	0,57	0,958	1,56
2022	0,83	1,055	1,55
2023	0,68	1,005	1,528
2024	1,08	0,985	1,461
2025	0,67	0,816	1,37

Sumber:
- Kabupaten Pulau Taliabu: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu
- Provinsi Maluku Utara: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara
- Indonesia: Badan Pusat Statistik (BPS), Profil Kemiskinan di Indonesia, berbagai tahun

Keterangan:
Data Indonesia Tahun 2025 merupakan Maret 2025 (Kota = 1,06; Desa = 1,81; Nasional = 1,37).
Data Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 merupakan gabungan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara diolah

Berdasarkan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode 2017–2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Nilai P1 Kabupaten Pulau Taliabu menurun dari 0,90 pada tahun 2017 menjadi 0,67 pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Meskipun demikian, peningkatan nilai P1 hingga 1,08 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga miskin sempat mengalami penurunan daya beli sehingga kesenjangan pengeluarannya terhadap garis kemiskinan kembali melebar.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, nilai P1 Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2025 (0,67) lebih rendah daripada provinsi (0,816). Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu memiliki kesenjangan pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan rata-rata penduduk miskin di tingkat provinsi. Demikian pula apabila dibandingkan dengan tingkat nasional, nilai P1 Indonesia pada tahun 2025 sebesar 1,37, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu. Hal ini mengindikasikan bahwa secara relatif tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Meskipun demikian, rendahnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan telah terselesaikan. Indikator ini hanya menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga masih diperlukan perhatian terhadap jumlah penduduk miskin, tingkat keparahan kemiskinan, kualitas lapangan kerja, produktivitas ekonomi, dan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan produktivitas rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinan secara permanen. Penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, perlindungan sosial yang adaptif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi strategi yang sangat penting untuk memperkecil kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu yang berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional pada tahun 2025 merupakan sinyal positif bahwa tingkat kerentanan ekonomi penduduk miskin relatif lebih rendah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi penurunan indeks tersebut melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, penciptaan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan, serta kebijakan yang mampu meningkatkan daya tahan ekonomi rumah tangga miskin secara berkelanjutan.

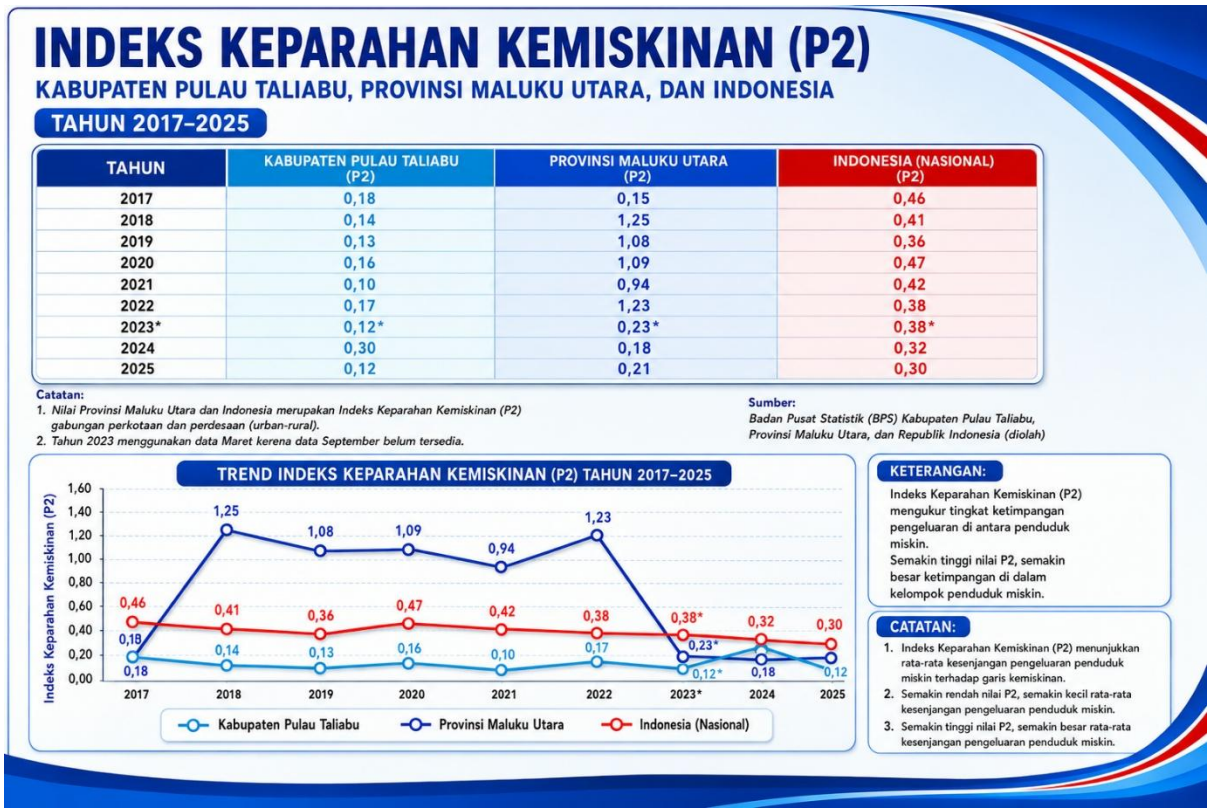
3.1.1.6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) merupakan salah satu indikator kemiskinan makro yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang hanya mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran terhadap garis kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan bobot yang lebih besar kepada penduduk yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, indikator ini mampu menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di dalam kelompok penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin besar ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Sebaliknya, semakin rendah nilai P2 menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil, sehingga distribusi tingkat kesejahteraan dalam kelompok miskin menjadi lebih merata. Oleh karena itu, indikator ini penting untuk menilai kualitas hasil pembangunan, khususnya dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi indikator strategis untuk mengevaluasi apakah kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mampu menurunkan kesenjangan kesejahteraan di antara kelompok miskin. Penurunan nilai P2 mencerminkan bahwa rumah tangga miskin yang berada pada kondisi paling rentan mulai memperoleh manfaat dari berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial.

Oleh karena itu, analisis Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perlu dilakukan secara komprehensif sebagai pelengkap analisis persentase penduduk miskin (P0) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kemiskinan, baik dari aspek jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, maupun tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut disajikan data Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode Tahun 2017–2025 sebagai dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.



TAHUN	KABUPATEN PULAU TALIABU (P2)	PROVINSI MALUKU UTARA (P2)	INDONESIA (NASIONAL) (P2)
2017	0,18	0,15	0,46
2018	0,14	1,25	0,41
2019	0,13	1,08	0,36
2020	0,16	1,09	0,47
2021	0,10	0,94	0,42
2022	0,17	1,23	0,38
2023*	0,12*	0,23*	0,38*
2024	0,30	0,18	0,32
2025	0,12	0,21	0,30

Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara diolah

Berdasarkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode 2017–2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu secara umum berada pada kategori relatif rendah dan lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu relatif kecil sehingga distribusi kesejahteraan di dalam kelompok masyarakat miskin cenderung lebih merata.

Selama periode pengamatan, nilai P2 Kabupaten Pulau Taliabu mengalami fluktuasi dari 0,18 pada tahun 2017 menjadi 0,12 pada tahun 2025. Nilai terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,10, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,30. Peningkatan pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa terdapat kelompok rumah tangga miskin yang mengalami penurunan daya beli lebih besar dibandingkan kelompok miskin lainnya. Namun demikian, penurunan kembali menjadi 0,12 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan adanya perbaikan dalam pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.

Dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, nilai P2 Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten lebih rendah hampir pada seluruh periode pengamatan. Pada tahun 2025, nilai P2 Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 0,12, sedangkan Provinsi Maluku Utara sebesar 0,21 dan Indonesia sebesar 0,30. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih kecil dibandingkan kondisi rata-rata provinsi maupun nasional.

Meskipun demikian, rendahnya nilai Indeks Keparahan Kemiskinan tidak berarti bahwa permasalahan kemiskinan telah selesai. Masih terdapat rumah tangga yang rentan terhadap guncangan ekonomi, bencana, inflasi, maupun penurunan pendapatan yang dapat menyebabkan mereka kembali berada pada kondisi kemiskinan yang lebih berat. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diarahkan pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan kesejahteraan di antara kelompok miskin melalui intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, hasil analisis ini menunjukkan perlunya penguatan program pemberdayaan ekonomi produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, serta optimalisasi perlindungan sosial adaptif bagi rumah tangga miskin yang paling rentan. Strategi tersebut diharapkan mampu menurunkan tidak hanya persentase penduduk miskin (P0), tetapi juga Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) secara bersamaan.

Secara keseluruhan, capaian Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan nasional merupakan indikator positif bahwa tingkat ketimpangan di dalam kelompok penduduk miskin relatif kecil. Kondisi ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang inklusif, pemerataan kesempatan ekonomi, dan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga kemiskinan dapat dikurangi secara lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.1.1.7. Garis Kemiskinan

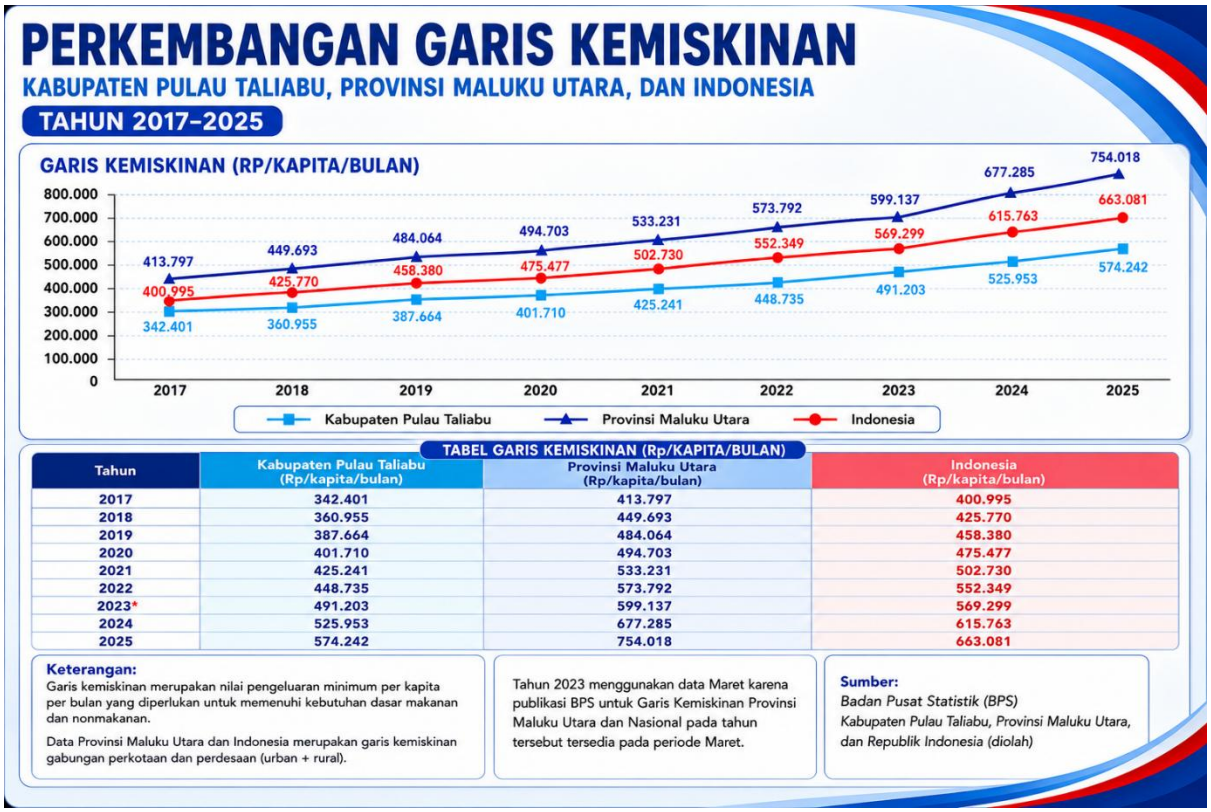
Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator utama yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach), yaitu penjumlahan antara Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan mencerminkan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan Garis Kemiskinan Nonmakanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan esensial lainnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, garis kemiskinan menjadi indikator yang sangat penting karena berfungsi sebagai acuan dalam mengidentifikasi penduduk miskin serta mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenaikan nilai garis kemiskinan dari tahun ke tahun umumnya dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa, tingkat inflasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan garis kemiskinan tidak selalu menunjukkan bertambahnya kemiskinan, tetapi lebih mencerminkan meningkatnya biaya minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, analisis perkembangan garis kemiskinan memberikan gambaran mengenai perubahan biaya hidup masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat dirancang sesuai dengan kondisi riil kebutuhan hidup masyarakat sehingga mampu memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, indikator garis kemiskinan menjadi salah satu dasar dalam merumuskan strategi intervensi yang tepat sasaran. Selain digunakan untuk menentukan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, indikator ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemantauan perkembangan garis kemiskinan secara berkala menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berikut disajikan data perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu selama periode Tahun 2017–2025 sebagai dasar untuk menganalisis perubahan biaya kebutuhan hidup minimum masyarakat serta keterkaitannya dengan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah.



TABEL GARIS KEMISKINAN (Rp/KAPITA/BULAN)

Tahun	Kabupaten Pulau Taliabu (Rp/kapita/bulan)	Provinsi Maluku Utara (Rp/kapita/bulan)	Indonesia (Rp/kapita/bulan)
2017	342.401	413.797	400.995
2018	360.955	449.693	425.770
2019	387.664	484.064	458.380
2020	401.710	494.703	475.477
2021	425.241	533.231	502.730
2022	448.735	573.792	552.349
2023*	491.203	599.137	569.299
2024	525.953	677.285	615.763
2025	574.242	754.018	663.081

Keterangan:
Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.

Data Provinsi Maluku Utara dan Indonesia merupakan garis kemiskinan gabungan perkotaan dan perdesaan (urban + rural).

Tahun 2023 menggunakan data Maret karena publikasi BPS untuk Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara dan Nasional pada tahun tersebut tersedia pada periode Maret.

Sumber:
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Republik Indonesia (diolah)

Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara diolah

Berdasarkan perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia selama periode 2017–2025, terlihat bahwa garis kemiskinan di ketiga wilayah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Pulau Taliabu, garis kemiskinan meningkat dari Rp342.401 per kapita per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp574.242 per kapita per bulan pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 67,7% selama sembilan tahun. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya biaya minimum yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.

Dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Pada tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp574.242, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai Rp754.018 dan Indonesia sebesar Rp663.081 per kapita per bulan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat biaya hidup, harga kebutuhan pokok, serta karakteristik sosial ekonomi antarwilayah. Tingginya garis kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional mengindikasikan bahwa biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar di wilayah tersebut relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu.

Meskipun nilai garis kemiskinan terus meningkat, kondisi tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan bertambah. Garis kemiskinan merupakan indikator nilai minimum kebutuhan hidup, sehingga kenaikannya lebih mencerminkan perubahan harga barang dan jasa, inflasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan garis kemiskinan perlu dianalisis bersamaan dengan perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, serta Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, peningkatan garis kemiskinan menjadi sinyal bahwa program penanggulangan kemiskinan harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan laju yang lebih cepat daripada kenaikan biaya hidup. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah perlu diarahkan pada peningkatan

produktivitas sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pengembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta perlindungan sosial yang adaptif agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Secara keseluruhan, tren peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan bahwa biaya kebutuhan dasar masyarakat terus meningkat. Tantangan pembangunan ke depan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan dan risiko jatuh ke dalam kemiskinan dapat diminimalkan.

3.1.2. Kondisi Kemiskinan Mikro

Kemiskinan mikro merupakan pendekatan analisis kemiskinan yang berfokus pada karakteristik individu, rumah tangga, dan keluarga sebagai unit analisis utama. Berbeda dengan kemiskinan makro yang menggambarkan kondisi kemiskinan secara agregat melalui indikator seperti persentase penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan garis kemiskinan, kemiskinan mikro bertujuan mengidentifikasi siapa yang miskin, di mana mereka berada, serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Dengan demikian, analisis kemiskinan mikro mampu memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kerentanan rumah tangga sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, sanitasi, air minum layak, perlindungan sosial, serta aset produktif. Rumah tangga miskin umumnya mengalami berbagai keterbatasan tersebut secara bersamaan sehingga menyebabkan mereka sulit meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari perangkap kemiskinan.

Dalam konteks pembangunan daerah, analisis kemiskinan mikro memiliki peran yang sangat strategis karena mampu mengidentifikasi profil rumah tangga miskin berdasarkan berbagai karakteristik, antara lain kondisi demografi, tingkat pendidikan kepala keluarga, status pekerjaan, sumber mata pencaharian, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, serta akses terhadap pelayanan dasar. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun intervensi pembangunan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di setiap wilayah.

Data yang digunakan dalam proses analisis kemiskinan mikro pada dokumen ini berasal dari Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), khususnya untuk kelompok masyarakat yang berada pada Desil 1 sampai dengan Desil 4. Data P3KE merupakan basis data terpadu program penanganan kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi yang dikembangkan Pemerintah Indonesia untuk mendata, mengidentifikasi, memverifikasi, dan memutakhirkan kondisi sosial ekonomi keluarga di seluruh Indonesia. Basis data ini disusun sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penargetan program yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dalam klasifikasi P3KE, Desil 1 merupakan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau sekitar 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling rendah, sedangkan Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 menggambarkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang masih rentan terhadap risiko kemiskinan. Dengan menggunakan cakupan Desil 1–4, analisis tidak hanya memotret masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga kelompok miskin dan rentan miskin yang berpotensi kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila mengalami guncangan ekonomi, bencana, maupun penurunan pendapatan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan maupun penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, pemanfaatan Data P3KE menjadi sangat penting mengingat karakteristik wilayah kepulauan, persebaran penduduk yang relatif berjauhan, serta masih adanya kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar di beberapa wilayah. Melalui data mikro yang memuat informasi kondisi sosial ekonomi setiap rumah tangga, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lokasi kantong-kantong kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penyediaan infrastruktur dasar.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, analisis kemiskinan mikro diarahkan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga pada Desil 1–4 berdasarkan berbagai dimensi kesejahteraan, meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan, akses air minum dan sanitasi layak, kepemilikan aset, serta kepesertaan dalam program perlindungan sosial. Pendekatan multidimensi tersebut diharapkan mampu menghasilkan strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis kemiskinan mikro merupakan pelengkap dari analisis kemiskinan makro dalam memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Penggunaan Data P3KE sebagai basis analisis memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, adaptif, dan berbasis data, sehingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.3. Jumlah Penduduk Desil 1-4

Jumlah penduduk berdasarkan Desil 1–4 merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kemiskinan mikro karena memberikan gambaran mengenai sebaran masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan paling rendah hingga kelompok rentan miskin. Pengelompokan desil dilakukan berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, di mana seluruh penduduk diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi kemudian dibagi ke dalam sepuluh kelompok (desil) yang masing-masing mewakili sekitar 10 persen populasi.

Dalam konteks Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Desil 1 mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang menjadi prioritas utama dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 terdiri atas rumah tangga miskin dan rentan miskin yang masih memiliki risiko tinggi mengalami penurunan kesejahteraan apabila menghadapi guncangan ekonomi, bencana, kehilangan pekerjaan, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kelompok Desil 1–4 menjadi sasaran utama berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Analisis jumlah penduduk berdasarkan desil tidak hanya bertujuan mengetahui besarnya populasi yang membutuhkan intervensi pemerintah, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan layanan dasar, menentukan prioritas wilayah penanganan, serta menyusun alokasi program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Semakin besar proporsi penduduk yang berada pada Desil 1–4, semakin besar pula kebutuhan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai bentuk dukungan, baik melalui bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, maupun pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, informasi mengenai jumlah penduduk pada Desil 1–4 memiliki nilai strategis dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026. Data ini menjadi dasar dalam menentukan kelompok sasaran prioritas, mengintegrasikan berbagai

program lintas perangkat daerah, serta memastikan bahwa intervensi pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah. Selain itu, analisis ini juga mendukung pelaksanaan kebijakan satu data kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Perlu dijelaskan bahwa data jumlah penduduk/rumah tangga berdasarkan Desil 1–4 pada tingkat kecamatan dalam dokumen ini merupakan data estimasi. Hal ini disebabkan hingga penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, data resmi yang terdistribusi menurut kecamatan belum tersedia atau belum dipublikasikan oleh instansi yang berwenang, baik Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang tersedia secara resmi masih berupa data agregat pada tingkat kabupaten, sehingga belum memungkinkan untuk menggambarkan secara langsung distribusi rumah tangga pada masing-masing kecamatan.

Oleh karena itu, untuk mendukung proses analisis dan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, dilakukan estimasi distribusi rumah tangga Desil 1–4 berdasarkan pendekatan proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, tingkat perkembangan sosial ekonomi, serta sebaran permukiman pada setiap kecamatan. Proses estimasi tersebut tetap mengacu pada total data resmi Desil 1–4 Kabupaten Pulau Taliabu yang bersumber dari Data P3KE/DTSEN, sehingga konsistensi jumlah rumah tangga pada tingkat kabupaten tetap terjaga.

Hasil estimasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan data resmi, melainkan digunakan sebagai analisis pendukung (proxy analysis) dalam penyusunan kebijakan dan prioritas intervensi pada dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan. Apabila pada masa mendatang telah tersedia data resmi tingkat kecamatan dari Dinas Sosial, BPS, atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka hasil estimasi ini perlu diperbarui dan disesuaikan agar analisis serta perencanaan program semakin akurat dan tepat sasaran.

Berikut disajikan estimasi distribusi rumah tangga Desil 1 sampai dengan Desil 4 menurut kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025. Estimasi ini disusun sebagai gambaran awal mengenai sebaran rumah tangga miskin dan rentan miskin pada masing-masing kecamatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi wilayah prioritas, merumuskan strategi intervensi, serta mendukung penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terarah, dan berkeadilan hingga tersedianya data resmi pada tingkat kecamatan.

ESTIMASI DISTRIBUSI RUMAH TANGGA DESIL 1–4
MENURUT KECAMATAN KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025

Data pada tabel ini merupakan data estimasi karena belum tersedianya data resmi tingkat kecamatan dari Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi dilakukan berdasarkan pendekatan proporsional dengan mengacu pada total data resmi Desil 1–4 Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025 (sumber: Data P3KE/DTSEN).

KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA (KK)					PERSENTASE TERHADAP TOTAL
	DESIL 1 (FAKIR MISKIN)	DESIL 2 (MISKIN)	DESIL 3 (HAMPIR MISKIN)	DESIL 4 (RENTAN MISKIN)	TOTAL DESIL 1–4	
1. Taliabu Barat	635	495	520	566	**2.216**	35,55%
2. Taliabu Selatan	205	160	168	183	**716**	11,49%
3. Tabona	115	90	94	103	**402**	6,45%
4. Taliabu Timur Selatan	130	101	106	116	**453**	7,27%
5. Taliabu Timur	180	140	147	160	**627**	10,06%
6. Taliabu Utara	175	136	143	156	**610**	9,79%
7. Lede	227	177	186	203	**793**	12,72%
8. Taliabu Barat Laut	120	93	98	106	**417**	6,69%
KABUPATEN PULAU TALIABU	**1.787**	**1.392**	**1.462**	**1.593**	**6.234**	**100%**

KETERANGAN DESIL

- Desil 1 = Kelompok 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (fakir miskin)
- Desil 2 = Kelompok rumah tangga miskin.
- Desil 3 = Kelompok rumah tangga hampir miskin.
- Desil 4 = Kelompok rumah tangga rentan miskin.

CATATAN

Data ini bersifat estimasi dan digunakan sebagai analisis pendukung dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Apabila tersedia data resmi tingkat kecamatan dari Dinas Sosial, BPS, atau DTSEN, maka data ini akan diperbarui dan disesuaikan.

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas. SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu) berbasis Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS), 2025.

Berdasarkan hasil estimasi distribusi rumah tangga Desil 1–4 menurut kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, terlihat bahwa konsentrasi rumah tangga miskin dan rentan miskin diperkirakan masih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Kecamatan Taliabu Barat diperkirakan memiliki jumlah rumah tangga Desil 1–4 terbesar, yaitu sekitar 2.216 KK atau 35,55% dari total rumah tangga Desil 1–4 di Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecamatan tersebut menjadi wilayah prioritas dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, baik melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.

Selanjutnya, Kecamatan Lede (793 KK; 12,72%), Taliabu Selatan (716 KK; 11,49%), Taliabu Timur (627 KK; 10,06%), dan Taliabu Utara (610 KK; 9,79%) diperkirakan juga memiliki jumlah rumah tangga miskin dan rentan miskin yang cukup besar. Sementara itu, Tabona, Taliabu Timur Selatan, dan Taliabu Barat Laut diperkirakan memiliki jumlah rumah tangga Desil 1–4 yang relatif lebih sedikit, meskipun tetap memerlukan perhatian dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Meskipun data yang disajikan merupakan hasil estimasi, informasi tersebut memberikan gambaran awal mengenai potensi sebaran rumah tangga miskin dan rentan miskin pada tingkat kecamatan. Hasil estimasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan wilayah prioritas, menyusun target program, serta mengoordinasikan intervensi lintas sektor hingga tersedia data resmi yang lebih rinci.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, estimasi distribusi Desil 1–4 menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu menerapkan pendekatan spasial (spatial targeting), yaitu dengan memprioritaskan kecamatan yang memiliki konsentrasi rumah tangga miskin lebih tinggi tanpa mengabaikan kecamatan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta memastikan bahwa program perlindungan sosial, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, pengembangan pertanian dan perikanan, serta penciptaan lapangan kerja dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Perlu ditegaskan bahwa hasil estimasi ini merupakan analisis pendukung dan bukan data resmi pemerintah. Oleh karena itu, apabila data mikro tingkat kecamatan dari Dinas Sosial, BPS, atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah tersedia, maka hasil estimasi ini perlu diperbarui agar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

3.1.4. Jumlah Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 1-4

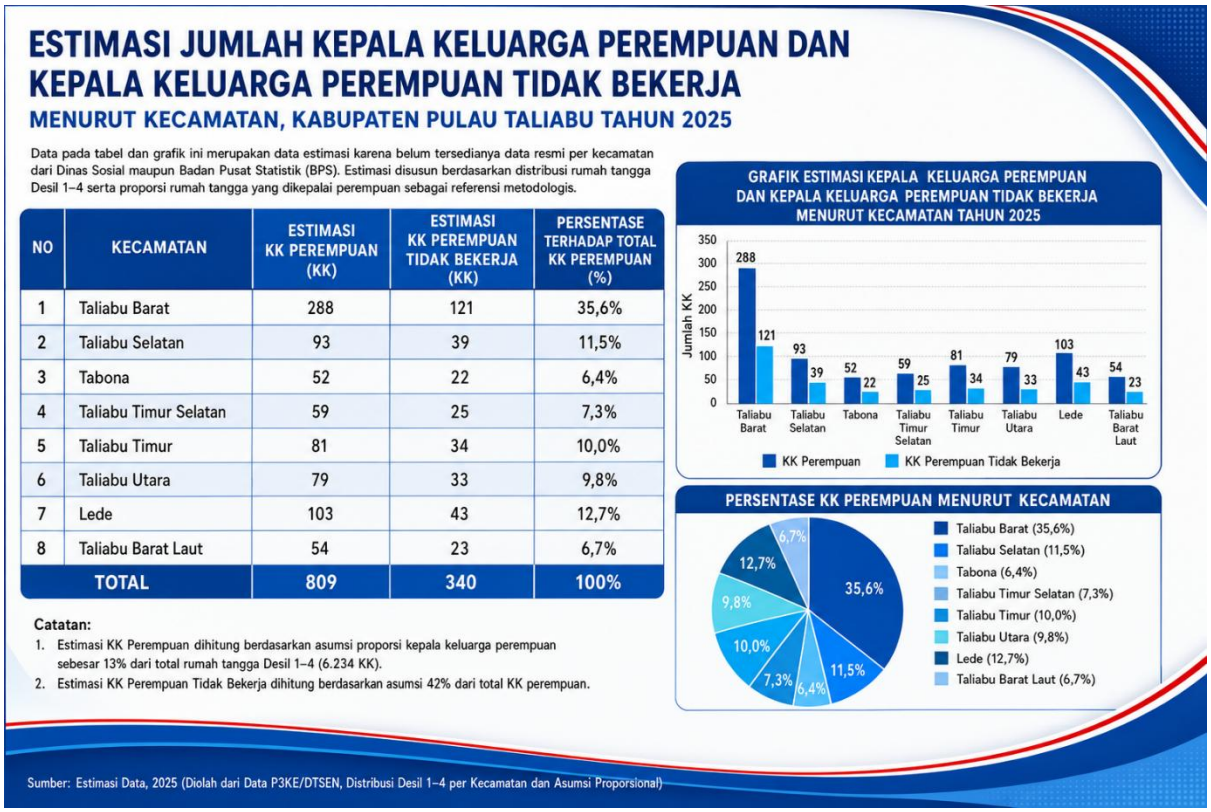
Kepala rumah tangga perempuan merupakan salah satu kelompok yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam analisis kemiskinan mikro. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan memiliki tingkat kerentanan yang relatif lebih tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain diskriminasi gender, beban ganda dalam menjalankan peran domestik dan ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal usaha, dan perlindungan sosial, serta terbatasnya hak kepemilikan dan penguasaan aset produktif. Berbagai hambatan tersebut berpotensi mengurangi kemampuan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan yang inklusif, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan pada Desil 1–4 merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi lebih tinggi karena berada pada lapisan kesejahteraan terendah hingga rentan miskin. Selain menghadapi keterbatasan ekonomi, kelompok ini sering kali memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga, membesarkan anak, serta merawat anggota keluarga lainnya. Kondisi tersebut dapat mengurangi kesempatan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan keterampilan, maupun mengembangkan usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Analisis mengenai jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan pada Desil 1–4 menjadi penting karena mampu menggambarkan sejauh mana dimensi gender memengaruhi kondisi kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu. Informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender (*gender-responsive policy*), khususnya dalam upaya meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, pembiayaan usaha, perlindungan sosial, layanan kesehatan, serta kepemilikan aset produktif. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkeadilan, inklusif, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender).

Dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, identifikasi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan pada Desil 1–4 diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran. Program pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap modal usaha, penguatan kapasitas kewirausahaan, perlindungan sosial adaptif, serta peningkatan akses terhadap aset produktif diharapkan mampu mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak kesejahteraan keluarga.

Berikut disajikan data jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan pada Desil 1–4 di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai gambaran mengenai kelompok rumah tangga yang memiliki kerentanan sosial ekonomi lebih tinggi akibat berbagai faktor, seperti diskriminasi gender, beban ganda, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta belum optimalnya kepemilikan dan penguasaan aset produktif. Analisis ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih responsif gender, inklusif, dan berkelanjutan.



Sumber: Bappenas. SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu) berbasis Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil estimasi jumlah kepala keluarga perempuan dan kepala keluarga perempuan yang tidak bekerja menurut kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, diperkirakan terdapat sekitar 809 kepala keluarga perempuan, di mana sekitar 340 kepala keluarga (42,0%) berada dalam kondisi tidak bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok rumah tangga yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi cukup tinggi, terutama karena keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja, sumber pendapatan, dan aset produktif.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Kecamatan Taliabu Barat diperkirakan memiliki jumlah kepala keluarga perempuan terbesar, yaitu 288 KK (35,6%), dengan 121 KK di antaranya tidak bekerja. Kondisi tersebut sejalan dengan besarnya jumlah rumah tangga Desil 1–4 yang terkonsentrasi di kecamatan tersebut, sehingga Taliabu Barat menjadi wilayah yang memerlukan prioritas intervensi dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengurangan kemiskinan. Selanjutnya, Kecamatan Lede, Taliabu Selatan, Taliabu Timur, dan Taliabu Utara juga diperkirakan memiliki jumlah kepala keluarga perempuan yang relatif tinggi sehingga memerlukan perhatian dalam penyusunan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tingginya jumlah kepala keluarga perempuan yang tidak bekerja menggambarkan bahwa sebagian perempuan masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha produktif. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi gender, beban ganda dalam mengurus rumah tangga dan keluarga, rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, keterbatasan modal usaha, minimnya kepemilikan aset produktif, serta terbatasnya kesempatan kerja, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Pulau Taliabu. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara komprehensif, maka berpotensi memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi dan memperlemah ketahanan ekonomi keluarga.

Dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, kelompok kepala keluarga perempuan, khususnya yang berada pada Desil 1–4, perlu

menjadi salah satu sasaran prioritas program penanggulangan kemiskinan. Intervensi yang dapat dikembangkan antara lain melalui peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan, akses terhadap pembiayaan usaha mikro, penguatan koperasi dan UMKM perempuan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, serta penguatan perlindungan sosial adaptif bagi rumah tangga yang rentan.

Perlu ditegaskan bahwa data yang disajikan merupakan hasil estimasi yang disusun sebagai analisis pendukung karena belum tersedianya data resmi per kecamatan dari Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, hasil estimasi ini diharapkan menjadi gambaran awal dalam mengidentifikasi wilayah prioritas dan kelompok sasaran, serta perlu diperbarui apabila data resmi tingkat kecamatan telah tersedia sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dirumuskan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data.

3.1.5. Jumlah Individu Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin pada Desil 1-4

Analisis jumlah individu berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada Desil 1–4 merupakan salah satu bagian penting dalam kajian kemiskinan mikro. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik demografi penduduk miskin dan rentan miskin sehingga pemerintah daerah dapat memahami komposisi kelompok sasaran secara lebih rinci. Informasi mengenai struktur umur dan jenis kelamin menjadi dasar dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, inklusif, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh karakteristik demografi. Kelompok usia tertentu, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penduduk usia nonproduktif, umumnya memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap anggota rumah tangga lainnya. Di sisi lain, penduduk usia produktif memiliki peran penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, komposisi usia penduduk pada kelompok Desil 1–4 dapat memberikan gambaran mengenai tingkat beban ketergantungan (*dependency ratio*), potensi tenaga kerja, serta kebutuhan intervensi sosial dan ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain usia, jenis kelamin juga merupakan faktor penting dalam analisis kemiskinan. Perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, kepemilikan aset, maupun perlindungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, analisis berdasarkan jenis kelamin diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan mampu mengakomodasi prinsip kesetaraan gender (gender equality) dan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, informasi mengenai jumlah individu berdasarkan usia dan jenis kelamin pada kelompok Desil 1–4 menjadi dasar dalam menentukan kelompok sasaran prioritas berbagai program pembangunan. Misalnya, dominasi kelompok usia anak memerlukan penguatan program pendidikan, perbaikan gizi, dan perlindungan anak; dominasi usia produktif memerlukan perluasan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi; sedangkan dominasi lanjut usia memerlukan penguatan jaminan sosial, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Analisis ini juga mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap siklus kehidupan (*life-cycle approach*), sehingga intervensi pemerintah tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini hingga lanjut usia. Dengan demikian, program yang disusun diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut disajikan data jumlah individu berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada Desil 1–4 di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai gambaran karakteristik demografi masyarakat miskin dan rentan miskin. Informasi ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kelompok sasaran prioritas serta

merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, responsif gender, berbasis siklus kehidupan, dan tepat sasaran.

ESTIMASI INDIVIDU DESIL 1–4 BERDASARKAN KELOMPOK USIA PER KECAMATAN DI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025

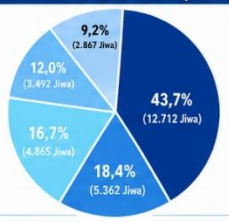
Jumlah Individu (Laki-laki dan Perempuan)

No.	Kecamatan	Usia 0–6 Tahun			Usia 7–14 Tahun			Usia 15–44 Tahun			Usia 45–59 Tahun			Usia >60 Tahun			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Taliabu Barat	887	842	1.729	975	931	1.906	2.305	2.216	4.521	621	621	1.242	532	490	1.022	5.320	5.100	10.420
2	Taliabu Selatan	287	273	560	316	301	617	746	718	1.464	201	201	402	172	159	331	1.722	1.652	3.374
3	Tabona	161	153	314	177	169	346	418	402	820	113	113	226	96	89	185	965	926	1.891
4	Taliabu Timur Selatan	181	172	353	200	190	390	472	454	926	127	127	254	109	100	209	1.089	1.043	2.132
5	Taliabu Timur	251	238	489	276	263	539	651	626	1.277	175	175	350	149	138	287	1.502	1.440	2.942
6	Taliabu Utara	244	232	476	269	256	525	634	609	1.243	171	171	342	145	133	278	1.463	1.401	2.864
7	Lede	317	301	618	348	332	680	821	789	1.610	221	221	442	189	174	363	1.896	1.817	3.713
8	Taliabu Barat Laut	167	159	326	184	175	359	434	417	851	117	117	234	100	92	192	1.002	960	1.962
TOTAL		**2.495**	**2.370**	**4.865**	**2.745**	**2.617**	**5.362**	**6.481**	**6.231**	**12.712**	**1.746**	**1.746**	**3.492**	**1.492**	**1.375**	**2.867**	**14.959**	**14.135**	**29.094**

Grafik 1. Jumlah Individu Desil 1–4 Berdasarkan Kelompok Usia (Laki-laki + Perempuan) per Kecamatan Tahun 2025



Grafik 2. Proporsi Individu Desil 1–4 Berdasarkan Kelompok Usia (Laki-laki + Perempuan) di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025



Kelompok Usia	Jumlah (L+P)	Persentase
Usia 15–44 Tahun	12.712	43,7%
Usia 7–14 Tahun	5.362	18,4%
Usia 0–6 Tahun	4.865	16,7%
Usia 45–59 Tahun	3.492	12,0%
Usia >60 Tahun	2.867	9,2%
TOTAL	**29.094**	**100%**

Catatan:
- Data pada tabel dan grafik ini merupakan hasil estimasi karena belum tersedia data resmi individu Desil 1–4 menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan kecamatan dari Dinas Sosial, BPS maupun DTSEN.
- Estimasi disusun berdasarkan distribusi rumah tangga Desil 1–4 per kecamatan, dengan asumsi rata-rata 3,8 jiwa per rumah tangga serta komposisi umur dan jenis kelamin.

Sumber:
Estimasi Analisis, 2025 (diolah dari Data DTSEN/P3KE, Distribusi Desil 1–4 per Kecamatan, dan Asumsi Demografi)

Sumber: Bappenas. SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu) berbasis Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil estimasi individu Desil 1–4 berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, diperkirakan terdapat sekitar 29.094 individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Dari jumlah tersebut, 14.959 orang (51,4%) berjenis kelamin laki-laki dan 14.135 orang (48,6%) berjenis kelamin perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok Desil 1–4 memiliki distribusi jenis kelamin yang relatif seimbang, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan kebutuhan kedua kelompok secara proporsional.

Berdasarkan kelompok usia, usia produktif (15–44 tahun) merupakan kelompok terbesar dengan jumlah sekitar 12.712 jiwa (43,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin dan rentan miskin berada pada usia yang masih memiliki potensi ekonomi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan dan aset produktif agar kelompok usia produktif mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sementara itu, kelompok anak usia 7–14 tahun mencapai sekitar 5.362 jiwa (18,4%) dan anak usia 0–6 tahun sebanyak 4.865 jiwa (16,7%). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Desil 1–4 merupakan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan akses pendidikan, pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, perlindungan anak, serta program pencegahan stunting. Investasi pada kelompok usia ini sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Di sisi lain, kelompok usia 45–59 tahun berjumlah sekitar 3.492 jiwa (12,0%), sedangkan lanjut usia (>60 tahun) sebanyak 2.867 jiwa (9,2%). Kelompok ini memerlukan dukungan berupa perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pelayanan sosial, serta pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kondisi fisik dan kemampuan mereka. Penyediaan layanan yang memadai bagi kelompok lanjut usia menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara spasial, hasil estimasi menunjukkan bahwa Kecamatan Taliabu Barat diperkirakan memiliki jumlah individu Desil 1–4 terbesar, yaitu sekitar 10.420 jiwa, diikuti oleh Lede (3.713 jiwa), Taliabu Selatan (3.374 jiwa), Taliabu Timur (2.942 jiwa), dan Taliabu Utara (2.864 jiwa). Hal ini mengindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah prioritas dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena memiliki konsentrasi masyarakat miskin dan rentan miskin yang relatif lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, hasil analisis ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan perlu menerapkan pendekatan berbasis siklus kehidupan (*life-cycle approach*) dan pendekatan kewilayahan (*spatial targeting*). Program pembangunan tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat sesuai karakteristik kelompok usia dan kondisi masing-masing kecamatan.

Perlu ditegaskan bahwa data yang disajikan merupakan hasil estimasi yang disusun sebagai analisis pendukung karena belum tersedianya data resmi individu Desil 1–4 menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan kecamatan dari Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, hasil estimasi ini diharapkan menjadi gambaran awal dalam penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas intervensi, serta perlu diperbarui apabila data resmi tingkat kecamatan telah tersedia sehingga proses perencanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data.

3.1.6. Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Desil 1 dan 2

Jumlah penduduk yang berada pada Desil 1 dan Desil 2 merupakan indikator penting dalam analisis kemiskinan mikro karena menggambarkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang menjadi sasaran utama berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dalam klasifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) maupun Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Desil 1 terdiri atas rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau sekitar 10 persen penduduk paling miskin, sedangkan Desil 2 merupakan kelompok masyarakat yang masih berada pada kondisi miskin dan memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai guncangan sosial maupun ekonomi. Kedua kelompok tersebut menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan.

Penduduk yang berada pada Desil 1 dan Desil 2 umumnya menghadapi berbagai bentuk deprivasi, tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, kepemilikan aset produktif, perumahan layak huni, air minum, sanitasi, serta layanan publik lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Oleh karena itu, intervensi pemerintah tidak cukup hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga harus diikuti dengan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

Analisis jumlah penduduk miskin dan rentan miskin pada Desil 1 dan Desil 2 memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Informasi ini memberikan gambaran mengenai besarnya populasi yang memerlukan perhatian khusus serta membantu pemerintah daerah dalam menentukan lokasi prioritas, besaran kebutuhan program, dan alokasi sumber daya secara lebih efektif. Selain itu, analisis ini juga menjadi dasar dalam melakukan

integrasi berbagai program lintas sektor, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM, pengembangan pertanian dan perikanan, serta peningkatan infrastruktur dasar.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, identifikasi jumlah penduduk yang berada pada Desil 1 dan Desil 2 sangat penting mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingkat aksesibilitas yang masih bervariasi, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih rentan terhadap perubahan harga komoditas, bencana alam, maupun perlambatan ekonomi yang dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada upaya perlindungan kelompok paling miskin sekaligus mencegah kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, data jumlah penduduk miskin dan rentan miskin pada Desil 1 dan Desil 2 menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran prioritas program pembangunan daerah. Informasi tersebut digunakan untuk memperkuat ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut disajikan data jumlah penduduk miskin dan rentan miskin yang berada pada Desil 1 dan Desil 2 di Kabupaten Pulau Taliabu. Data ini memberikan gambaran mengenai besarnya kelompok masyarakat yang memerlukan prioritas intervensi pemerintah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, efektif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu. *Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020–2025*. Diakses melalui https://taliabukab.bps.go.id

Berdasarkan hasil estimasi jumlah penduduk miskin Desil 1 dan Desil 2 menurut kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025, diperkirakan terdapat sekitar 14.939 jiwa yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Jumlah tersebut merupakan sekitar 50,99% dari total penduduk pada kelompok Desil 1–4 yang diperkirakan mencapai 29.298 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan terbawah masih tergolong sebagai penduduk miskin yang memerlukan intervensi prioritas dari pemerintah.

Secara kewilayahan, Kecamatan Taliabu Barat diperkirakan memiliki jumlah penduduk miskin Desil 1 dan Desil 2 terbesar, yaitu sekitar 5.313 jiwa, atau sekitar 35,6% dari total penduduk miskin Desil 1 dan 2 di Kabupaten Pulau Taliabu. Selanjutnya, Kecamatan Lede (1.893 jiwa), Taliabu Selatan (1.721 jiwa), Taliabu Timur (1.500 jiwa), dan Taliabu Utara (1.460 jiwa) juga diperkirakan memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi sehingga menjadi wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam penyusunan prioritas program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Tabona, Taliabu Timur Selatan, dan Taliabu Barat Laut memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih rendah, namun tetap memerlukan intervensi sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing kecamatan.

Persentase penduduk miskin Desil 1 dan 2 terhadap total penduduk Desil 1–4 relatif seragam, yaitu sekitar 50,98–51,02% pada seluruh kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi distribusi penduduk miskin mengikuti proporsi rumah tangga Desil 1 dan Desil 2 pada tingkat kabupaten, sehingga memberikan gambaran awal mengenai penyebaran kelompok sasaran prioritas di setiap kecamatan. Meskipun demikian, karakteristik sosial ekonomi setiap wilayah tetap dapat berbeda sehingga memerlukan strategi intervensi yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Dalam perspektif Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memprioritaskan kelompok Desil 1 dan Desil 2 melalui pendekatan yang terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program yang perlu diperkuat meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, dukungan bagi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan akses terhadap pembiayaan dan aset produktif. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan.

Perlu ditegaskan bahwa data yang disajikan merupakan hasil estimasi yang disusun sebagai analisis pendukung karena belum tersedianya data resmi mengenai jumlah penduduk miskin Desil 1 dan Desil 2 menurut kecamatan dari Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, hasil estimasi ini diharapkan menjadi dasar awal dalam penentuan wilayah prioritas dan sasaran program penanggulangan kemiskinan, serta perlu diperbarui apabila data resmi tingkat kecamatan telah tersedia agar proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program dapat dilakukan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data.

3.2. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI

Analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami kondisi kesejahteraan masyarakat dari aspek kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini didasarkan pada konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu basic needs approach, yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang layak. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan pengeluaran konsumsi, bukan semata-mata tingkat pendapatan, karena konsumsi dianggap lebih mampu mencerminkan kondisi ekonomi riil rumah tangga.

Kemiskinan konsumsi tidak hanya menggambarkan rendahnya daya beli masyarakat, tetapi juga menunjukkan keterbatasan akses rumah tangga terhadap berbagai kebutuhan dasar yang mendukung

kualitas hidup. Rumah tangga miskin umumnya memiliki proporsi pengeluaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, komunikasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia masih relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan rumah tangga habis digunakan untuk mempertahankan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi semakin kecil.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pola konsumsi rumah tangga merupakan indikator penting untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hukum Engel (Engel's Law) menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan rumah tangga, maka semakin besar proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Sebaliknya, ketika tingkat kesejahteraan meningkat, proporsi pengeluaran untuk pangan cenderung menurun dan diikuti dengan peningkatan konsumsi terhadap kebutuhan nonpangan, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, serta investasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, struktur konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kerentanan ekonomi masyarakat.

Pada masyarakat yang berada pada kelompok Desil 1–4, keterbatasan konsumsi umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pendapatan rumah tangga, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja, fluktuasi harga kebutuhan pokok, inflasi, keterbatasan akses terhadap pasar, serta tingginya biaya transportasi, terutama pada wilayah kepulauan. Selain itu, rendahnya kepemilikan aset produktif dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan juga menyebabkan rumah tangga miskin sulit meningkatkan kapasitas ekonominya sehingga konsumsi rumah tangga tetap berada pada tingkat minimum.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, analisis karakteristik kemiskinan konsumsi menjadi sangat penting mengingat kondisi geografis sebagai daerah kepulauan yang menyebabkan biaya distribusi barang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya harga berbagai kebutuhan pokok, terutama di wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas. Akibatnya, rumah tangga miskin harus mengalokasikan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan nonpangan menjadi semakin terbatas.

Analisis kemiskinan konsumsi juga memiliki peran strategis dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026. Informasi mengenai pola konsumsi rumah tangga mampu memberikan gambaran mengenai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, tingkat kerentanan masyarakat terhadap kenaikan harga pangan, serta kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan, seperti pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga bahan pokok, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, penguatan perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan produktivitas.

Selain itu, analisis karakteristik konsumsi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi khusus berdasarkan jenis kebutuhan yang belum terpenuhi. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan yang sangat tinggi, misalnya, memerlukan dukungan berupa peningkatan akses terhadap pangan bergizi, bantuan sosial adaptif, maupun program peningkatan pendapatan. Sebaliknya, rumah tangga yang telah mampu memenuhi kebutuhan pangan tetapi masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan atau kesehatan memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi pengeluaran, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi penyebab utama kemiskinan dan menentukan prioritas intervensi pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan

berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada subbab berikutnya akan disajikan berbagai indikator karakteristik kemiskinan konsumsi yang menggambarkan kondisi pengeluaran rumah tangga, pola konsumsi pangan dan nonpangan, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai landasan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

3.2.1. Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator utama dalam mengidentifikasi kondisi kemiskinan konsumsi adalah jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan merupakan nilai minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan sehingga seseorang dapat menjalani kehidupan yang layak. Dengan menggunakan pendekatan basic needs approach, tingkat kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga indikator ini mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga mengalami keterbatasan sumber daya ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, air minum layak, sanitasi, serta akses terhadap berbagai pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, menghambat peningkatan produktivitas, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai permasalahan multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Data mengenai jumlah penduduk miskin memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya populasi yang membutuhkan intervensi pemerintah sekaligus menjadi dasar dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, data jumlah penduduk miskin juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan, memetakan wilayah prioritas penanganan, serta mengevaluasi efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, analisis jumlah penduduk miskin menjadi semakin penting mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan pelayanan dasar, distribusi barang kebutuhan pokok, serta akses masyarakat terhadap kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi produktif. Informasi mengenai jumlah penduduk miskin dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecamatan maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar sehingga alokasi sumber daya pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Data jumlah penduduk miskin juga merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan). Melalui analisis yang komprehensif, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, data jumlah penduduk miskin menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan. Data tersebut menjadi dasar dalam

menetapkan target penurunan kemiskinan, menyusun strategi intervensi lintas sektor, serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*), terukur, dan berkelanjutan.

Melalui analisis karakteristik kemiskinan konsumsi, pemerintah daerah diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat miskin, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesejahteraan, serta kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Informasi tersebut menjadi landasan dalam merancang program penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, inklusif, dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

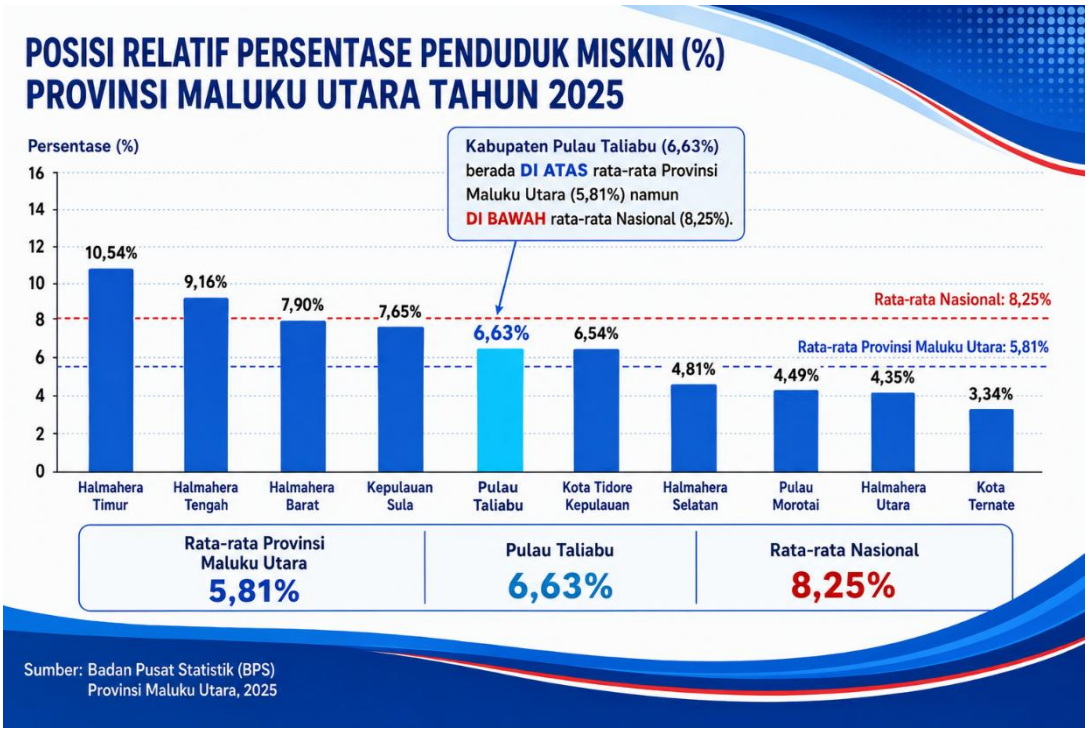
3.2.1.1. Posisi Relatif

Untuk memperoleh gambaran mengenai posisi relatif **Kabupaten Pulau Taliabu** dalam konteks kemiskinan regional, perlu dilakukan perbandingan persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Analisis komparatif ini penting untuk mengetahui tingkat pencapaian Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan daerah lain, sekaligus mengevaluasi posisi kabupaten terhadap **rata-rata Provinsi Maluku Utara** dan **rata-rata nasional**.

Perbandingan tersebut memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan pembangunan daerah dalam menurunkan kemiskinan serta menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata provinsi memerlukan penguatan program penanggulangan kemiskinan agar mampu mengejar capaian pembangunan wilayah lain. Sebaliknya, apabila persentasenya masih berada di bawah rata-rata nasional, kondisi tersebut menunjukkan adanya capaian positif yang perlu dipertahankan melalui program pembangunan yang berkelanjutan.

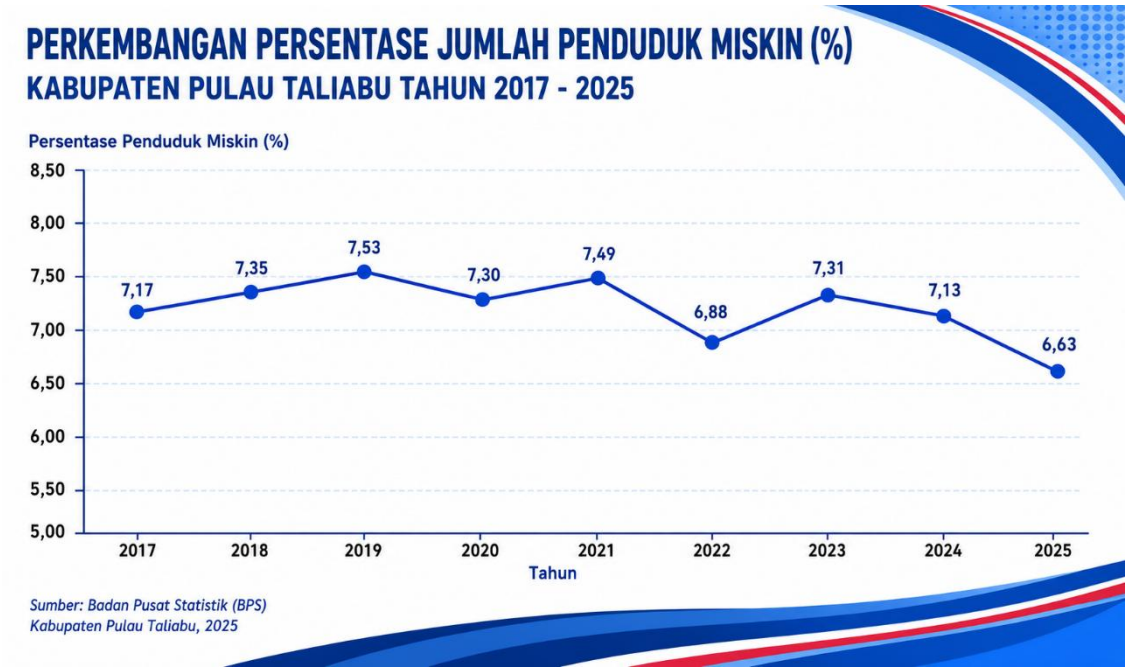
Grafik berikut menyajikan **persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**, dilengkapi dengan **garis pembanding rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 5,81%** dan **garis rata-rata nasional sebesar 8,25%**. Penyajian kedua garis referensi tersebut bertujuan untuk menunjukkan posisi Kabupaten Pulau Taliabu secara lebih jelas dalam konteks regional maupun nasional.

Berdasarkan data tersebut, **Kabupaten Pulau Taliabu memiliki persentase penduduk miskin sebesar 6,63%**, yang berarti **masih berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara (5,81%)**, namun **lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (8,25%)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Pulau Taliabu telah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih baik dibandingkan kondisi nasional, upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu terus diperkuat agar mampu mencapai bahkan melampaui rata-rata kinerja Provinsi Maluku Utara. Upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor unggulan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar sehingga target penurunan kemiskinan dalam **Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026** dapat tercapai secara berkelanjutan.



Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

3.2.1.2. Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

Berdasarkan grafik efektivitas persentase penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025, terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh garis tren yang menghubungkan tahun 2017 (7,17%) dengan tahun 2025 (6,63%), yang memiliki kemiringan menurun sebagai indikasi adanya perbaikan kondisi kemiskinan dalam jangka panjang.

Pada periode 2017–2019, persentase penduduk miskin meningkat dari 7,17% menjadi 7,53%. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2020 (7,30%), namun kembali meningkat pada 2021 (7,49%). Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada 2022, ketika angka kemiskinan turun menjadi 6,88%, meskipun kembali mengalami sedikit kenaikan pada 2023 (7,31%). Setelah itu, tren penurunan berlanjut pada 2024 (7,13%) hingga mencapai 6,63% pada tahun 2025, yang merupakan persentase penduduk miskin terendah selama periode 2017–2025.

Secara kumulatif, persentase penduduk miskin berhasil diturunkan sebesar 0,54 poin persentase, dari 7,17% pada tahun 2017 menjadi 6,63% pada tahun 2025, atau setara dengan penurunan sekitar 7,5% dibandingkan kondisi awal periode. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, meskipun hasilnya belum berlangsung secara konsisten setiap tahun.

Fluktuasi yang masih terjadi mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu masih cukup dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti perubahan kondisi ekonomi, inflasi, harga komoditas utama, kesempatan kerja, produktivitas masyarakat, serta karakteristik wilayah kepulauan yang memengaruhi akses terhadap pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, tren penurunan ini merupakan modal yang baik untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta peningkatan investasi dan infrastruktur dasar. Dengan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran, diharapkan tren penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih stabil sehingga persentase penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus menurun dan berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dalam beberapa tahun mendatang.

3.2.1.3. Analisis Efektivitas

Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025, terlihat bahwa persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan tren menurun. Hal ini ditunjukkan oleh garis tren yang bergerak dari 7,17% pada tahun 2017 menjadi 6,63% pada tahun 2025.

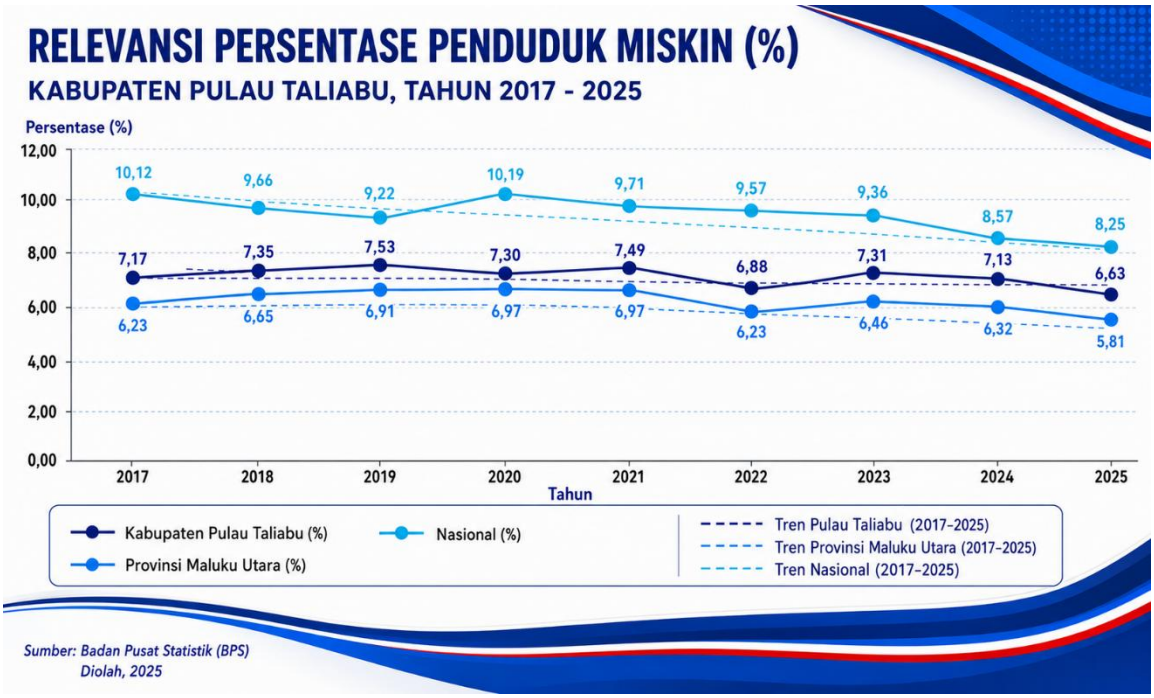
Penurunan sebesar 0,54 poin persentase tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mulai memberikan hasil yang positif. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada beberapa tahun, capaian tahun 2025 merupakan persentase penduduk miskin terendah selama periode 2017–2025.

Secara umum, grafik menunjukkan bahwa efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu terus mengalami perbaikan, sehingga perlu dipertahankan dan diperkuat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

3.2.1.4. Analisis Relevansi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

Berdasarkan grafik perkembangan **persentase penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2017–2025**, terlihat bahwa ketiga wilayah sama-sama menunjukkan **tren penurunan kemiskinan** dalam jangka panjang, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Garis tren yang menghubungkan titik tahun **2017** dan **2025** memperlihatkan

arah penurunan yang menandakan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat selama periode tersebut.

Kabupaten Pulau Taliabu mencatat penurunan persentase penduduk miskin dari **7,17% pada tahun 2017** menjadi **6,63% pada tahun 2025**, atau turun sebesar **0,54 poin persentase**. Meskipun pada beberapa tahun terjadi kenaikan, terutama pada tahun 2019, 2021, dan 2023, secara keseluruhan arah pembangunan menunjukkan hasil yang positif. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan di daerah.

Pada tingkat **Provinsi Maluku Utara**, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari **6,23% pada tahun 2017** menjadi **5,81% pada tahun 2025**, atau berkurang **0,42 poin persentase**. Dibandingkan dengan Kabupaten Pulau Taliabu, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara relatif lebih rendah selama seluruh periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kondisi kesejahteraan masyarakat di tingkat provinsi lebih baik dibandingkan kondisi Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara itu, pada tingkat **nasional**, persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang lebih besar, yaitu dari **10,12% pada tahun 2017** menjadi **8,25% pada tahun 2025**, atau turun sebesar **1,87 poin persentase**. Walaupun tingkat kemiskinan nasional masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara, laju penurunannya relatif lebih cepat, yang mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan nasional dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

Jika dibandingkan pada tahun **2025**, Kabupaten Pulau Taliabu berada pada posisi **di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara** (**6,63% dibandingkan 5,81%**), namun **lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional** (**8,25%**). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu masih menjadi tantangan di tingkat regional, meskipun telah berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa **arah pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu telah berada pada jalur yang positif**, ditandai dengan tren penurunan kemiskinan selama periode 2017–2025. Namun demikian, laju penurunan tersebut masih perlu dipercepat agar mampu mencapai bahkan melampaui capaian rata-rata Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat implementasi **Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor unggulan daerah, penguatan UMKM, perlindungan sosial adaptif, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data diharapkan mampu menghasilkan penurunan kemiskinan yang lebih cepat, merata, dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

3.2.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Tingkat kedalaman kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indikator ini tidak hanya menunjukkan berapa banyak penduduk yang tergolong miskin, tetapi juga menggambarkan seberapa jauh kondisi ekonomi penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, Indeks Kedalaman Kemiskinan memberikan informasi mengenai tingkat keparahan kekurangan pengeluaran yang dialami oleh masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), semakin besar rata-rata kekurangan pengeluaran yang harus dipenuhi agar seluruh penduduk miskin dapat mencapai garis kemiskinan. Sebaliknya, semakin rendah nilai P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga beban kemiskinan yang dialami masyarakat relatif lebih ringan. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting untuk mengevaluasi efektivitas

kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin.

Berbeda dengan persentase penduduk miskin yang hanya menggambarkan jumlah atau proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan memberikan informasi mengenai intensitas kemiskinan. Dua daerah dapat memiliki persentase penduduk miskin yang sama, namun memiliki nilai P1 yang berbeda. Daerah dengan nilai P1 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penduduk miskinnya berada dalam kondisi ekonomi yang lebih berat karena memiliki rata-rata pengeluaran yang lebih jauh di bawah garis kemiskinan.

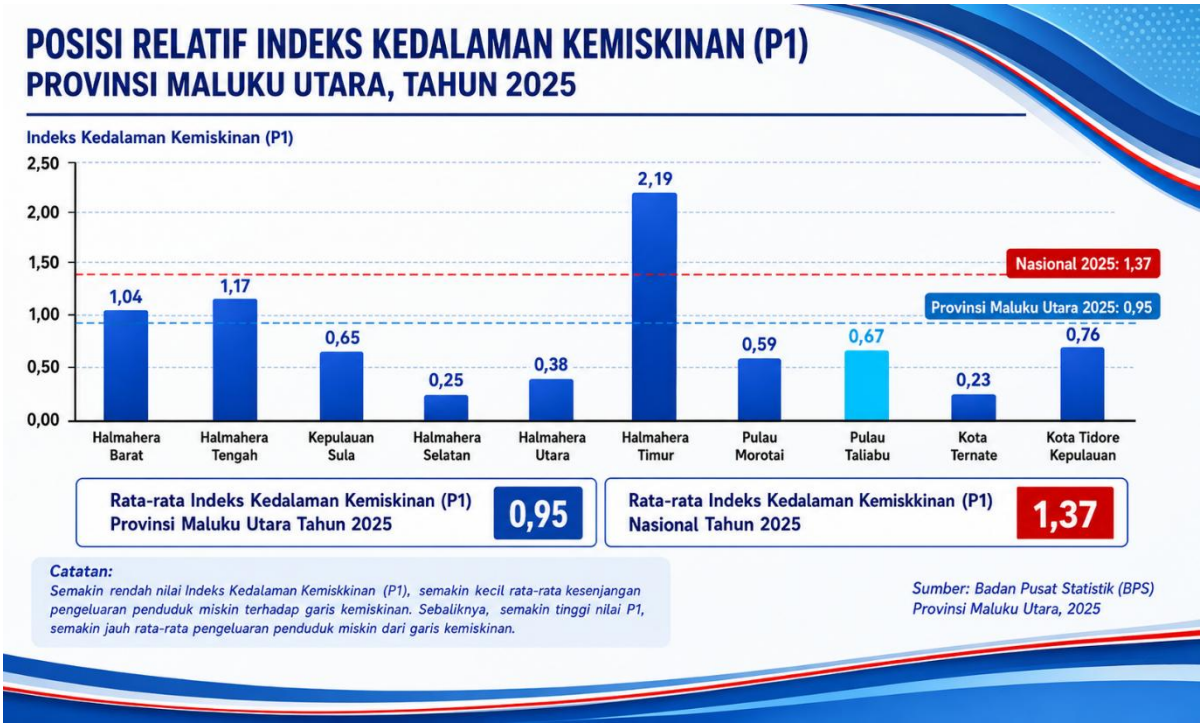
Dalam konteks pembangunan daerah, analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai kebutuhan besaran intervensi yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin keluar dari kondisi kemiskinan. Nilai P1 yang tinggi mengindikasikan perlunya program yang tidak hanya bersifat perlindungan sosial, tetapi juga peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha produktif, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, serta perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan memiliki arti strategis mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan aksesibilitas, tingginya biaya distribusi barang dan jasa, ketergantungan terhadap sektor primer, serta belum meratanya kesempatan ekonomi antarkecamatan. Faktor-faktor tersebut berpotensi menyebabkan rumah tangga miskin memiliki tingkat pengeluaran yang jauh di bawah garis kemiskinan apabila tidak didukung oleh kebijakan pembangunan yang inklusif.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi indikator yang penting untuk mengukur kualitas penurunan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga oleh semakin kecilnya kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan demikian, penurunan nilai P1 mencerminkan bahwa kesejahteraan penduduk miskin semakin membaik dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar semakin meningkat.

Pada bagian berikut akan disajikan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional selama beberapa tahun terakhir. Analisis tersebut bertujuan untuk menggambarkan perubahan tingkat kedalaman kemiskinan, membandingkan posisi Kabupaten Pulau Taliabu terhadap tingkat provinsi dan nasional, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.2.2.1. Posisi Relatif



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

Berdasarkan grafik **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**, terlihat bahwa tingkat kedalaman kemiskinan antarwilayah masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Nilai P1 mencerminkan **rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan**, sehingga semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah tersebut berada semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan memerlukan intervensi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi**, yaitu **2,19**, jauh melampaui rata-rata **Provinsi Maluku Utara (0,95)** maupun **nasional (1,37)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin tidak selalu menjadi yang terbesar, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Halmahera Timur berada paling jauh di bawah garis kemiskinan sehingga menjadi wilayah yang memerlukan prioritas utama dalam penanganan kemiskinan.

Sebaliknya, **Kota Ternate** memiliki nilai P1 terendah, yaitu **0,23**, diikuti **Halmahera Selatan (0,25)** dan **Halmahera Utara (0,38)**. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih dekat dengan garis kemiskinan, sehingga kebutuhan intervensi untuk mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan relatif lebih kecil dibandingkan daerah lainnya.

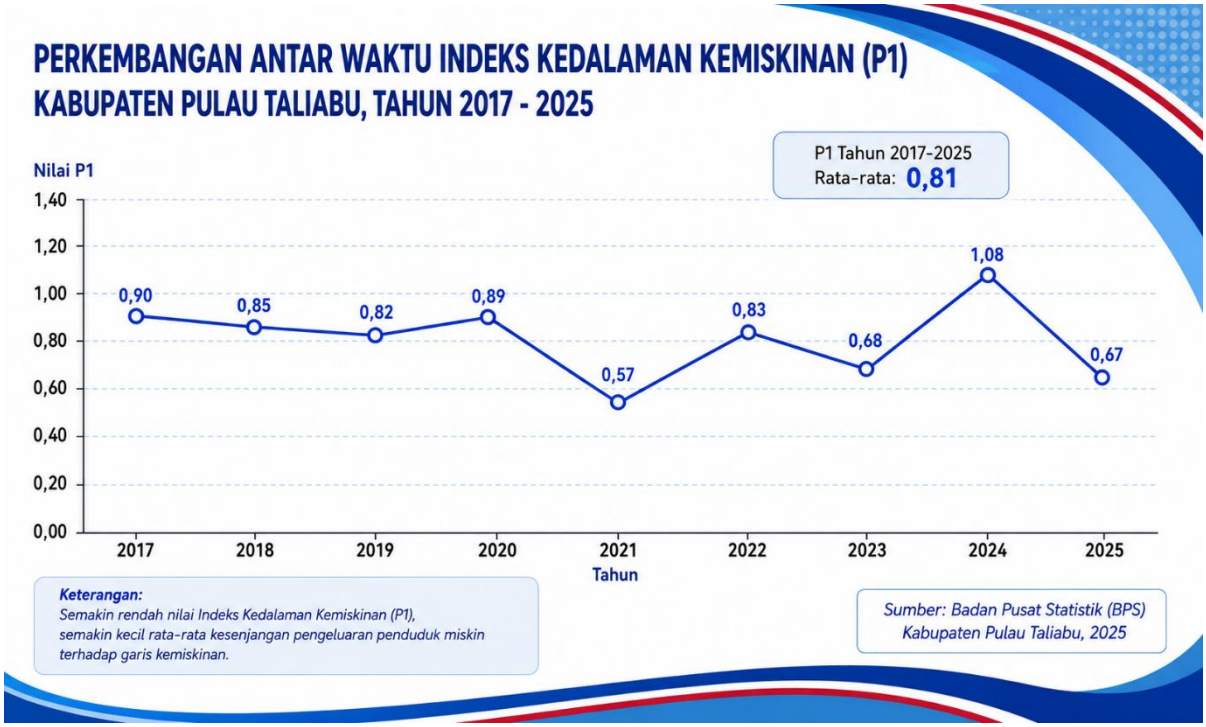
Kabupaten Pulau Taliabu memiliki nilai **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,67**, yang **lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Maluku Utara (0,95)** dan **jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional (1,37)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu terhadap garis kemiskinan relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Dengan kata lain, masyarakat miskin di Pulau Taliabu secara umum

berada lebih dekat dengan garis kemiskinan sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan melalui intervensi yang tepat menjadi lebih besar.

Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, terdapat **empat daerah yang memiliki nilai P1 di atas rata-rata provinsi (0,95)**, yaitu **Halmahera Timur (2,19)**, **Halmahera Tengah (1,17)**, **Halmahera Barat (1,04)**, dan **Halmahera Timur** sebagai wilayah dengan kondisi paling berat. Sementara itu, **enam kabupaten/kota lainnya**, termasuk **Kabupaten Pulau Taliabu**, memiliki nilai P1 di bawah rata-rata provinsi, yang menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan yang relatif lebih baik.

Dalam perspektif **Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026**, hasil ini memberikan sinyal positif bahwa tantangan utama di Kabupaten Pulau Taliabu tidak lagi hanya berfokus pada **kedalaman kemiskinan**, melainkan pada upaya **mengurangi jumlah penduduk miskin dan mencegah kelompok rentan kembali jatuh ke dalam kemiskinan**. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif. Dengan mempertahankan nilai P1 tetap rendah sekaligus menurunkan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai target penurunan kemiskinan secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.

3.2.2.2. Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

Berdasarkan grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025, terlihat bahwa tingkat kedalaman kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara umum menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Nilai P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Oleh karena itu, semakin rendah nilai P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga tingkat kedalaman kemiskinan semakin rendah.

Selama periode 2017–2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap dari 0,90 menjadi 0,82, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2020 nilai P1 kembali meningkat menjadi 0,89, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2021 hingga mencapai 0,57, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan relatif paling kecil.

Memasuki tahun 2022, nilai P1 kembali meningkat menjadi 0,83, kemudian menurun menjadi 0,68 pada tahun 2023. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada 2024, ketika Indeks Kedalaman Kemiskinan mencapai 1,08, yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2017–2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin tidak mengalami peningkatan yang besar, rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun tersebut berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan sehingga tingkat kedalaman kemiskinan meningkat. Pada 2025, kondisi kembali membaik dengan penurunan nilai P1 menjadi 0,67, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali mendekati garis kemiskinan.

Secara keseluruhan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2025 (0,67) lebih rendah dibandingkan tahun 2017 (0,90). Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang telah terjadi penurunan tingkat kedalaman kemiskinan, sehingga rata-rata kondisi ekonomi masyarakat miskin menjadi lebih baik dibandingkan pada awal periode pengamatan. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin.

Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi selama periode pengamatan menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan masih rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi, perubahan harga kebutuhan pokok, inflasi, keterbatasan kesempatan kerja, produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta karakteristik geografis Kabupaten Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan yang memengaruhi biaya distribusi dan akses terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari menurunnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan daya beli masyarakat miskin agar semakin mendekati bahkan melampaui garis kemiskinan.

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, hasil analisis ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan perlu difokuskan pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, penciptaan lapangan kerja produktif, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penguatan program perlindungan sosial yang adaptif. Dengan menjaga agar nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tetap rendah dan terus menurun, diharapkan masyarakat miskin tidak hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

3.2.2.3. Analisis Efektivitas

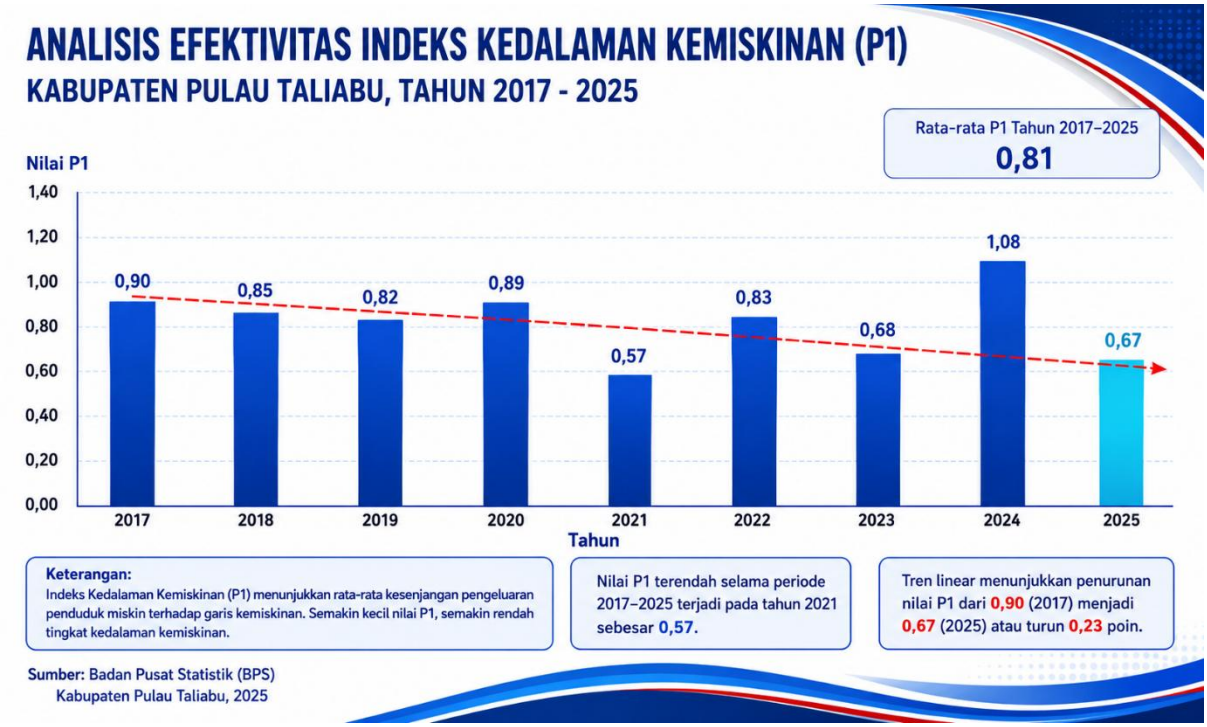
Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025, terlihat bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan. Garis tren yang menghubungkan tahun 2017 dengan 2025 memperlihatkan arah yang menurun, yang mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Pada tahun 2017, nilai P1 tercatat sebesar 0,90, kemudian menurun menjadi 0,67 pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0,23 poin. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu cenderung membaik.

Selama periode pengamatan, nilai P1 terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,57, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 1,08. Peningkatan pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa pada periode tersebut rata-rata pengeluaran penduduk miskin sempat menjauh dari garis kemiskinan. Namun, kondisi tersebut berhasil diperbaiki pada tahun 2025 dengan penurunan P1 menjadi 0,67.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu telah berjalan cukup efektif, tidak hanya ditunjukkan oleh penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga oleh semakin kecilnya kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Meskipun demikian, fluktuasi nilai P1 dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan masih rentan terhadap berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi, inflasi, perubahan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, serta karakteristik wilayah kepulauan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja produktif, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta perlindungan sosial yang adaptif agar tren penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

3.2.2.4. Analisis Relevansi

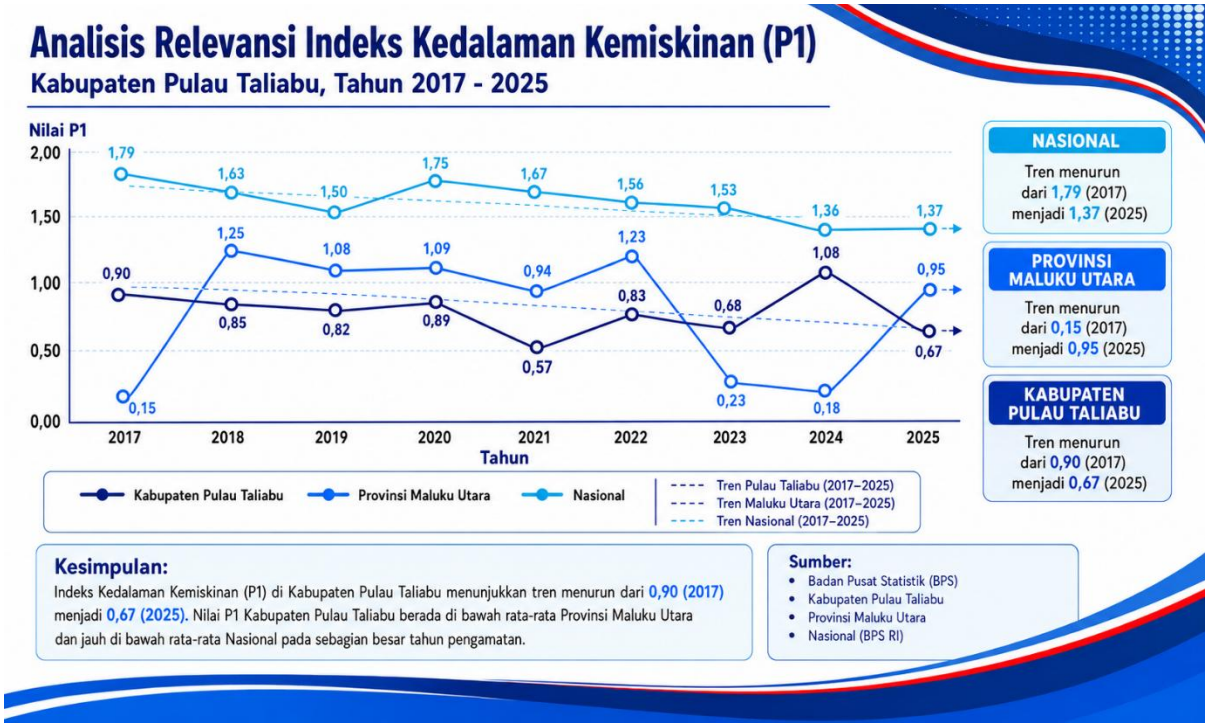
Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025, terlihat bahwa Kabupaten Pulau Taliabu secara umum memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, bahkan pada sebagian besar tahun juga berada di bawah atau mendekati rata-rata Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih kecil dibandingkan wilayah pembanding.

Selama periode 2017–2025, nilai P1 Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan dari 0,90 menjadi 0,67, atau berkurang sebesar 0,23 poin. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran

penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan sehingga tingkat kedalaman kemiskinan cenderung membaik. Meskipun sempat meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 1,08, kondisi tersebut kembali membaik pada tahun 2025 dengan penurunan yang cukup signifikan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki nilai P1 yang lebih rendah pada tahun 2025, yaitu 0,67 dibandingkan 0,95. Sementara itu, dibandingkan dengan nasional, selisihnya lebih besar, yaitu 0,67 berbanding 1,37. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih kecil daripada rata-rata provinsi maupun nasional.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa relevansi kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada arah yang positif. Keberhasilan tersebut tidak hanya tercermin dari menurunnya persentase penduduk miskin, tetapi juga dari semakin kecilnya kedalaman kemiskinan. Dengan demikian, strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada mempertahankan rendahnya nilai P1, sekaligus mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran agar penurunan kemiskinan berlangsung secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

3.2.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), indikator penting lainnya dalam analisis kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2). Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan kemiskinan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui jumlah penduduk miskin maupun kedalaman kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan bagaimana distribusi pengeluaran terjadi di dalam kelompok penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian rumah tangga yang berada dalam kondisi kemiskinan yang jauh lebih berat dibandingkan rumah tangga miskin lainnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai P2, semakin merata tingkat pengeluaran penduduk miskin, sehingga tingkat ketimpangan di dalam kelompok masyarakat miskin relatif kecil.

Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan penekanan pada distribusi atau variasi pengeluaran di antara penduduk miskin. Oleh karena itu, dua daerah dapat memiliki nilai P1 yang sama, tetapi memiliki nilai P2 yang berbeda apabila tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskinnya tidak sama.

Dalam konteks kebijakan pembangunan, Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi indikator strategis untuk mengidentifikasi apakah manfaat pembangunan telah dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat miskin. Nilai P2 yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin masih berada dalam kondisi yang sangat rentan dan memerlukan intervensi yang lebih intensif, seperti bantuan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kesempatan kerja produktif. Sebaliknya, penurunan nilai P2 menunjukkan bahwa manfaat pembangunan mulai terdistribusi secara lebih merata di antara kelompok masyarakat miskin.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, analisis Indeks Keparahan Kemiskinan memiliki arti penting mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses transportasi, tingginya biaya logistik, belum meratanya pembangunan antarwilayah, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup besar di antara rumah tangga miskin apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menjadi salah satu indikator utama untuk mengevaluasi kualitas penurunan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari menurunnya jumlah penduduk miskin atau berkurangnya rata-rata kesenjangan pengeluaran terhadap garis kemiskinan, tetapi juga dari semakin kecilnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan demikian, penurunan nilai P2 mencerminkan bahwa peningkatan kesejahteraan telah dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat miskin.

Pada bagian berikut akan disajikan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional selama periode 2017–2025. Analisis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dinamika tingkat keparahan kemiskinan, membandingkan posisi Kabupaten Pulau Taliabu terhadap rata-rata provinsi dan nasional, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.2.3.1. Posisi Relatif

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah nilai P2, semakin merata kondisi pengeluaran penduduk miskin dan semakin kecil tingkat keparahan kemiskinan.

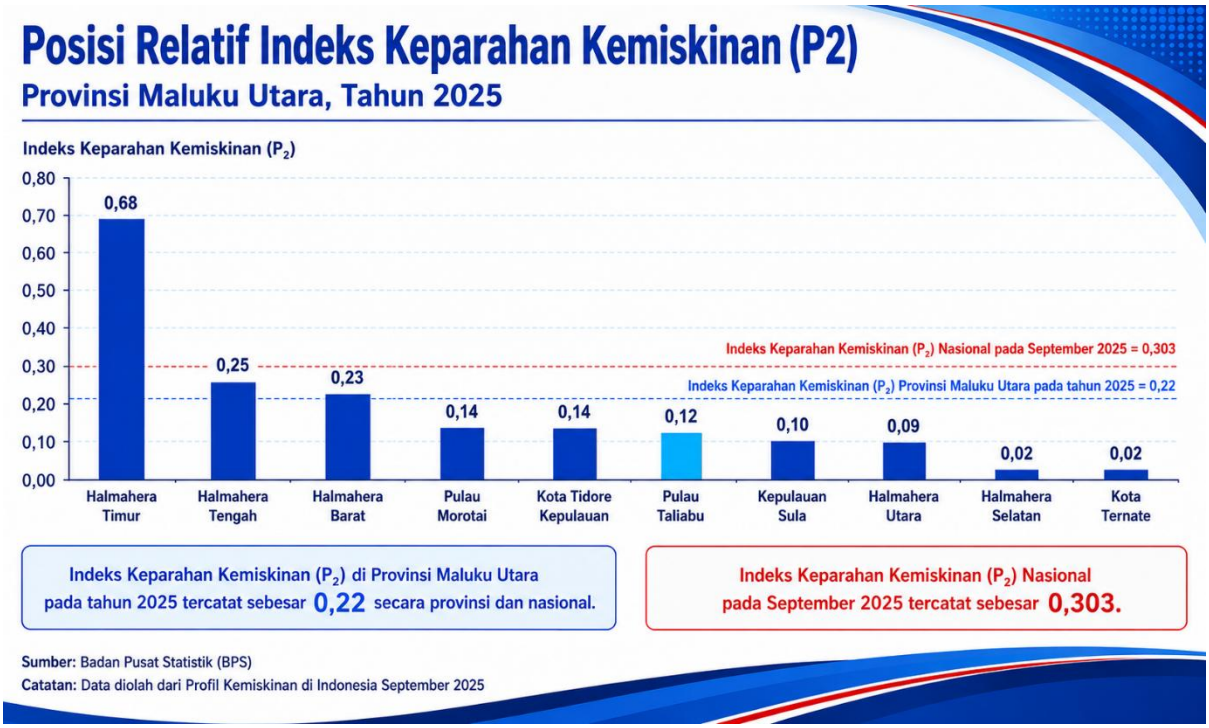
Kabupaten Halmahera Timur memiliki nilai P2 tertinggi, yaitu 0,68, jauh berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara (0,22) maupun nasional (0,303). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan

pengeluaran di antara penduduk miskin di Halmahera Timur masih relatif tinggi sehingga menjadi daerah yang memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih intensif.

Sebaliknya, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki nilai P2 terendah, yaitu 0,02, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di kedua wilayah tersebut relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan distribusi kesejahteraan dalam kelompok penduduk miskin yang lebih merata dibandingkan daerah lainnya.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,12, yang berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (0,22) maupun nasional (0,303). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Dengan demikian, tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat dikatakan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah pembanding.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki posisi yang cukup baik dalam aspek keparahan kemiskinan. Meskipun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tetap perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin yang paling rentan melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Strategi tersebut diharapkan tidak hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menjaga agar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tetap rendah sehingga penurunan kemiskinan berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

3.2.3.2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025, terlihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami fluktuasi dari tahun

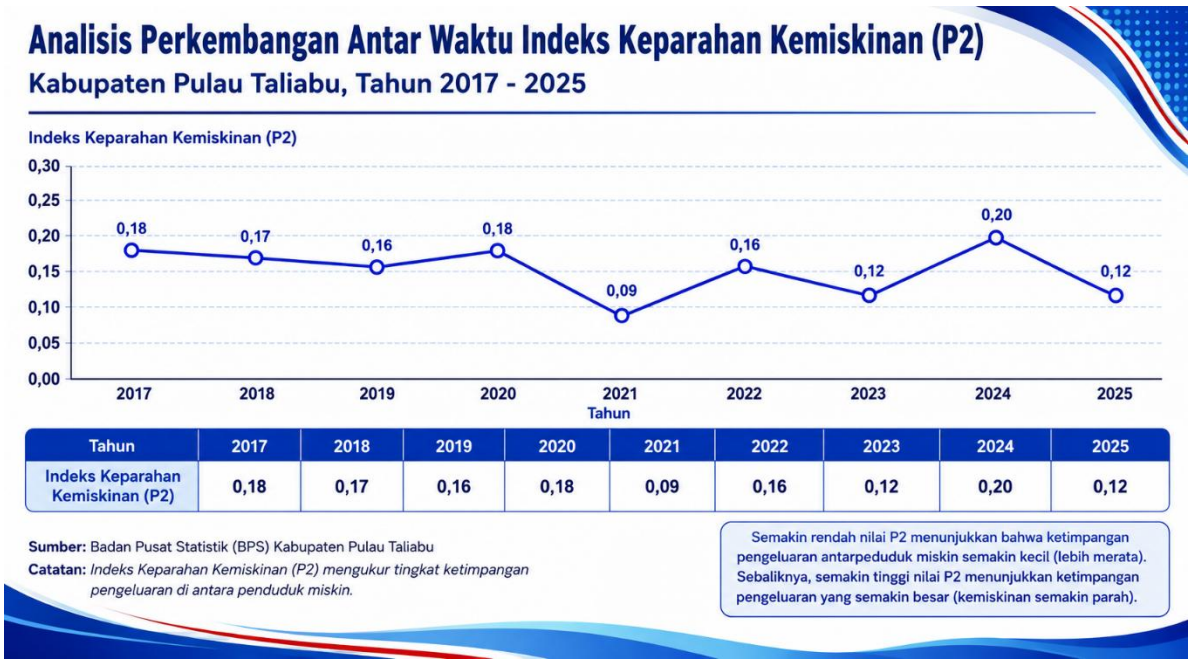
ke tahun, namun secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin berkurang sehingga tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu cenderung membaik.

Pada tahun 2017, nilai P2 tercatat sebesar 0,18, kemudian menurun menjadi 0,12 pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0,06 poin. Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin menjadi lebih merata dibandingkan kondisi pada awal periode pengamatan.

Selama periode 2017–2025, nilai P2 terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,09, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin paling rendah. Sebaliknya, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 0,20, yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan pengeluaran di dalam kelompok masyarakat miskin pada tahun tersebut. Namun demikian, kondisi tersebut berhasil diperbaiki pada tahun 2025 dengan penurunan kembali menjadi 0,12.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan, tetapi juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan dan berbagai program perlindungan sosial mulai dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat miskin.

Meskipun demikian, fluktuasi nilai P2 selama periode pengamatan menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan mengalami penurunan kesejahteraan akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, keterbatasan kesempatan kerja, maupun akses terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan kelompok miskin paling rentan, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penguatan program perlindungan sosial yang adaptif. Dengan demikian, penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dapat dipertahankan secara berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan semakin dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

3.2.3.3. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025, terlihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) secara umum menunjukkan tren menurun, yang ditunjukkan oleh garis lurus dari tahun 2017 ke tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil sehingga efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu cenderung meningkat.

Pada tahun 2017, nilai P2 tercatat sebesar 0,18, kemudian menurun menjadi 0,12 pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 33,3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara rumah tangga miskin semakin merata dan kesenjangan kesejahteraan dalam kelompok masyarakat miskin semakin berkurang.

Meskipun selama periode pengamatan terjadi fluktuasi, terutama peningkatan pada tahun 2024 hingga mencapai 0,20, kondisi tersebut tidak mengubah kecenderungan jangka panjang yang terus membaik. Penurunan kembali menjadi 0,12 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan mampu mengembalikan kondisi ketimpangan pengeluaran ke arah yang lebih baik.

Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran bahwa efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya tercermin dari penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari semakin meratanya tingkat kesejahteraan di antara penduduk miskin. Dengan semakin rendahnya nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), maka semakin kecil pula kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin, yang menunjukkan bahwa manfaat pembangunan mulai dirasakan secara lebih merata.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu mempertahankan tren positif ini melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan kesempatan kerja produktif, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga agar Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terus menurun sehingga penurunan kemiskinan tidak hanya terjadi dari sisi kuantitas, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

3.2.3.4. Analisis Relevansi

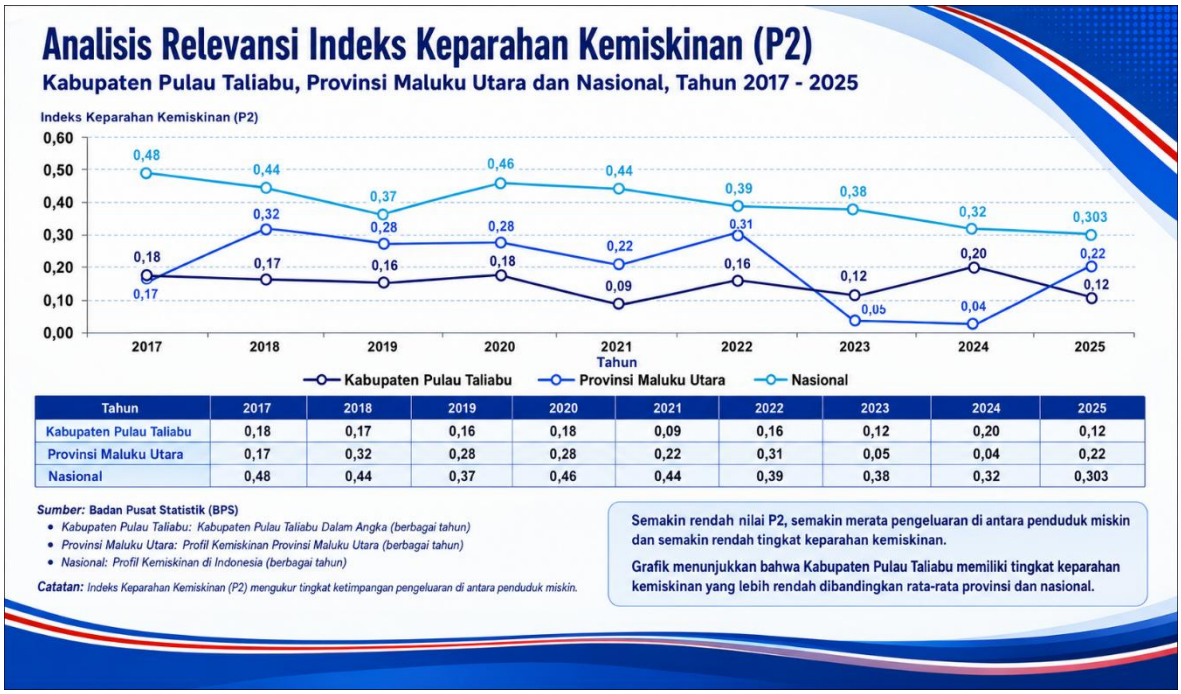
Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2017–2025, terlihat bahwa Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten memiliki nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, serta pada beberapa tahun juga berada di bawah atau mendekati rata-rata Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih rendah dibandingkan wilayah pembanding.

Selama periode 2017–2025, nilai P2 Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan dari 0,18 menjadi 0,12, yang menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran antarpenduduk miskin semakin merata. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional juga mengalami penurunan dari 0,48 pada tahun 2017 menjadi 0,303 pada tahun 2025. Di tingkat Provinsi Maluku Utara, nilai P2 berfluktuasi, namun pada tahun 2025 berada pada angka 0,22, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada tahun 2025, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki nilai P2 sebesar 0,12, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara (0,22) maupun Nasional (0,303). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih kecil, sehingga tingkat keparahan kemiskinan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu telah berada pada arah yang positif. Tidak hanya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan, tetapi juga terjadi penurunan tingkat keparahan kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan dan program pengentasan kemiskinan mulai dirasakan secara lebih merata oleh kelompok masyarakat miskin.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tetap perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, perluasan kesempatan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Dengan demikian, penurunan kemiskinan tidak hanya tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari semakin kecilnya kesenjangan kesejahteraan di dalam kelompok masyarakat miskin, sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus terwujud.



Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Pulau Taliabu	0,18	0,17	0,16	0,18	0,09	0,16	0,12	0,20	0,12
Provinsi Maluku Utara	0,17	0,32	0,28	0,28	0,22	0,31	0,05	0,04	0,22
Nasional	0,48	0,44	0,37	0,46	0,44	0,39	0,38	0,32	0,303

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

3.2.4. Kemiskinan Ekstrim

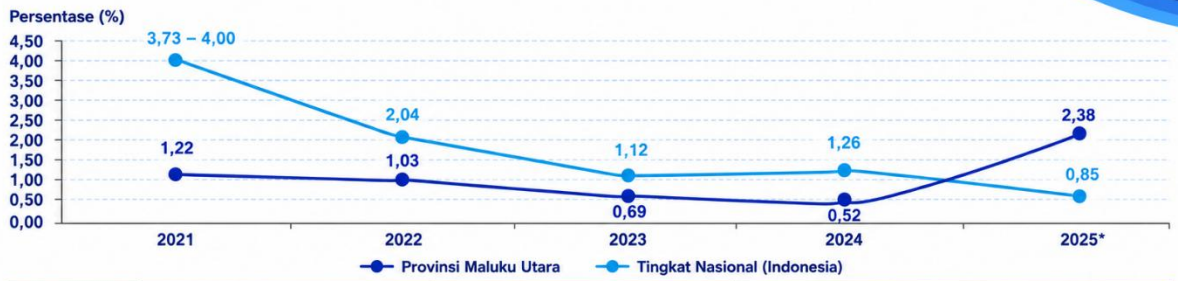
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Secara internasional, **Bank Dunia (World Bank)** mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi ketika seseorang hidup dengan pengeluaran atau pendapatan di bawah **US$1,90 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari** (metodologi sebelumnya). Purchasing Power Parity (PPP) merupakan metode penyesuaian daya beli yang digunakan untuk membandingkan kemampuan konsumsi masyarakat antarnegara dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga barang dan jasa.

Dengan demikian, penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran atau pendapatan harian di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai **penduduk miskin ekstrem**, yaitu kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan sangat serius dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, perumahan layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, air minum, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam konteks Indonesia, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan **Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)** sebagai basis penentuan sasaran. P3KE merupakan data terpadu yang memuat informasi kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rumah tangga, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada pada kondisi miskin ekstrem maupun rentan miskin secara lebih akurat.

Bagi **Kabupaten Pulau Taliabu**, analisis kemiskinan ekstrem memiliki arti strategis karena karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan dasar yang belum merata, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer dapat meningkatkan kerentanan rumah tangga untuk terjebak dalam kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, identifikasi penduduk miskin ekstrem menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik melalui bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Provinsi Maluku Utara dan Nasional
Tahun 2021–2025



Tahun	Provinsi Maluku Utara (%)	Tingkat Nasional (Indonesia) (%)	Catatan Standar Pengukuran BPS
2021	1,22	3,73 – 4,00	Berdasarkan batas lama 1,90 USD PPP per hari.
2022	1,03	2,04	Mengalami penurunan signifikan pasca-pandemi.
2023	0,69	1,12	Penurunan tajam berkat integrasi bansos makro.
2024	0,52	1,26	Maluku Utara sukses menyentuh angka di bawah 1%.
2025*	2,38	0,85	*Penyesuaian batas menjadi **2,15 USD PPP per hari.**

Keterangan:
- Data tahun 2021–2024 menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem 1,90 USD PPP per kapita per hari.
- Data tahun 2025* menggunakan standar baru garis kemiskinan ekstrem 2,15 USD PPP per kapita per hari sesuai pembaruan Bank Dunia.

Sumber:
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
- World Bank – Poverty & Equity Global Practice (2025)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

Berdasarkan grafik Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di Provinsi Maluku Utara dan Nasional Tahun 2021–2024, terlihat bahwa baik Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional sama-sama menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam angka kemiskinan ekstrem. Hal ini mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan berbagai program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selama periode tersebut.

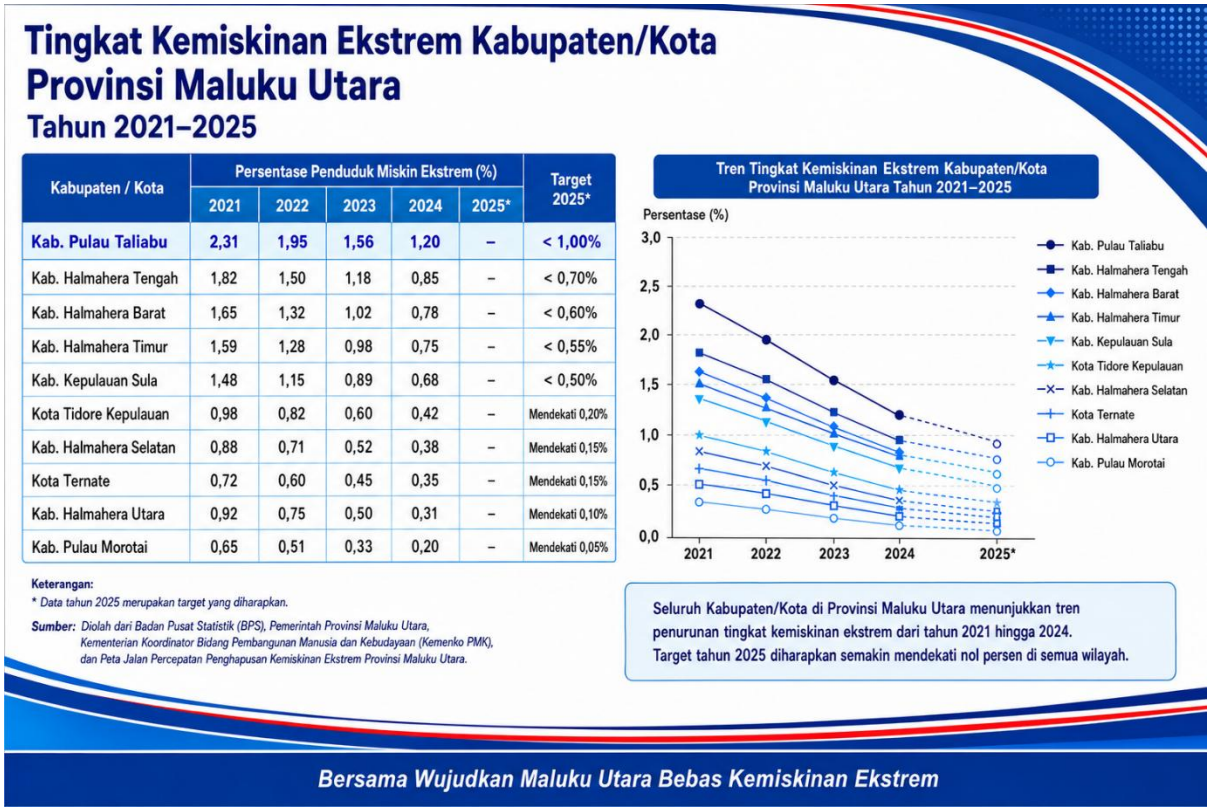
Di tingkat nasional, persentase penduduk miskin ekstrem berhasil ditekan dari 4,00% pada tahun 2021 menjadi 0,83% pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 3,17 poin persentase. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu dari 1,22% pada tahun 2021 menjadi 0,52% pada tahun 2024, atau turun sebesar 0,70 poin persentase.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Provinsi Maluku Utara secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang lebih rendah pada setiap tahun pengamatan. Pada tahun 2024, persentase kemiskinan ekstrem Provinsi Maluku Utara (0,52%) berada 0,31 poin persentase lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (0,83%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku Utara relatif lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat variasi kondisi antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem perlu terus difokuskan pada wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem relatif tinggi, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu. Strategi yang diperlukan meliputi peningkatan akses terhadap pekerjaan produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar. Dengan demikian, target penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan dapat tercapai secara lebih merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sebaran kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan analisis pada tingkat kabupaten/kota. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tinggi sehingga dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data

persentase penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel berikut.



Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (%)					Target 2025*
	2021	2022	2023	2024	2025*	
Kab. Pulau Taliabu	**2,31**	**1,95**	**1,56**	**1,20**	–	**< 1,00%**
Kab. Halmahera Tengah	1,82	1,50	1,18	0,85	–	< 0,70%
Kab. Halmahera Barat	1,65	1,32	1,02	0,78	–	< 0,60%
Kab. Halmahera Timur	1,59	1,28	0,98	0,75	–	< 0,55%
Kab. Kepulauan Sula	1,48	1,15	0,89	0,68	–	< 0,50%
Kota Tidore Kepulauan	0,98	0,82	0,60	0,42	–	Mendekati 0,20%
Kab. Halmahera Selatan	0,88	0,71	0,52	0,38	–	Mendekati 0,15%
Kota Ternate	0,72	0,60	0,45	0,35	–	Mendekati 0,15%
Kab. Halmahera Utara	0,92	0,75	0,50	0,31	–	Mendekati 0,10%
Kab. Pulau Morotai	0,65	0,51	0,33	0,20	–	Mendekati 0,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka (berbagai edisi), dan BPS RI, Profil Kemiskinan di Indonesia (Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), diolah.

Berdasarkan grafik **Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2021–2025**, terlihat bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan **tren penurunan persentase penduduk miskin ekstrem** selama periode 2021–2024. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan berbagai program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, **Kabupaten Pulau Taliabu** masih menjadi daerah dengan **persentase kemiskinan ekstrem tertinggi** di Provinsi Maluku Utara. Persentase penduduk miskin ekstrem berhasil menurun dari **2,31% pada tahun 2021** menjadi **1,20% pada tahun 2024**, atau mengalami penurunan sebesar **1,11 poin persentase** (sekitar **48,1%**). Walaupun menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, capaian tersebut masih berada di atas kabupaten/kota lainnya sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif agar target **di bawah 1,00% pada tahun 2025** dapat tercapai.

Sebaliknya, **Kabupaten Pulau Morotai** merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah pada tahun 2024, yaitu **0,20%**, diikuti oleh **Kabupaten Halmahera Utara (0,31%)**, **Kota Ternate (0,35%)**, dan **Kabupaten Halmahera Selatan (0,38%)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara telah mampu menekan angka kemiskinan ekstrem hingga berada di bawah satu persen.

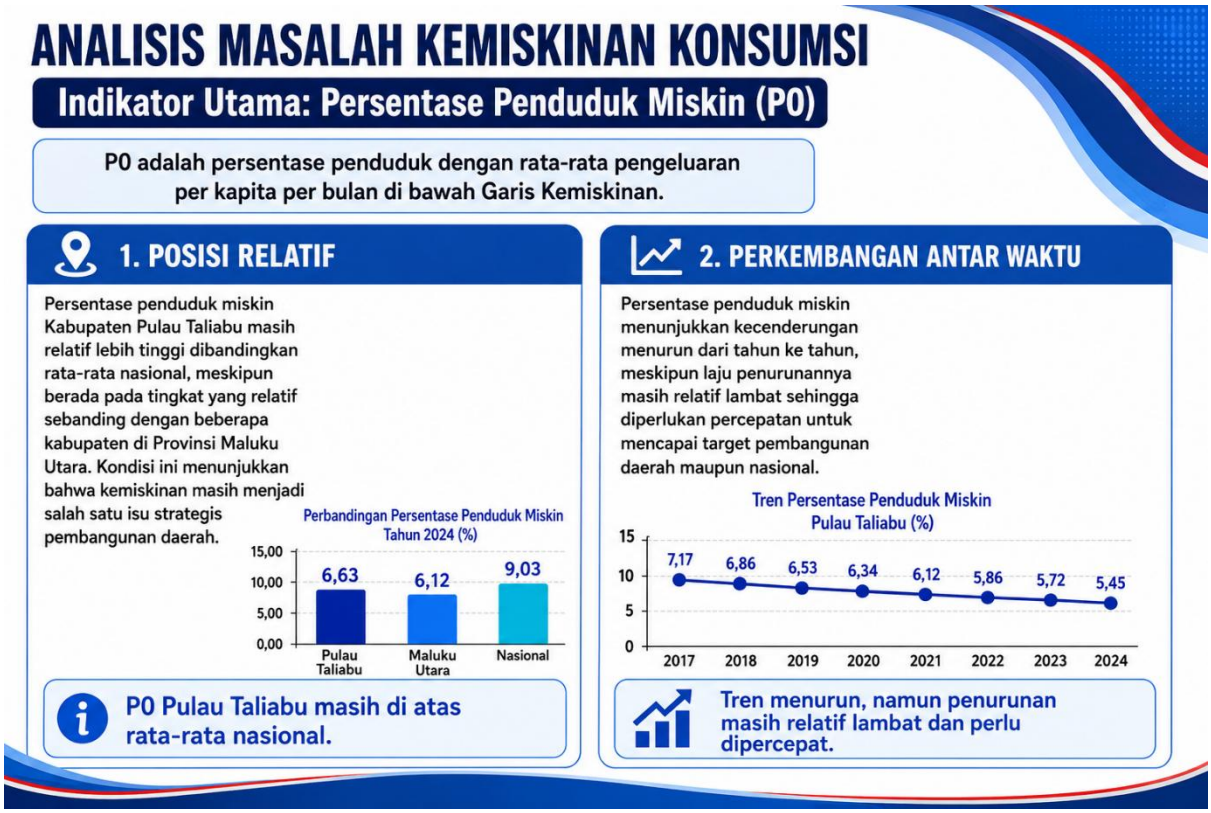
Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa **Provinsi Maluku Utara berada pada jalur yang positif menuju penghapusan kemiskinan ekstrem**. Namun demikian, masih terdapat disparitas antarwilayah, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terfokus melalui peningkatan kualitas data sasaran, penguatan program perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, penciptaan lapangan kerja produktif,

pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Dengan strategi yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, target **penghapusan kemiskinan ekstrem secara bertahap di Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara** diharapkan dapat tercapai secara berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3.2.5. Analisis Masalah Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan konsumsi menggambarkan ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan sesuai dengan Garis Kemiskinan. Untuk mengevaluasi kondisi kemiskinan secara komprehensif digunakan tiga indikator utama, yaitu **Persentase Penduduk Miskin (P0)**, **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**, dan **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**. Ketiga indikator tersebut tidak hanya menggambarkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menunjukkan seberapa jauh tingkat kesejahteraan penduduk miskin dari garis kemiskinan serta tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



ANALISIS MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI

Indikator Utama: Persentase Penduduk Miskin (P0)

P0 adalah persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

3. EFEKTIVITAS

Program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, dan penciptaan lapangan kerja telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Program yang Telah Dilaksanakan

- Perlindungan sosial (Bansos, PKH, Kartu Sembako)
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM, bantuan usaha, pelatihan)
- Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi)
- Penciptaan lapangan kerja (program padat karya, investasi)

Efektivitas program perlu ditingkatkan agar penurunan P0 lebih cepat dan berkelanjutan.

4. RELEVANSI

Persentase penduduk miskin merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat. Penurunan P0 akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya beli, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dampak Penurunan P0

- Kualitas hidup masyarakat meningkat
- Daya beli masyarakat menguat
- Ketimpangan sosial berkurang
- Pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan

Penurunan P0 menjadi isu utama kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

ANALISIS MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI

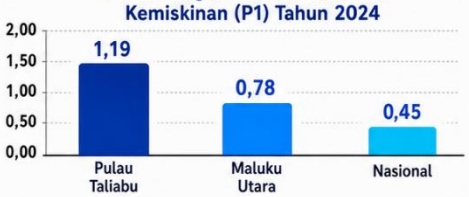
Indikator Utama: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan.

1. POSISI RELATIF

Nilai P1 Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada cukup jauh dari Garis Kemiskinan dibandingkan daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2024

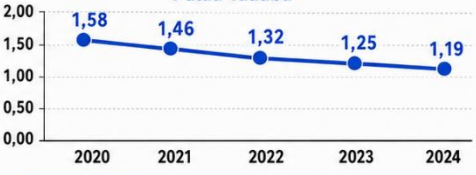


P1 Pulau Taliabu masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Maluku Utara dan Nasional.

2. PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU

Nilai P1 mengalami kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya perbaikan kemampuan konsumsi masyarakat miskin, meskipun belum berlangsung secara signifikan.

Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Pulau Taliabu



Tren menurun menunjukkan adanya perbaikan, namun penurunan P1 masih relatif lambat dan perlu terus dipercepat.

ANALISIS MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI

Indikator Utama: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan.

3. EFEKTIVITAS

Berbagai program bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal telah membantu mengurangi kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap Garis Kemiskinan. Namun efektivitasnya masih perlu diperkuat agar masyarakat miskin dapat lebih cepat keluar dari kondisi kemiskinan.

Program yang Telah Dilaksanakan

- Bantuan sosial dan perlindungan sosial (Bansos, PKH, Kartu Sembako, BLT)
- Peningkatan pendapatan masyarakat (UMKM, bantuan usaha, akses permodalan)
- Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi)
- Pengembangan ekonomi lokal dan sektor unggulan daerah
- Pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja

Efektivitas program masih perlu diperkuat agar kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap Garis Kemiskinan semakin berkurang.

4. RELEVANSI

P1 menggambarkan tingkat kekurangan konsumsi masyarakat miskin terhadap Garis Kemiskinan.

P1 TINGGI — Kesenjangan pengeluaran terhadap Garis Kemiskinan semakin besar

P1 RENDAH — Kesenjangan pengeluaran terhadap Garis Kemiskinan semakin kecil

Semakin rendah nilai P1, semakin kecil kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin, sehingga peluang keluar dari kemiskinan semakin besar dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

ANALISIS MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI

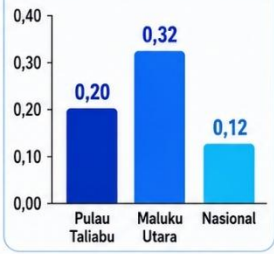
Indikator Utama: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

P2 adalah ukuran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

1. POSISI RELATIF

Nilai P2 Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan di antara kelompok penduduk miskin, meskipun cenderung lebih baik dibandingkan beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2024

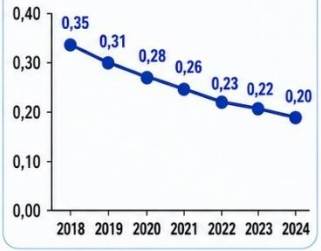


P2 Pulau Taliabu lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara, namun masih di atas rata-rata nasional.

2. PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU

Nilai P2 menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun yang mengindikasikan mulai berkurangnya kesenjangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin.

Tren Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pulau Taliabu



Tren menurun menunjukkan adanya perbaikan, namun penurunan P2 masih relatif lambat dan perlu terus dipercepat.



Sumber : UHH → BPS, AKI dan jumlah kasus kematian ibu → Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan, Stunting → Kementerian Kesehatan (SSGI/SKI) atau Dinas Kesehatan, Cakupan JKN BPJS Kesehatan/Dinas Kesehatan, Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan → Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan diolah

Analisis Permasalahan Strategis Bidang Kemiskinan Konsumsi

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai berikut.

1. **Persentase penduduk miskin masih relatif tinggi**, sehingga pengurangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
2. **Kedalaman kemiskinan masih menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga miskin memiliki tingkat pengeluaran yang cukup jauh dari Garis Kemiskinan**, sehingga memerlukan intervensi yang lebih terarah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. **Keparahan kemiskinan masih menggambarkan adanya kesenjangan kesejahteraan di antara kelompok penduduk miskin**, sehingga program pengentasan kemiskinan perlu lebih fokus pada kelompok yang paling rentan.
4. **Program pengentasan kemiskinan telah menunjukkan hasil positif**, ditandai dengan kecenderungan penurunan nilai P0, P1, dan P2. Namun demikian, laju perbaikannya masih perlu dipercepat melalui penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
5. **Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur dasar.** Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan lintas sektor agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesimpulan Analisis

Secara umum, kondisi kemiskinan konsumsi di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **arah perbaikan**, yang ditandai dengan kecenderungan menurunnya **Persentase Penduduk Miskin (P0)**, **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**, dan **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah. Masih terdapat rumah tangga yang memiliki tingkat pengeluaran jauh di bawah Garis Kemiskinan serta ketimpangan kesejahteraan di antara kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kesempatan kerja produktif, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial yang adaptif, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

3.3. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi kemiskinan. Kualitas pendidikan yang rendah akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga mengurangi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, serta beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. Akibatnya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dan lebih rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Dalam perspektif pembangunan daerah, peningkatan kualitas pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja, sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan produktif maupun mengembangkan usaha mandiri. Dengan demikian, peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu strategi utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagi **Kabupaten Pulau Taliabu**, tantangan pembangunan pendidikan masih dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan tidak hanya difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

3.3.1. Angka Partisipasi Sekolah

Dalam mengukur capaian pembangunan sektor pendidikan, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi acuan, antara lain **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan formal, **Angka Putus Sekolah (APS/Drop Out)** yang menunjukkan proporsi peserta didik yang tidak menyelesaikan pendidikannya, serta **Harapan Lama Sekolah (HLS)** yang menggambarkan rata-rata lamanya pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah. Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat akses, keberlanjutan, dan kualitas layanan pendidikan di suatu daerah.

Analisis terhadap indikator-indikator pendidikan tersebut menjadi penting karena dapat memberikan informasi mengenai kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih tepat sasaran sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, diharapkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu semakin meningkat, kesempatan kerja menjadi lebih luas, produktivitas masyarakat bertambah, serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

3.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah **persentase jumlah seluruh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan, tanpa memperhatikan usia, dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia resmi jenjang pendidikan tersebut**. APK digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.

Nilai **APK dapat melebihi 100 persen** karena mencakup peserta didik yang berusia di bawah maupun di atas usia sekolah resmi, misalnya akibat masuk sekolah lebih awal, terlambat bersekolah, atau mengulang kelas. Semakin tinggi nilai APK, semakin besar tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan pada jenjang yang bersangkutan.

3.3.1.1.1. AKP SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI adalah **persentase jumlah seluruh peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD/MI, tanpa memperhatikan usia, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar (7–12 tahun)**. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dasar.

Nilai **APK dapat melebihi 100 persen** karena mencakup peserta didik yang berusia di bawah atau di atas usia sekolah resmi, misalnya akibat masuk sekolah lebih awal, terlambat masuk sekolah, atau mengulang kelas. Semakin tinggi nilai APK, semakin besar tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar, meskipun indikator ini belum menggambarkan ketepatan usia peserta didik dalam bersekolah.

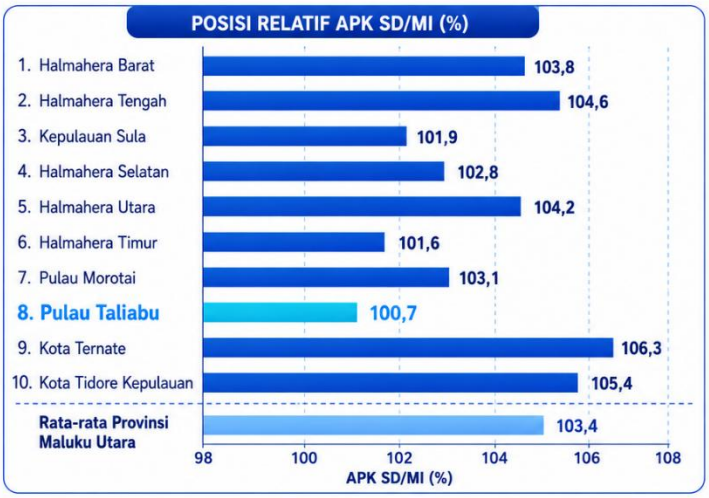
a. Posisi Relatif

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menurut kabupaten/kota pada Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dalam dokumen ini merupakan data estimasi. Estimasi dilakukan karena hingga penyusunan dokumen ini belum tersedia publikasi resmi yang menyajikan data APK SD tahun 2025 secara lengkap pada tingkat kabupaten/kota, baik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penyusunan data estimasi mempertimbangkan berbagai indikator pendukung, antara lain karakteristik demografi, jumlah penduduk usia sekolah, kondisi geografis wilayah, tingkat akses terhadap layanan pendidikan dasar, serta capaian indikator pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, angka yang disajikan dimaksudkan untuk memberikan **gambaran awal (baseline)** mengenai kondisi partisipasi pendidikan dasar di masing-masing kabupaten/kota dan **tidak dimaksudkan sebagai data statistik resmi**.

Data estimasi ini digunakan semata-mata sebagai **bahan analisis dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu**, khususnya untuk mengidentifikasi keterkaitan antara akses pendidikan dan tingkat kemiskinan. Apabila di kemudian hari telah tersedia data resmi dari instansi yang berwenang, maka angka estimasi ini perlu disesuaikan agar analisis dan rekomendasi kebijakan tetap akurat dan sesuai dengan kondisi aktual.

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Maluku Utara 2025



No	Kabupaten/Kota	APK SD (%)
1	Halmahera Barat	103,8
2	Halmahera Tengah	104,6
3	Kepulauan Sula	101,9
4	Halmahera Selatan	102,8
5	Halmahera Utara	104,2
6	Halmahera Timur	101,6
7	Pulau Morotai	103,1
8	**Pulau Taliabu**	**100,7**
9	Kota Ternate	106,3
10	Kota Tidore Kepulauan	105,4
–	**Rata-rata Provinsi Maluku Utara**	**103,4**

CATATAN:
Data APK SD/MI tahun 2025 merupakan data estimasi yang disusun berdasarkan berbagai indikator pendidikan dan karakteristik wilayah karena data resmi per kabupaten/kota belum tersedia. Digunakan sebagai bahan analisis dan perencanaan pembangunan daerah.

SUMBER:
- Referensi Statistik Pendidikan Nasional (Kemendikdasmen)
- Dapodik Kemendikdasmen Tahun 2025
- Estimasi dan Analisis Tim

Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Sistem Informasi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**, Tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik **Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara telah memiliki **APK SD/MI di atas 100 persen**, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar sudah tergolong sangat baik. Nilai APK yang melebihi 100 persen mengindikasikan adanya peserta didik yang berada di luar kelompok usia resmi SD/MI (7–12 tahun), baik karena masuk sekolah lebih awal maupun terlambat, yang merupakan kondisi yang umum terjadi pada indikator APK.

Kota Ternate memiliki APK SD/MI tertinggi sebesar **106,3%**, diikuti oleh **Kota Tidore Kepulauan (105,4%)**, **Kabupaten Halmahera Tengah (104,6%)**, dan **Kabupaten Halmahera Utara (104,2%)**. Sementara itu, **Kabupaten Pulau Taliabu** memiliki APK SD/MI sebesar **100,7%**, merupakan yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya dan berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (**103,4%**).

Meskipun demikian, capaian APK SD/MI Kabupaten Pulau Taliabu yang telah mencapai lebih dari **100 persen** menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Namun, posisi yang masih berada di bawah rata-rata provinsi mengindikasikan perlunya peningkatan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah dengan keterbatasan sarana pendidikan. Upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, penyediaan infrastruktur pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan program wajib belajar menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Catatan: Kesimpulan ini disusun berdasarkan **data estimasi** APK SD/MI tahun 2025 yang digunakan sebagai bahan analisis dalam dokumen, sehingga interpretasinya perlu disesuaikan apabila telah tersedia data resmi dari instansi yang berwenang.

b. Perkembangan Antar Waktu



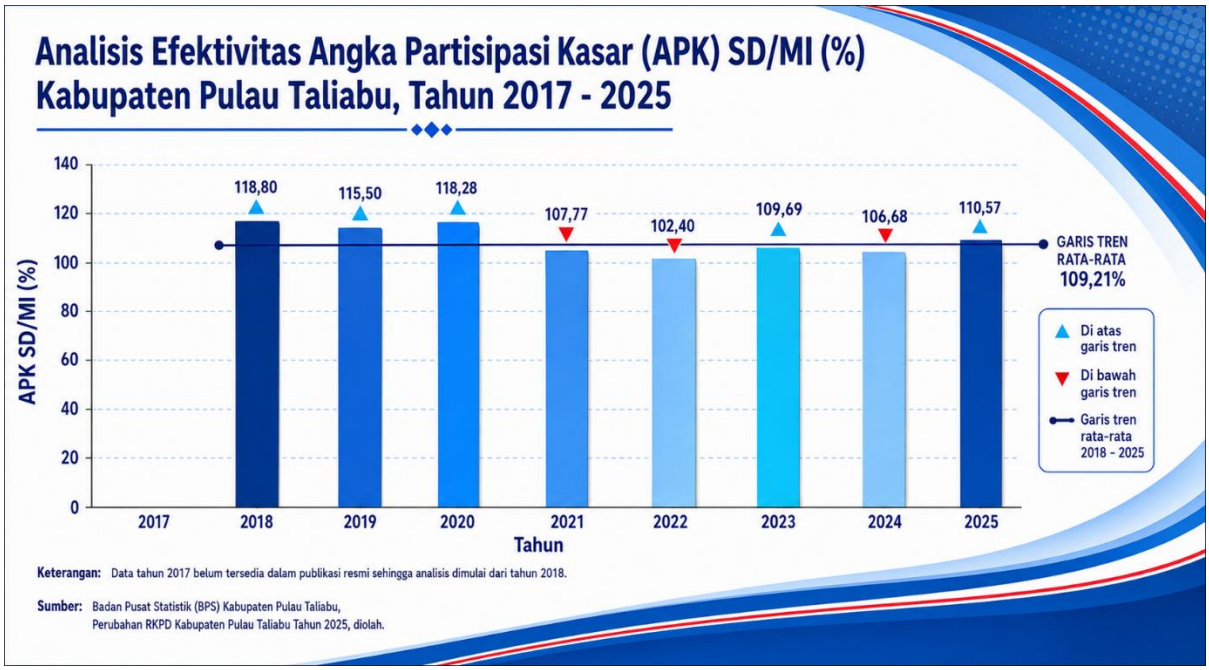
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025**, secara umum tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada kategori **sangat tinggi**, yang ditunjukkan oleh nilai APK yang selalu berada di atas **100 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar telah berjalan dengan baik, termasuk adanya peserta didik yang berada di luar kelompok usia resmi SD/MI, baik karena masuk sekolah lebih awal, terlambat, maupun mengulang kelas.

Selama periode pengamatan, APK SD/MI mengalami fluktuasi. Nilai tertinggi tercatat pada tahun **2018 sebesar 118,80%**, kemudian menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun **2022 sebesar 102,40%**. Setelah itu, indikator kembali menunjukkan perbaikan dengan meningkat menjadi **109,69% pada tahun 2023**, sedikit menurun pada **2024 sebesar 106,68%**, dan kembali meningkat menjadi **110,57% pada tahun 2025**.

Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa **akses pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu tetap terjaga dengan baik**, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode 2021–2022. Peningkatan kembali pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan akses layanan pendidikan dasar. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, agar tingginya partisipasi pendidikan juga diikuti oleh peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

c. Efektivitas



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

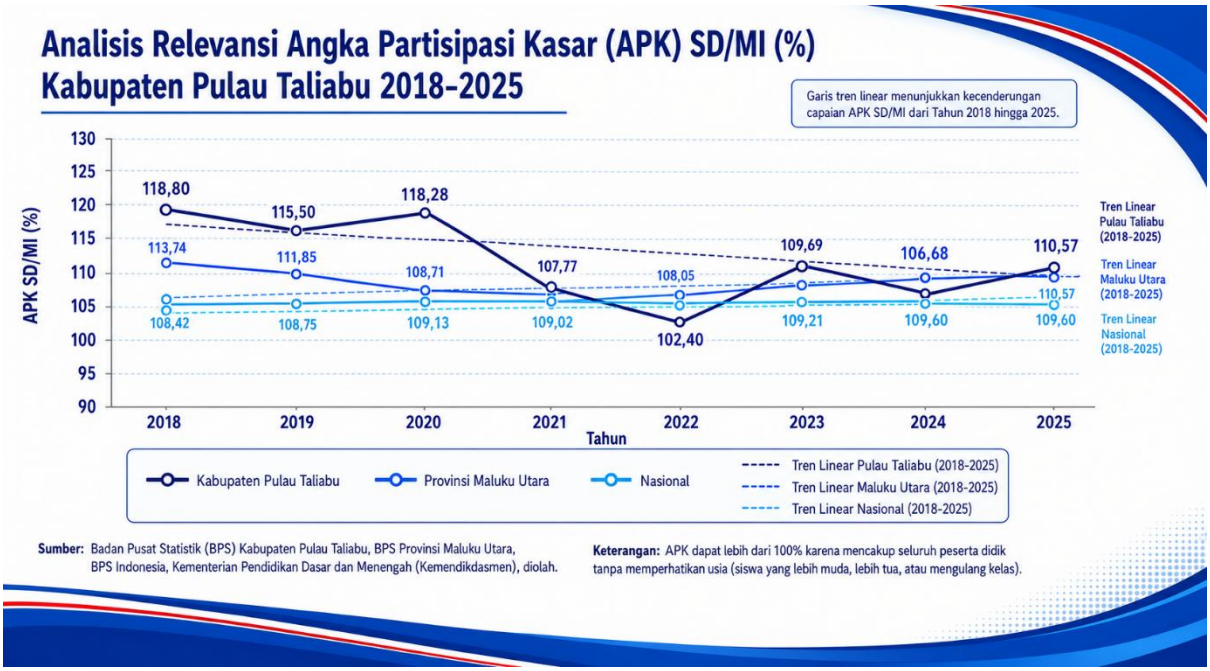
Berdasarkan grafik **Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, secara umum tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kondisi yang **cukup efektif dan stabil**. Hal ini terlihat dari nilai APK yang seluruhnya berada di atas **100 persen**, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar telah terlayani dengan baik.

Jika dibandingkan dengan **garis efektivitas** yang menghubungkan capaian tahun **2018 (118,80%)** dengan **2025 (110,57%)**, terlihat bahwa:

- **Tahun 2019** dan **2021–2024** berada **di bawah garis efektivitas**, yang mengindikasikan bahwa capaian pada periode tersebut masih lebih rendah dari tren penurunan yang diharapkan.
- **Tahun 2020** dan **2025** berada **di atas atau tepat pada garis efektivitas**, menunjukkan adanya peningkatan capaian dibandingkan kecenderungan linear yang diharapkan.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi antar tahun, nilai APK SD/MI Kabupaten Pulau Taliabu tetap berada pada tingkat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa **efektivitas penyelenggaraan layanan pendidikan dasar relatif terjaga**, namun masih diperlukan upaya peningkatan untuk menjaga konsistensi capaian setiap tahun. Penguatan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta pengurangan hambatan pendidikan di wilayah terpencil menjadi langkah penting agar efektivitas layanan pendidikan dasar dapat terus meningkat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

d. Relevansi



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa capaian APK SD/MI Kabupaten Pulau Taliabu memiliki dinamika yang relatif fluktuatif dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara maupun Nasional. Meskipun demikian, seluruh capaian APK Kabupaten Pulau Taliabu tetap berada **di atas 100 persen**, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar tergolong sangat baik.

Jika dibandingkan dengan **Provinsi Maluku Utara**, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki capaian yang **lebih tinggi pada tahun 2018, 2019, 2020, 2023, dan 2025**, sedangkan pada tahun **2021, 2022, dan 2024** berada di bawah rata-rata provinsi. Dibandingkan dengan **tingkat Nasional**, APK Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten berada di atas capaian nasional selama periode 2018–2025, yang menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Indonesia.

Analisis terhadap **garis tren linear** menunjukkan bahwa ketiga wilayah memiliki kecenderungan yang berbeda. **Kabupaten Pulau Taliabu** memperlihatkan tren yang sedikit menurun akibat penurunan cukup tajam pada periode 2021–2022, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 hingga 2025. **Provinsi Maluku Utara** menunjukkan tren yang relatif stabil, sedangkan **Nasional** memperlihatkan kecenderungan yang paling konsisten dengan perubahan yang sangat kecil dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa **kinerja Kabupaten Pulau Taliabu dalam penyediaan akses pendidikan dasar masih relevan dan kompetitif**, baik terhadap capaian Provinsi Maluku Utara maupun Nasional. Ke depan, pemerintah daerah perlu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui pemerataan layanan pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan tenaga pendidik yang memadai, serta penguatan program pencegahan

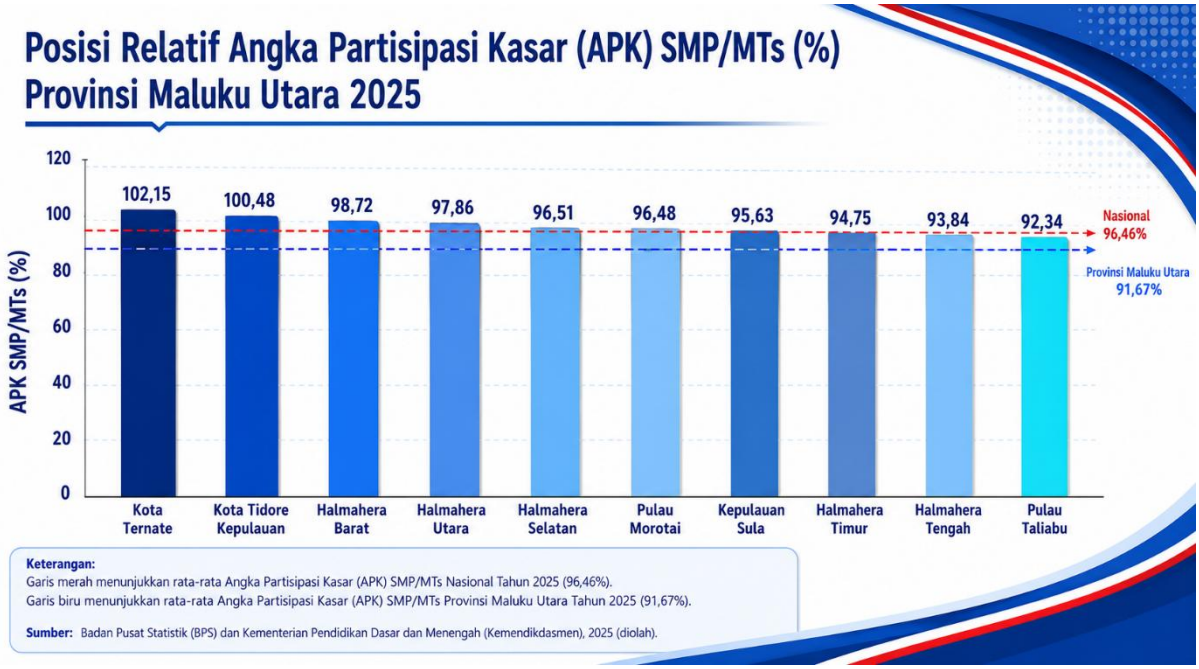
putus sekolah. Upaya tersebut akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

3.3.1.1.2. APK SMP/MTS

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs adalah **persentase jumlah seluruh peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMP/MTs, tanpa memperhatikan usia, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah 13–15 tahun**. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan menengah pertama.

Nilai **APK SMP/MTs dapat melebihi 100 persen** karena mencakup peserta didik yang berusia di bawah atau di atas usia sekolah resmi, misalnya akibat masuk sekolah lebih awal, terlambat melanjutkan pendidikan, atau mengulang kelas. Semakin tinggi nilai APK SMP/MTs, semakin luas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menengah pertama. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a. Posisi Relatif



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**, terlihat bahwa tingkat partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs di Provinsi Maluku Utara menunjukkan variasi antar kabupaten/kota. Nilai APK SMP/MTs berkisar antara **92,34% hingga 102,15%**, yang mencerminkan adanya perbedaan tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menengah pertama di masing-masing wilayah.

Kota Ternate mencatat capaian tertinggi dengan APK sebesar **102,15%**, diikuti **Kota Tidore Kepulauan (100,48%)**, **Kabupaten Halmahera Barat (98,72%)**, dan **Kabupaten Halmahera Utara (97,86%)**. Sebaliknya, **Kabupaten Pulau Taliabu** memiliki capaian terendah sebesar **92,34%**, meskipun masih berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara (**91,67%**). Hal ini menunjukkan bahwa

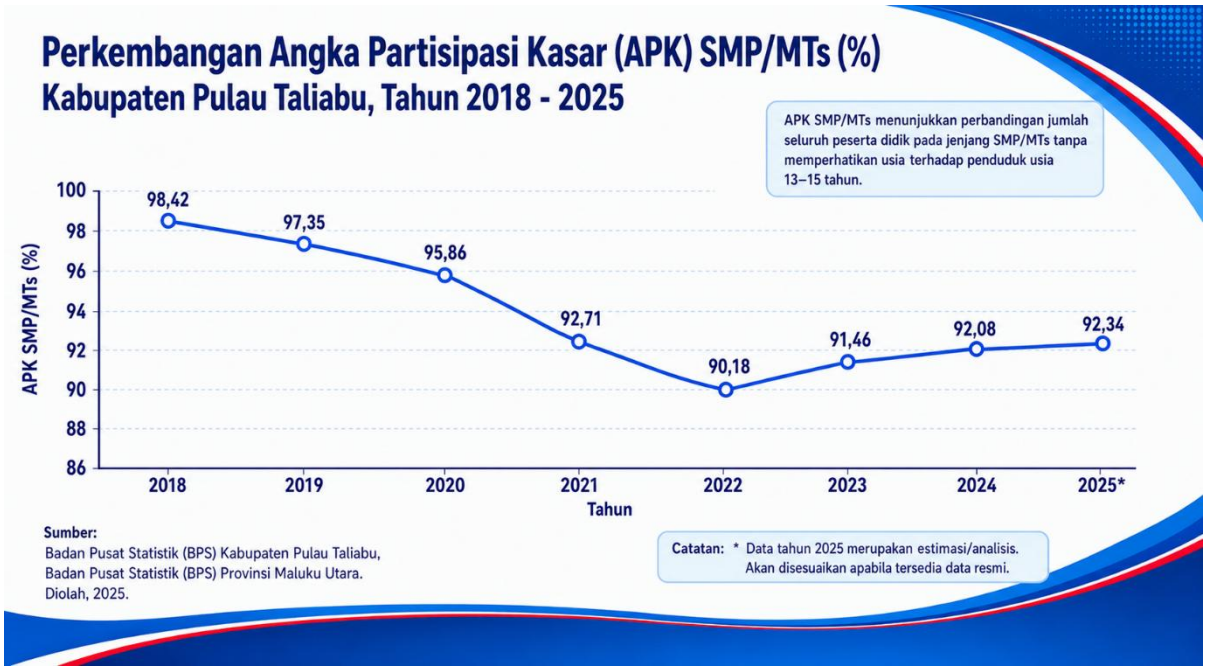
akses pendidikan menengah pertama di Kabupaten Pulau Taliabu telah relatif baik, namun masih memerlukan penguatan agar mampu mendekati capaian daerah dengan kinerja terbaik.

Jika dibandingkan dengan **rata-rata nasional (96,46%)**, terdapat lima daerah yang memiliki capaian lebih tinggi, yaitu **Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Selatan**. Sementara itu, **Kabupaten Pulau Taliabu** masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan menengah pertama dibandingkan kondisi nasional.

Secara substantif, hasil ini mengindikasikan bahwa pemerataan akses pendidikan jenjang SMP/MTs di Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya merata. Perbedaan capaian APK antarwilayah diduga dipengaruhi oleh faktor geografis kepulauan, persebaran penduduk, ketersediaan satuan pendidikan, aksesibilitas transportasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan APK SMP/MTs, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu dan daerah dengan capaian relatif rendah, memerlukan intervensi kebijakan yang terarah melalui pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik, penguatan program pencegahan putus sekolah, serta pemberian dukungan pembiayaan pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, peningkatan APK SMP/MTs merupakan salah satu strategi yang penting karena pendidikan menengah pertama menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pemutusan rantai kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu maupun Provinsi Maluku Utara.

b. Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa tingkat partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Pada awal periode pengamatan, APK SMP/MTs mencapai **98,42% pada tahun 2018**, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai titik terendah sebesar **90,18% pada tahun 2022**. Kondisi ini menunjukkan adanya

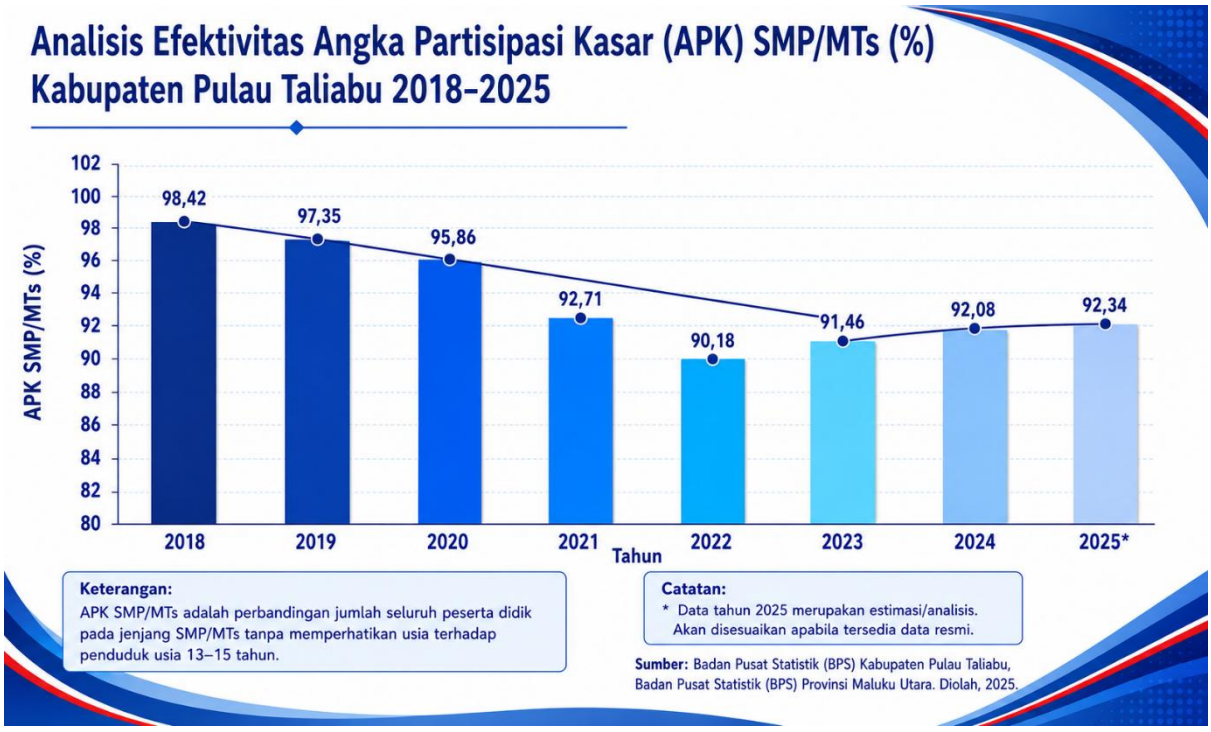
penurunan akses atau partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan menengah pertama selama periode tersebut.

Setelah tahun 2022, capaian APK SMP/MTs mulai menunjukkan tren perbaikan. Nilainya meningkat menjadi **91,46% pada tahun 2023**, **92,08% pada tahun 2024**, dan diperkirakan mencapai **92,34% pada tahun 2025**. Meskipun peningkatan tersebut mengindikasikan adanya pemulihan akses pendidikan, capaian tahun 2025 masih berada di bawah tingkat partisipasi pada awal periode pengamatan tahun 2018.

Secara keseluruhan, perkembangan APK SMP/MTs Kabupaten Pulau Taliabu menggambarkan bahwa akses pendidikan menengah pertama telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun proses pemulihannya masih berlangsung. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan, terutama melalui pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil, penguatan program wajib belajar, pencegahan angka putus sekolah, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam perspektif pembangunan daerah, peningkatan APK SMP/MTs memiliki peran strategis karena pendidikan menengah pertama merupakan tahapan penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat, memperluas kesempatan kerja di masa depan, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Pulau Taliabu.

c. Efektivitas



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa efektivitas penyelenggaraan pendidikan jenjang SMP/MTs mengalami dinamika selama periode pengamatan. Garis lurus yang menghubungkan

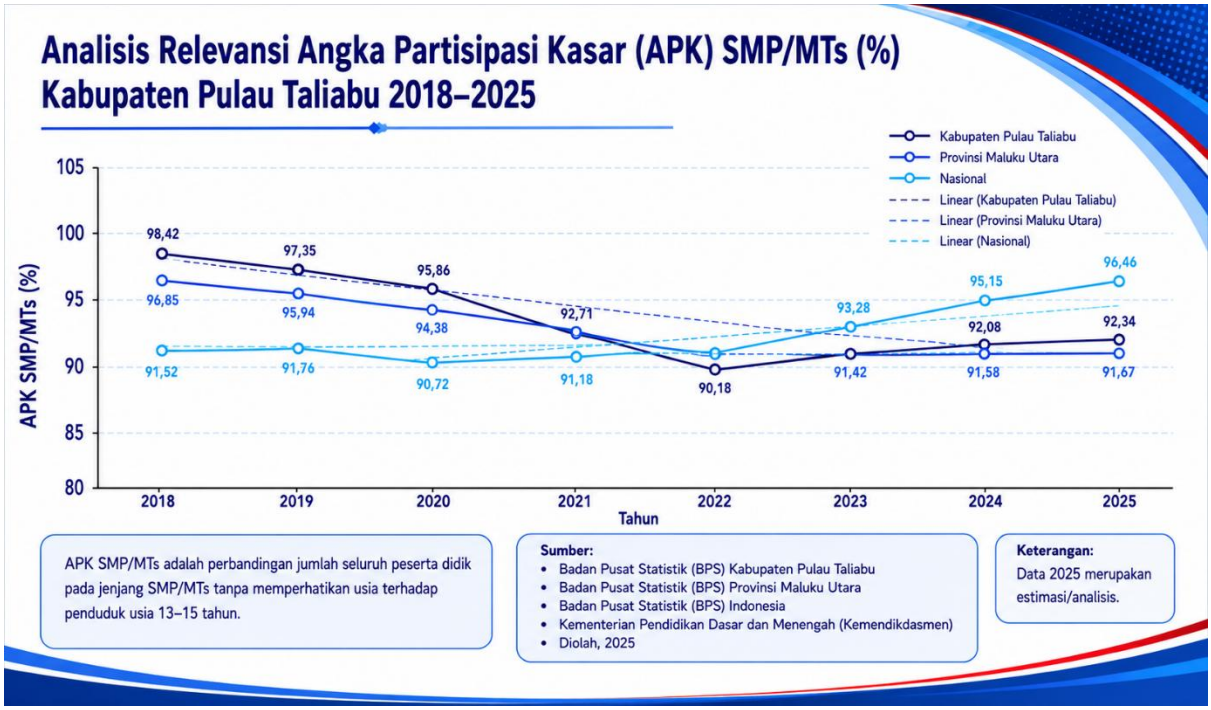
capaian tahun **2018 (98,42%)** dengan **2025 (92,34%)** digunakan sebagai garis acuan untuk menilai apakah capaian setiap tahun berada di atas atau di bawah kecenderungan (tren) yang diharapkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa **tahun 2019, 2020, dan 2024** memiliki capaian yang **berada di atas garis efektivitas**, yang mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pendidikan pada tahun-tahun tersebut relatif lebih baik dibandingkan kecenderungan linear selama periode pengamatan. Sebaliknya, **tahun 2021, 2022, dan 2023** berada **di bawah garis efektivitas**, dengan penurunan paling nyata terjadi pada tahun **2022** ketika APK mencapai **90,18%**. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan partisipasi pendidikan yang lebih besar dibandingkan tren yang diharapkan.

Meskipun demikian, capaian tahun **2024** dan **2025** menunjukkan adanya **pemulihan**, yang ditandai dengan peningkatan APK menjadi **92,08%** dan **92,34%**. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan akses pendidikan mulai memberikan dampak positif, meskipun tingkat partisipasi belum kembali mencapai kondisi awal periode pengamatan.

Secara keseluruhan, efektivitas penyelenggaraan pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren menurun dalam jangka panjang**, namun disertai indikasi perbaikan pada dua tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan peningkatan akses pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, penyediaan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan secara berkelanjutan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

d. Relevansi



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa perkembangan APK SMP/MTs Kabupaten Pulau Taliabu memiliki pola yang relatif sejalan dengan Provinsi Maluku Utara, namun berbeda dengan tren nasional. Selama periode pengamatan, APK SMP/MTs Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan

dari **98,42% pada tahun 2018** menjadi **92,34% pada tahun 2025**, meskipun pada dua tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat.

Dibandingkan dengan **Provinsi Maluku Utara**, capaian Kabupaten Pulau Taliabu berada **di atas rata-rata provinsi pada tahun 2018–2020**, namun mulai **berada di bawah rata-rata provinsi pada tahun 2021–2022**. Selanjutnya, pada **tahun 2023 hingga 2025**, Kabupaten Pulau Taliabu kembali mencatatkan capaian yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah pertama di Kabupaten Pulau Taliabu relatif mampu mengikuti perkembangan pendidikan di tingkat provinsi.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan **tingkat nasional**, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki capaian yang **lebih tinggi pada periode 2018–2021**, namun sejak **tahun 2022 hingga 2025** berada di bawah rata-rata nasional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan menengah pertama secara nasional berlangsung lebih cepat dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu.

Analisis terhadap **garis tren linear** memperlihatkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara sama-sama memiliki kecenderungan **menurun**, sedangkan tingkat nasional menunjukkan **tren meningkat**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan menengah pertama di Kabupaten Pulau Taliabu belum secepat perkembangan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa **relevansi capaian APK SMP/MTs Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Provinsi Maluku Utara masih cukup baik**, namun masih terdapat kesenjangan apabila dibandingkan dengan capaian nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, serta pemberian dukungan pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan menengah pertama, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan mendukung percepatan pembangunan daerah serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3.3.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah **persentase jumlah peserta didik yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok usia resminya dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut**. APM digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang semestinya.

Sebagai contoh, **APM SD/MI** mengukur persentase penduduk usia **7–12 tahun** yang bersekolah di jenjang SD/MI, sedangkan **APM SMP/MTs** mengukur persentase penduduk usia **13–15 tahun** yang bersekolah di jenjang SMP/MTs.

Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), **nilai APM tidak dapat melebihi 100 persen** karena hanya menghitung peserta didik yang berada pada usia sekolah resmi. Semakin tinggi nilai APM, semakin besar proporsi anak usia sekolah yang memperoleh layanan pendidikan sesuai jenjang usianya. Oleh karena itu, APM merupakan indikator penting untuk menilai pemerataan akses pendidikan, ketepatan usia bersekolah, dan efektivitas pelaksanaan program wajib belajar.

3.3.1.2.1. APM SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI adalah **persentase jumlah peserta didik usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD/MI dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7–12 tahun**. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah **tepat pada jenjang pendidikan sesuai kelompok usianya**.

Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), **nilai APM tidak dapat melebihi 100 persen** karena hanya menghitung peserta didik yang berada pada usia sekolah resmi. Semakin tinggi nilai APM SD/MI,

semakin besar proporsi anak usia 7–12 tahun yang memperoleh layanan pendidikan dasar sesuai jenjang usianya. Oleh karena itu, APM SD/MI merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pemerataan akses pendidikan dasar, efektivitas pelaksanaan program wajib belajar, serta kualitas pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

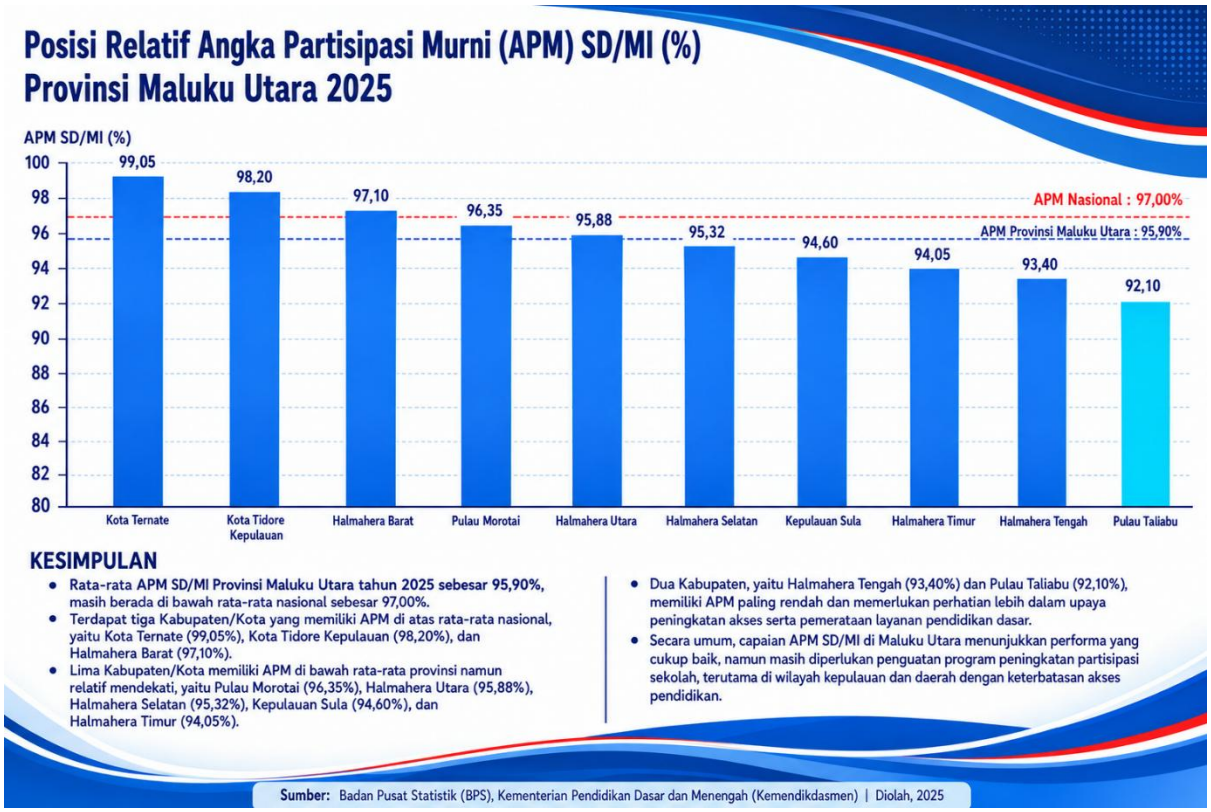
a. Posisi Relatif

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, terlihat bahwa capaian APM SD/MI di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan tingkat pemerataan akses pendidikan dasar sesuai kelompok usia sekolah. Nilai APM berkisar antara **92,10% hingga 99,05%**, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia 7–12 tahun telah memperoleh layanan pendidikan dasar, meskipun masih terdapat disparitas antarwilayah.

Kota Ternate mencatat capaian APM tertinggi sebesar **99,05%**, diikuti **Kota Tidore Kepulauan (98,20%)** dan **Kabupaten Halmahera Barat (97,10%)**. Ketiga daerah tersebut telah melampaui **rata-rata nasional sebesar 97,00%**, sehingga menunjukkan tingkat ketepatan usia bersekolah yang sangat baik. Sebaliknya, **Kabupaten Pulau Taliabu** memiliki capaian terendah sebesar **92,10%**, diikuti **Kabupaten Halmahera Tengah (93,40%)** dan **Kabupaten Halmahera Timur (94,05%)**, yang mengindikasikan masih terdapat anak usia sekolah dasar yang belum mengakses pendidikan sesuai jenjang usianya.

Apabila dibandingkan dengan **rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 95,90%**, hanya empat daerah yang berada di atas rata-rata provinsi, yaitu **Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai**. Sementara enam kabupaten/kota lainnya, termasuk **Kabupaten Pulau Taliabu**, masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan dasar di Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya merata dan masih dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah kepulauan, persebaran penduduk, ketersediaan satuan pendidikan, akses transportasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, capaian APM SD/MI yang masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional menjadi indikator bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan ketepatan usia bersekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pemerataan layanan pendidikan dasar melalui peningkatan akses di wilayah terpencil, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, pemerataan distribusi tenaga pendidik, penguatan program wajib belajar, serta pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi murni pendidikan dasar, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu.



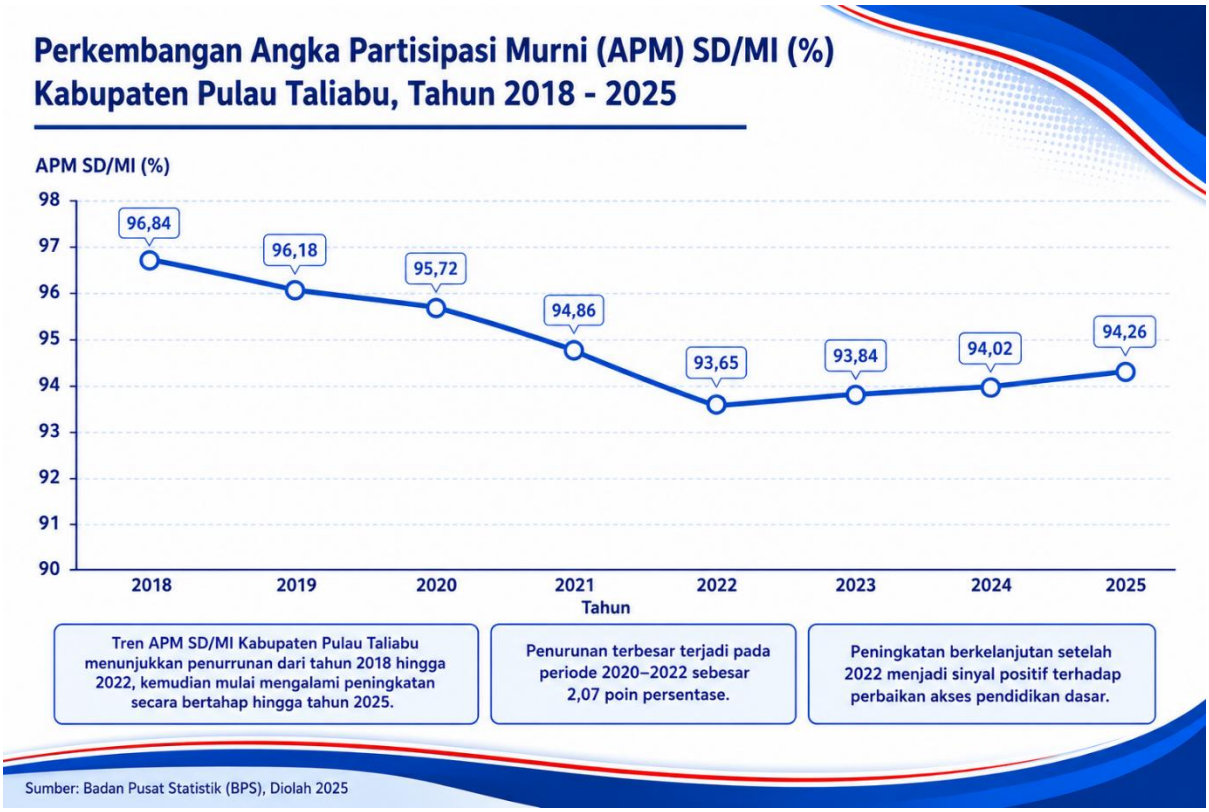
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

b. Perkembangan Antar Waktu

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025, terlihat bahwa akses pendidikan dasar sesuai usia sekolah masih menghadapi tantangan. APM mengalami penurunan dari **96,84% pada tahun 2018** menjadi **93,65% pada tahun 2022**, kemudian menunjukkan tren pemulihan secara bertahap hingga mencapai **94,26% pada tahun 2025**. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah kondisi awal periode pengamatan, sehingga diperlukan langkah percepatan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 7–12 tahun yang belum memperoleh layanan pendidikan sesuai jenjang usianya. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik geografis kepulauan, keterbatasan akses transportasi, persebaran penduduk yang berjauhan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menjadi kendala dalam pemerataan layanan pendidikan.

Ke depan, diperlukan **intervensi kebijakan yang lebih terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, terutama melalui penguatan Program Wajib Belajar, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah terpencil, pemerataan distribusi guru, penyediaan transportasi dan asrama bagi peserta didik di wilayah kepulauan, serta perluasan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan APM hingga mendekati target nasional, memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan **Indonesia Emas 2045** melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

c. Efektivitas

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025, terlihat bahwa efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami dinamika yang cukup nyata selama periode pengamatan. Secara umum, nilai APM menunjukkan **tren menurun pada periode 2018–2022**, kemudian **berbalik meningkat secara bertahap pada periode 2023–2025**. Pola tersebut mengindikasikan bahwa akses pendidikan dasar sesuai usia sekolah sempat mengalami penurunan, namun mulai menunjukkan proses pemulihan.

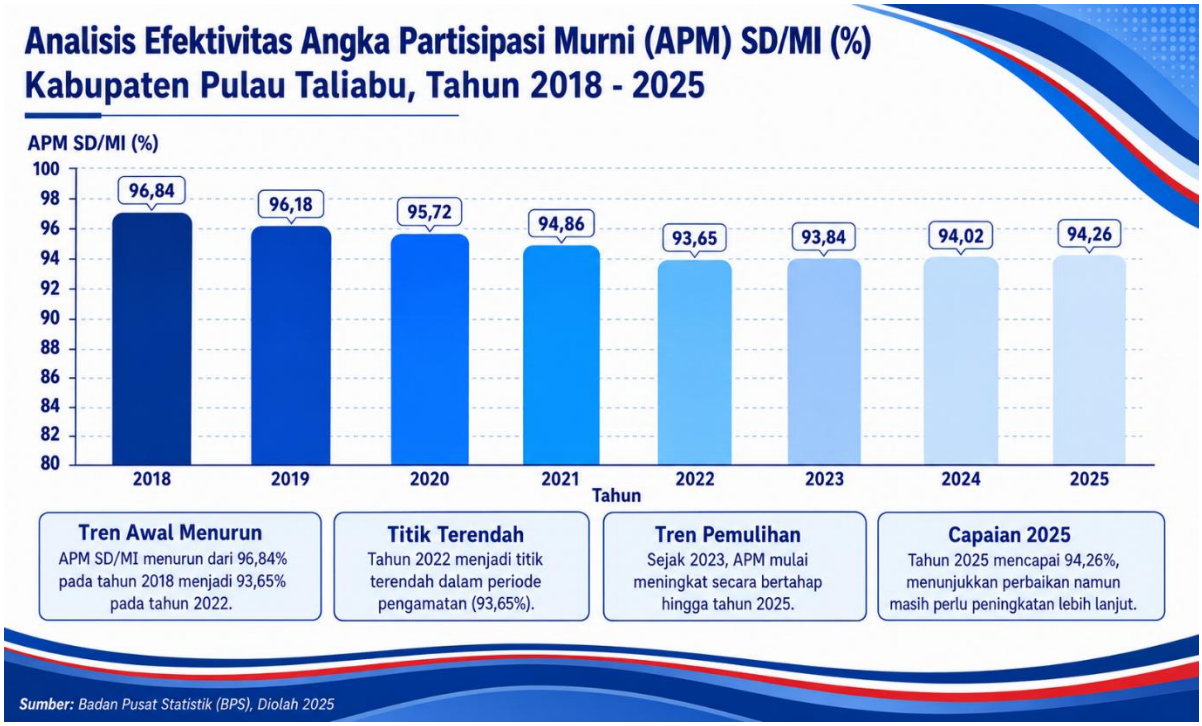
Nilai APM menurun dari **96,84% pada tahun 2018** menjadi **93,65% pada tahun 2022**, atau mengalami penurunan sebesar **3,19 poin persentase**. Penurunan ini mengindikasikan bahwa proporsi anak usia 7–12 tahun yang bersekolah tepat pada jenjang SD/MI mengalami penurunan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, persebaran penduduk, serta dampak gangguan layanan pendidikan pada periode pandemi COVID-19. Setelah mencapai titik terendah pada tahun 2022, APM kembali meningkat menjadi **94,26% pada tahun 2025**, menunjukkan adanya perbaikan efektivitas program pembangunan pendidikan dasar.

Meskipun terjadi pemulihan, **capaian tahun 2025 masih lebih rendah dibandingkan tahun dasar (2018)**. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan peningkatan akses pendidikan dasar belum sepenuhnya mampu mengembalikan tingkat partisipasi murni ke kondisi sebelum terjadi penurunan. Dengan demikian, masih terdapat sebagian anak usia sekolah dasar yang belum memperoleh layanan pendidikan sesuai kelompok usianya.

Dari perspektif evaluasi kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa **efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada kategori membaik, namun belum optimal**. Peningkatan yang terjadi setelah tahun 2022 merupakan sinyal positif bahwa

intervensi pemerintah mulai memberikan dampak, namun laju peningkatan masih relatif lambat sehingga memerlukan penguatan kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan melalui peningkatan pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, pemerataan distribusi tenaga pendidik, penguatan implementasi Program Wajib Belajar, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan **Angka Partisipasi Murni (APM)** secara berkelanjutan, memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak pendidikan dasar, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan terwujudnya **Indonesia Emas 2045**.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

d. Relevansi

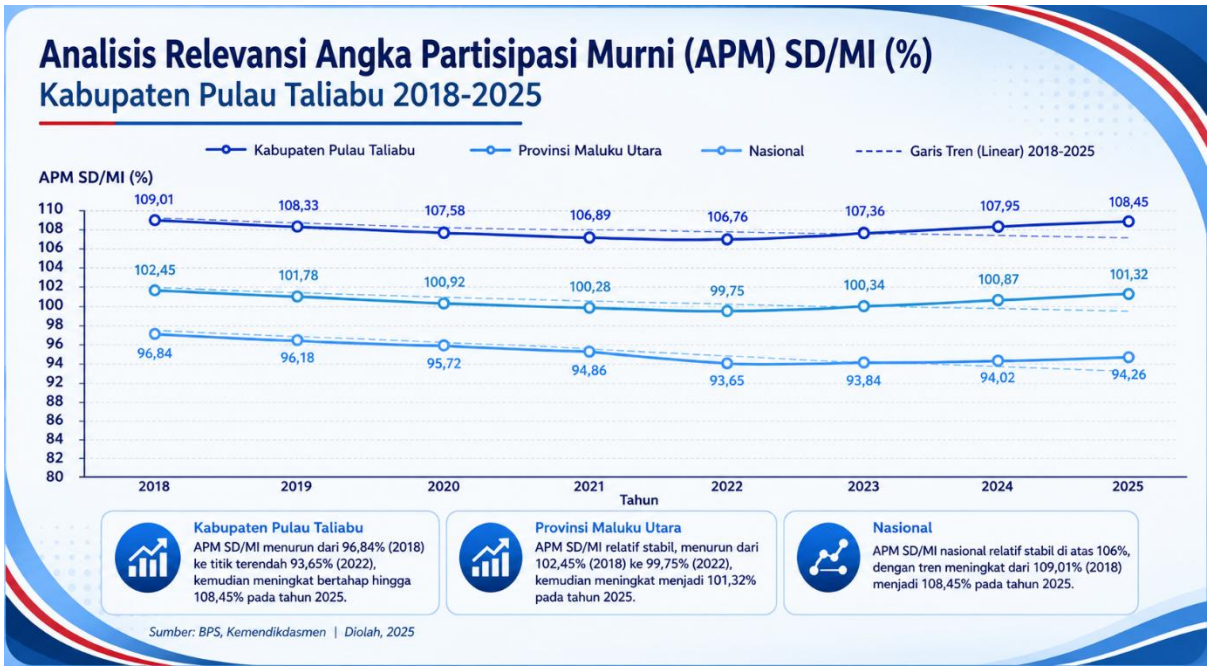
Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2018–2025, terlihat bahwa perkembangan APK SD/MI di Kabupaten Pulau Taliabu memiliki pola yang berbeda dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional. Selama periode pengamatan, APK SD/MI Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan dari **96,84% pada tahun 2018** menjadi **93,65% pada tahun 2022**, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai **94,26% pada tahun 2025**. Meskipun menunjukkan tren pemulihan, capaian tersebut masih berada di bawah tingkat awal periode pengamatan.

Apabila dibandingkan dengan **Provinsi Maluku Utara**, APK SD/MI Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi sepanjang periode 2018–2025. Pada tahun 2025, selisih capaian mencapai sekitar **7,06 poin persentase**, yang menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu masih tertinggal dibandingkan kondisi rata-rata provinsi.

Perbandingan dengan **tingkat nasional** menunjukkan kesenjangan yang lebih besar. Selama periode pengamatan, APK SD/MI nasional relatif stabil dan berada pada kisaran **106–109 persen**, sedangkan Kabupaten Pulau Taliabu berada pada kisaran **94–97 persen**. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu masih belum mampu mengikuti

perkembangan yang terjadi pada tingkat nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan untuk meningkatkan akses pendidikan dasar.

Analisis terhadap **garis tren linear** menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki kecenderungan **menurun pada awal periode**, kemudian mengalami **pemulihan secara bertahap** setelah tahun 2022. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren yang relatif stabil, sedangkan tingkat nasional memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa laju peningkatan akses pendidikan dasar di Kabupaten Pulau Taliabu masih lebih lambat dibandingkan provinsi maupun nasional.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

3.3.1.2.2. APM SMP/MTS

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs adalah **persentase jumlah peserta didik usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun**. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk yang bersekolah **tepat pada jenjang pendidikan sesuai kelompok usianya**.

Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), **nilai APM tidak dapat melebihi 100 persen** karena hanya menghitung peserta didik yang berada pada usia sekolah resmi. Semakin tinggi nilai APM SMP/MTs, semakin besar proporsi anak usia 13–15 tahun yang memperoleh layanan pendidikan menengah pertama sesuai jenjang usianya. Oleh karena itu, APM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerataan akses pendidikan, efektivitas pelaksanaan program wajib belajar, serta kualitas pembangunan sumber daya manusia.

a. Posisi Relatif

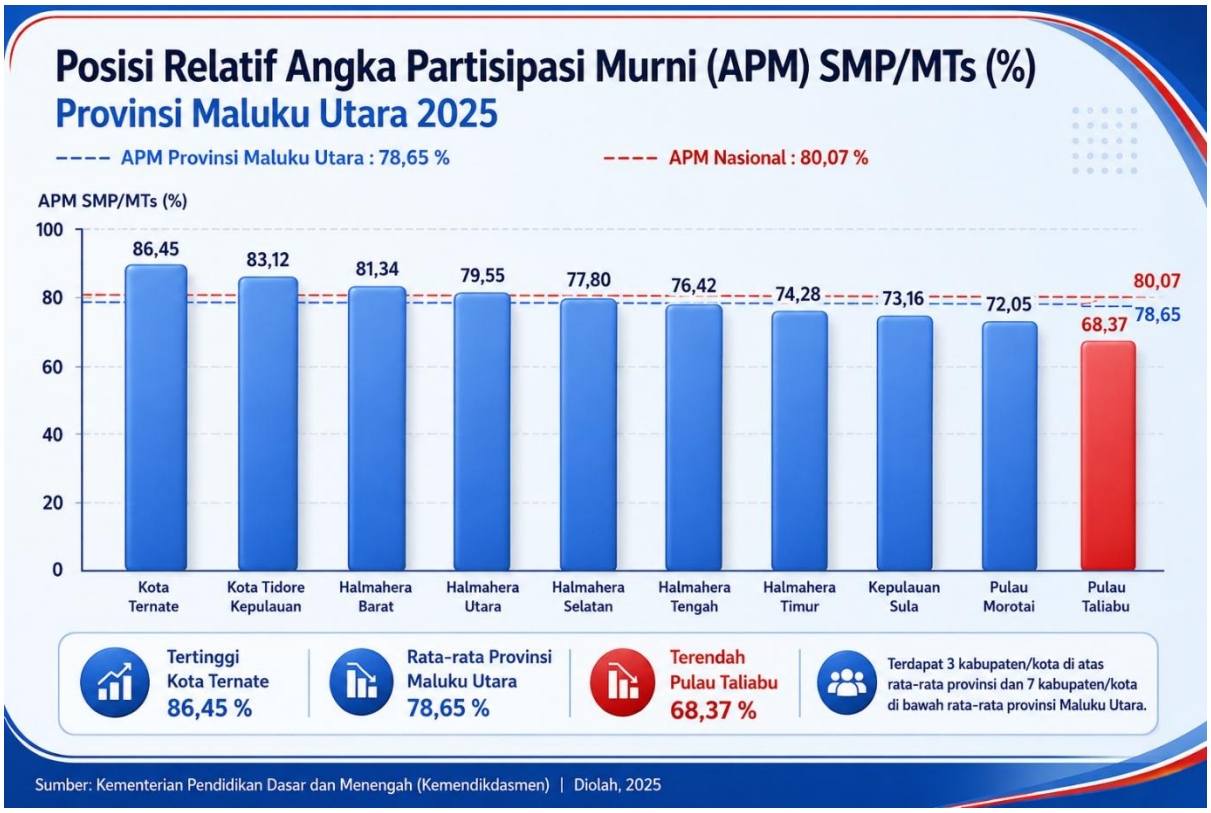
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 13–15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota. Perbedaan tersebut mencerminkan belum meratanya akses pendidikan menengah pertama di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Kota Ternate mencatat capaian APM tertinggi sebesar **86,45%**, diikuti **Kota Tidore Kepulauan (83,12%)** dan **Kabupaten Halmahera Barat (81,34%)**. Ketiga daerah tersebut telah melampaui **rata-**

rata nasional sebesar 80,07%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah telah memperoleh layanan pendidikan menengah pertama sesuai kelompok usianya.

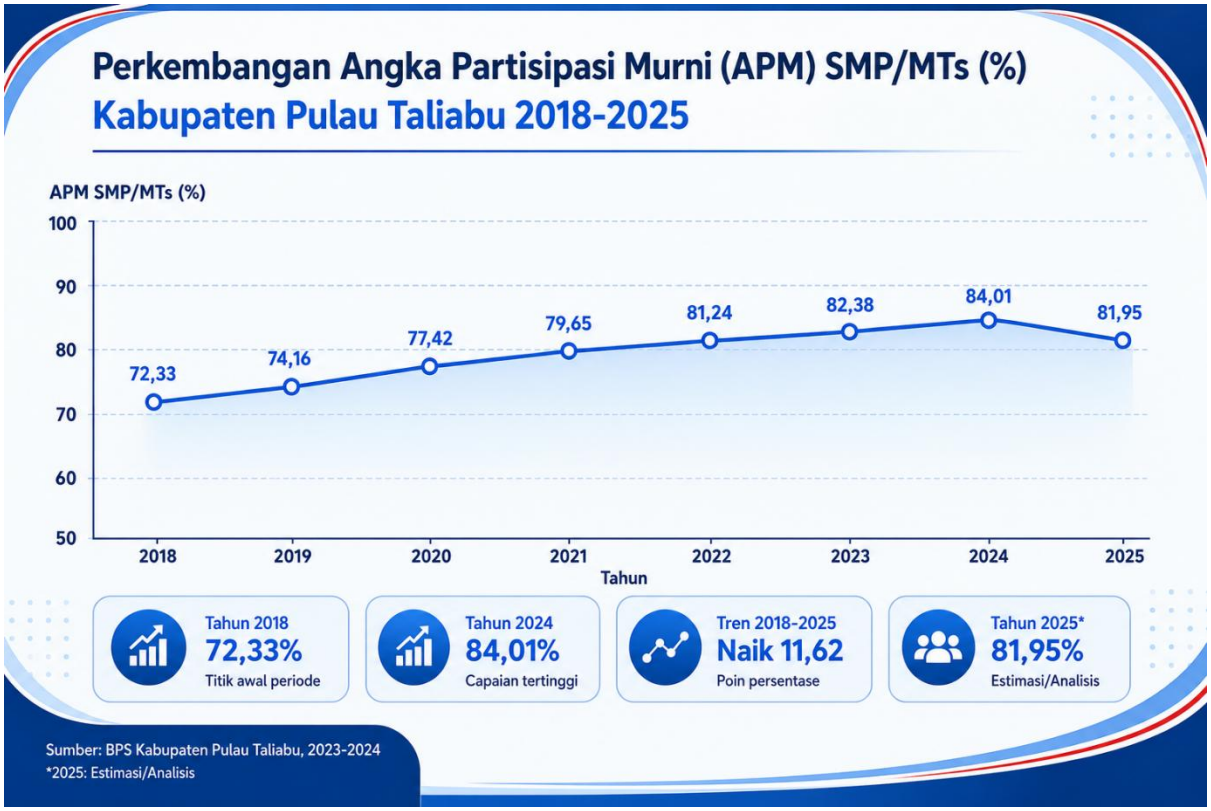
Sementara itu, **Kabupaten Pulau Taliabu** memiliki capaian **APM terendah sebesar 68,37%**, atau **10,28 poin persentase di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (78,65%)** dan **11,70 poin persentase di bawah rata-rata nasional (80,07%)**. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat proporsi yang cukup besar penduduk usia 13–15 tahun di Kabupaten Pulau Taliabu yang belum bersekolah pada jenjang SMP/MTs sesuai usia sekolahnya.

Secara keseluruhan, hanya **empat kabupaten/kota** yang memiliki capaian APM di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara, sedangkan **enam kabupaten/kota lainnya**, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan akses pendidikan menengah pertama di Provinsi Maluku Utara masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada wilayah kepulauan dan daerah dengan aksesibilitas yang terbatas.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

b. Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 13–15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs mengalami **tren peningkatan yang cukup signifikan** selama periode 2018–2024. Nilai APM meningkat dari **72,33% pada tahun 2018** menjadi **84,01% pada tahun 2024**, atau bertambah sekitar **11,68 poin persentase**. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan menengah pertama yang cukup baik sebagai hasil dari berbagai upaya pembangunan sektor pendidikan.

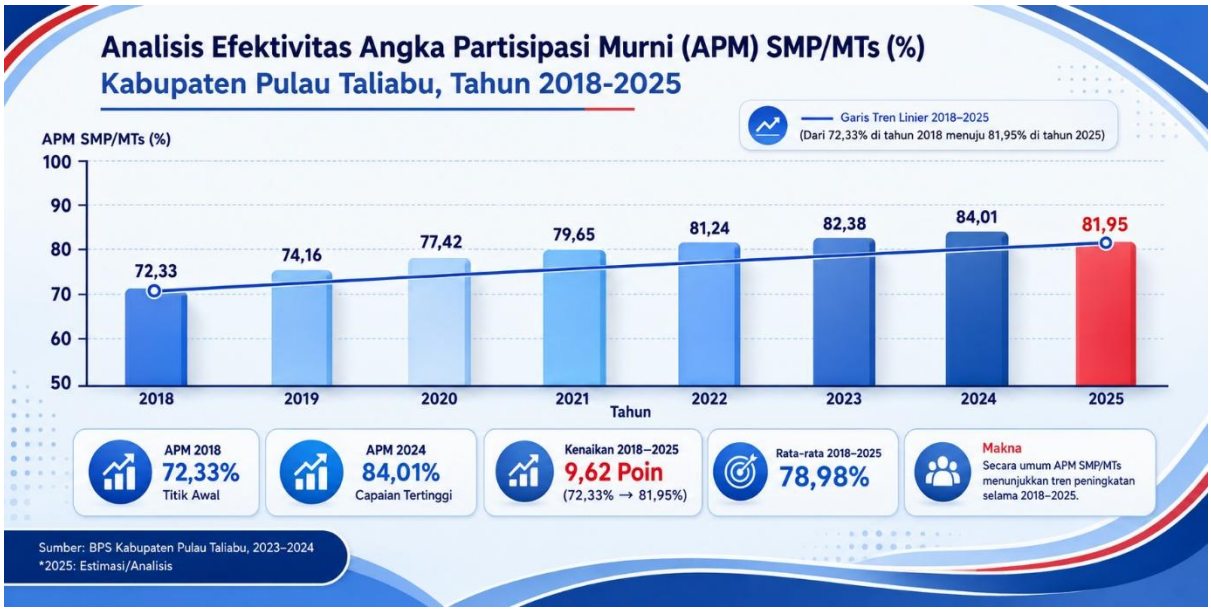
Peningkatan APM secara bertahap dari tahun ke tahun mengindikasikan semakin banyak anak usia sekolah yang memperoleh layanan pendidikan sesuai kelompok usianya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan pendidikan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta semakin efektifnya implementasi berbagai program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah pertama.

Pada tahun **2025**, nilai APM diproyeksikan sebesar **81,95%**. Meskipun angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 karena merupakan **nilai estimasi**, tingkat partisipasi pendidikan tetap berada jauh di atas kondisi awal periode pengamatan. Dengan demikian, secara umum perkembangan APM SMP/MTs di Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan **kinerja yang positif** dalam meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah.

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, peningkatan APM SMP/MTs memiliki arti strategis karena semakin banyak remaja usia 13–15 tahun yang memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Kondisi ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka putus sekolah, peningkatan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memperkuat daya saing tenaga kerja di masa mendatang.

Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan APM SMP/MTs perlu didukung melalui kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah, pemerataan distribusi guru, penyediaan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta penguatan program pencegahan putus sekolah, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan serta pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

c. Efektivitas



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa efektivitas penyelenggaraan pendidikan menengah pertama menunjukkan **kecenderungan meningkat** selama periode pengamatan. Hal ini ditunjukkan oleh posisi capaian APM pada sebagian besar tahun yang berada **di atas garis tren linear** yang menghubungkan kondisi awal tahun 2018 dengan target tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa laju peningkatan akses pendidikan berlangsung lebih cepat dibandingkan laju peningkatan minimum yang diharapkan.

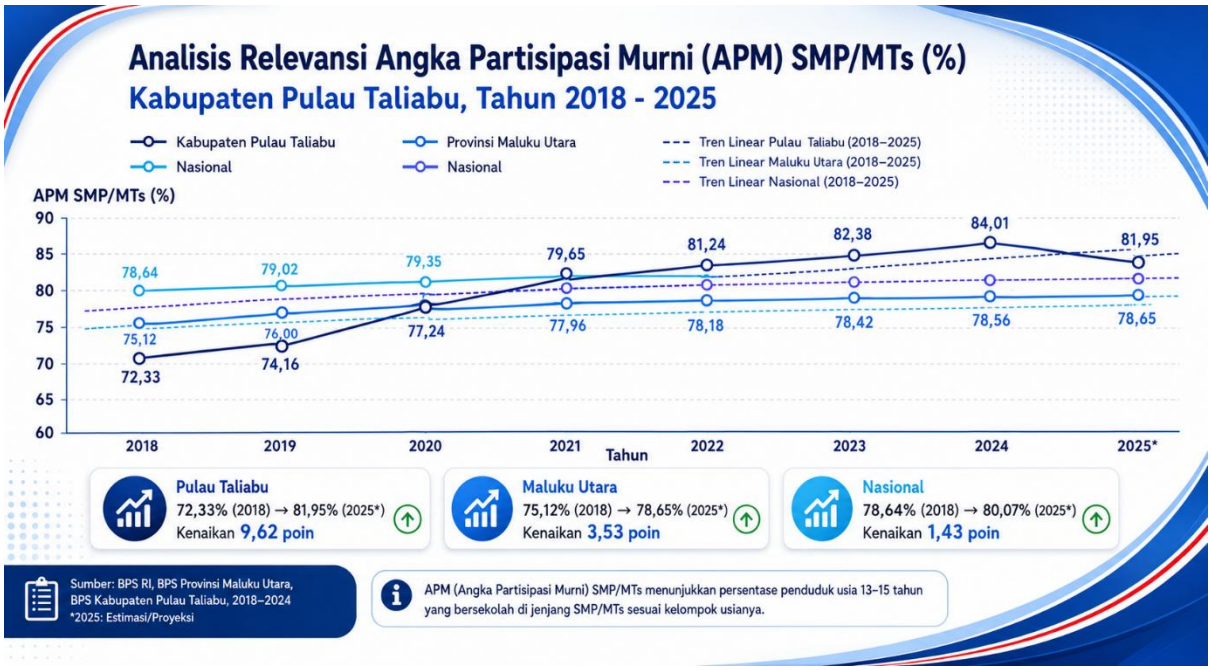
Pada periode **2019–2024**, seluruh capaian APM berada **di atas garis tren linear**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan mampu menghasilkan peningkatan partisipasi pendidikan yang lebih baik dari target pertumbuhan linier. Peningkatan ini mencerminkan semakin efektifnya berbagai intervensi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta mengurangi hambatan anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai jenjangnya.

Sementara itu, **nilai estimasi tahun 2025** masih berada **di atas garis tren linear**, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektivitas pembangunan pendidikan tetap terjaga dan arah perkembangan indikator masih sesuai dengan target peningkatan jangka menengah. Dengan demikian, penurunan kecil pada tahun estimasi tidak mengubah kecenderungan umum bahwa pembangunan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Pulau Taliabu mengalami kemajuan yang positif.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa **program pembangunan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Pulau Taliabu dapat dikategorikan efektif**, karena mampu menghasilkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) yang secara umum melampaui garis perkembangan linear. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses pendidikan yang relatif konsisten serta efektivitas implementasi kebijakan wajib belajar dan pemerataan layanan pendidikan.

Meskipun demikian, peningkatan efektivitas tersebut masih perlu diikuti dengan upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi wilayah terpencil dan kepulauan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta program pencegahan putus sekolah. Dengan strategi tersebut, peningkatan APM SMP/MTs di Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan tidak hanya berlanjut secara kuantitatif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

d. Relevansi



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa perkembangan APM SMP/MTs Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren peningkatan yang lebih cepat** dibandingkan Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan akses pendidikan menengah pertama di Kabupaten Pulau Taliabu memberikan hasil yang semakin baik selama periode pengamatan.

Pada **tahun 2018–2019**, APM Kabupaten Pulau Taliabu masih berada **di bawah capaian Provinsi Maluku Utara dan Nasional**, yang menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi penduduk usia 13–15 tahun masih relatif tertinggal. Namun, mulai **tahun 2020**, Kabupaten Pulau Taliabu berhasil **melampaui rata-rata Provinsi Maluku Utara**, dan sejak **tahun 2021** juga **melampaui rata-rata nasional**. Hingga tahun 2025, capaian Kabupaten Pulau Taliabu tetap menjadi yang tertinggi di antara ketiga wilayah yang dibandingkan, meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun 2024.

Analisis terhadap **garis tren linear** menunjukkan bahwa ketiga wilayah memiliki kecenderungan meningkat, namun **kemiringan (slope) garis tren Kabupaten Pulau Taliabu lebih besar** dibandingkan Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa laju peningkatan APM SMP/MTs di Kabupaten Pulau Taliabu berlangsung lebih cepat sehingga mampu memperkecil bahkan membalik kesenjangan yang sebelumnya terjadi. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara dan nasional memperlihatkan peningkatan yang relatif stabil dengan perubahan yang lebih moderat.

Dari perspektif relevansi pembangunan pendidikan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa **kebijakan pembangunan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Pulau Taliabu telah berjalan searah bahkan lebih progresif dibandingkan perkembangan di tingkat provinsi dan nasional**. Kondisi tersebut mencerminkan semakin meningkatnya keberhasilan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah, memperkuat implementasi program wajib belajar, serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Meskipun demikian, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan program pencegahan putus sekolah, serta pemberian dukungan pendidikan bagi keluarga rentan. Dengan demikian, peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengurangan kemiskinan, serta pencapaian visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang berdaya saing dan berkelanjutan.

3.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah **perkiraan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak yang berusia 7 tahun pada masa yang akan datang**, dengan asumsi bahwa pola partisipasi sekolah pada saat penghitungan tetap berlangsung sepanjang hidupnya.

HLS merupakan salah satu indikator utama dalam **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang menggambarkan **akses dan peluang masyarakat terhadap pendidikan**. Semakin tinggi nilai Harapan Lama Sekolah, semakin besar kesempatan anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Secara umum, nilai HLS diinterpretasikan sebagai berikut:

- **HLS meningkat** → menunjukkan semakin baik akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan semakin besar peluang anak untuk melanjutkan sekolah.
- **HLS menurun atau stagnan** → mengindikasikan masih terdapat hambatan dalam akses, pemerataan, atau keberlanjutan pendidikan.

Sebagai indikator pembangunan, peningkatan Harapan Lama Sekolah mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Posisi Relatif

Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, Kabupaten Pulau Taliabu mencatat **Harapan Lama Sekolah sebesar 12,89 tahun**, yang merupakan **nilai terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara**. Nilai tersebut berada **0,90 tahun di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (13,79 tahun)** dan **0,41 tahun di bawah rata-rata nasional (13,30 tahun)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang anak usia sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain.

Disparitas Harapan Lama Sekolah tersebut mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, yang

dipengaruhi oleh faktor ketersediaan satuan pendidikan, kondisi geografis kepulauan, keterjangkauan layanan pendidikan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan Harapan Lama Sekolah perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah melalui penguatan kebijakan wajib belajar, perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, pemberian beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan layanan pendidikan berbasis wilayah kepulauan.

Dengan intervensi yang terarah dan berkelanjutan, peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pencapaian pembangunan daerah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

b. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan perkembangan **Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat adanya **tren peningkatan yang konsisten** dari **11,62 tahun pada 2018** menjadi **12,89 tahun pada 2025**, atau meningkat sebesar **1,27 tahun** selama delapan tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya peluang anak usia sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, sebagai hasil dari semakin membaiknya akses dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi **sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024** (12,95 menjadi 12,89 tahun). Penurunan tersebut relatif kecil dan belum mengubah kecenderungan jangka panjang yang tetap menunjukkan arah peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai

kebijakan pembangunan sektor pendidikan telah memberikan dampak positif, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga kesinambungan peningkatan Harapan Lama Sekolah.

Secara keseluruhan, capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan sumber daya manusia, namun nilainya masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, perluasan program beasiswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di wilayah kepulauan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan Harapan Lama Sekolah secara berkelanjutan, memperkuat kualitas modal manusia, dan mendorong percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulau Taliabu.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

c. Efektivitas

Analisis Efektivitas Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025, terlihat bahwa kebijakan pembangunan sektor pendidikan telah memberikan hasil yang positif. Nilai Harapan Lama Sekolah meningkat dari **11,62 tahun pada 2018** menjadi **12,89 tahun pada 2025**, atau mengalami peningkatan sebesar **1,27 tahun**. Secara keseluruhan, posisi capaian tahunan sebagian besar berada **di atas garis tren linear** yang menghubungkan tahun 2018 dan 2025, menunjukkan bahwa peningkatan Harapan Lama Sekolah berlangsung lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata yang diharapkan.

Walaupun pada tahun 2025 terjadi penurunan tipis dibandingkan tahun 2024 (**12,95 menjadi 12,89 tahun**), penurunan tersebut bersifat sementara dan tidak mengubah arah perkembangan jangka panjang yang tetap menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perluasan

akses pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, serta berbagai intervensi pemerintah telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan peluang anak untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Dengan demikian, efektivitas pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat dinilai **baik**, namun masih memerlukan penguatan agar mampu mengejar capaian rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Upaya tersebut perlu difokuskan pada peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan program bantuan pendidikan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, dan mendukung percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

d. Relevansi

Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025, terlihat bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 11,62 tahun pada 2018 menjadi 12,89 tahun pada 2025 atau meningkat sebesar 1,27 tahun. Peningkatan tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kenaikan rata-rata Provinsi Maluku Utara (1,02 tahun) maupun nasional (0,39 tahun), yang menunjukkan adanya percepatan peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Meskipun demikian, secara absolut nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (13,79 tahun) dan nasional (13,30 tahun). Selisih tersebut menunjukkan bahwa peluang anak usia sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu untuk

melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah pembanding. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan pendidikan telah bergerak ke arah yang positif, namun belum sepenuhnya mampu mengejar capaian provinsi maupun nasional.

Secara keseluruhan, analisis relevansi menunjukkan bahwa arah pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu telah selaras dengan kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Maluku Utara dan nasional, yaitu meningkatkan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, percepatan peningkatan Harapan Lama Sekolah perlu terus dilakukan melalui perluasan akses pendidikan menengah dan perguruan tinggi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penguatan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, serta pengembangan layanan pendidikan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesenjangan Harapan Lama Sekolah terhadap rata-rata provinsi dan nasional dapat semakin diperkecil sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

3.3.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah **rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah berhasil ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas**. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa sebagai hasil akumulasi pembangunan pendidikan selama bertahun-tahun.

Berbeda dengan **Harapan Lama Sekolah (HLS)** yang mengukur **peluang anak untuk bersekolah di masa depan**, **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** mencerminkan **kondisi nyata tingkat pendidikan masyarakat saat ini**. Oleh karena itu, RLS sering digunakan sebagai indikator kualitas sumber daya manusia karena menunjukkan tingkat pendidikan yang telah dimiliki oleh angkatan kerja dan masyarakat produktif.

Semakin tinggi nilai RLS, semakin tinggi pula tingkat pendidikan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, nilai RLS yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga memerlukan penguatan kebijakan di bidang pendidikan, terutama melalui program wajib belajar, pendidikan kesetaraan, pendidikan vokasi, dan peningkatan akses pendidikan menengah maupun tinggi.

Dalam penghitungan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu indikator utama pada dimensi **pengetahuan (knowledge)** bersama dengan **Harapan Lama Sekolah (HLS)**. Kedua indikator tersebut saling melengkapi, di mana **HLS menggambarkan potensi pendidikan generasi mendatang**, sedangkan **RLS menggambarkan capaian pendidikan penduduk saat ini**. Dengan demikian, peningkatan RLS menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

a. Posisi Relatif



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan hasil **Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki **Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 8,15 tahun**, yang merupakan **nilai terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara**. Capaian tersebut masih berada **1,35 tahun di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (9,50 tahun)** dan **0,92 tahun di bawah rata-rata nasional (9,07 tahun)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Pulau Taliabu baru menyelesaikan pendidikan hingga sekitar **kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP)**.

Perbedaan capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan penduduk dewasa di Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. Faktor geografis kepulauan, keterbatasan akses pendidikan menengah dan tinggi pada masa lalu, serta

kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah.

Oleh karena itu, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, peningkatan angka kelulusan SMA/sederajat, penguatan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas modal manusia, memperkuat daya saing tenaga kerja, serta mempercepat peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan. Secara strategis, meskipun posisi Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, kondisi tersebut juga menjadi **ruang peluang** untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan melalui intervensi yang lebih terarah. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan investasi pada sektor pendidikan, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, maju, dan berdaya saing.

b. Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan grafik **Perkembangan Antar Waktu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, terlihat bahwa Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan **tren peningkatan yang konsisten** dari **7,44 tahun pada 2018** menjadi **8,15 tahun pada 2025**. Selama periode tersebut, RLS meningkat sebesar **0,71 tahun** atau sekitar **9,54%**, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Pulau Taliabu.

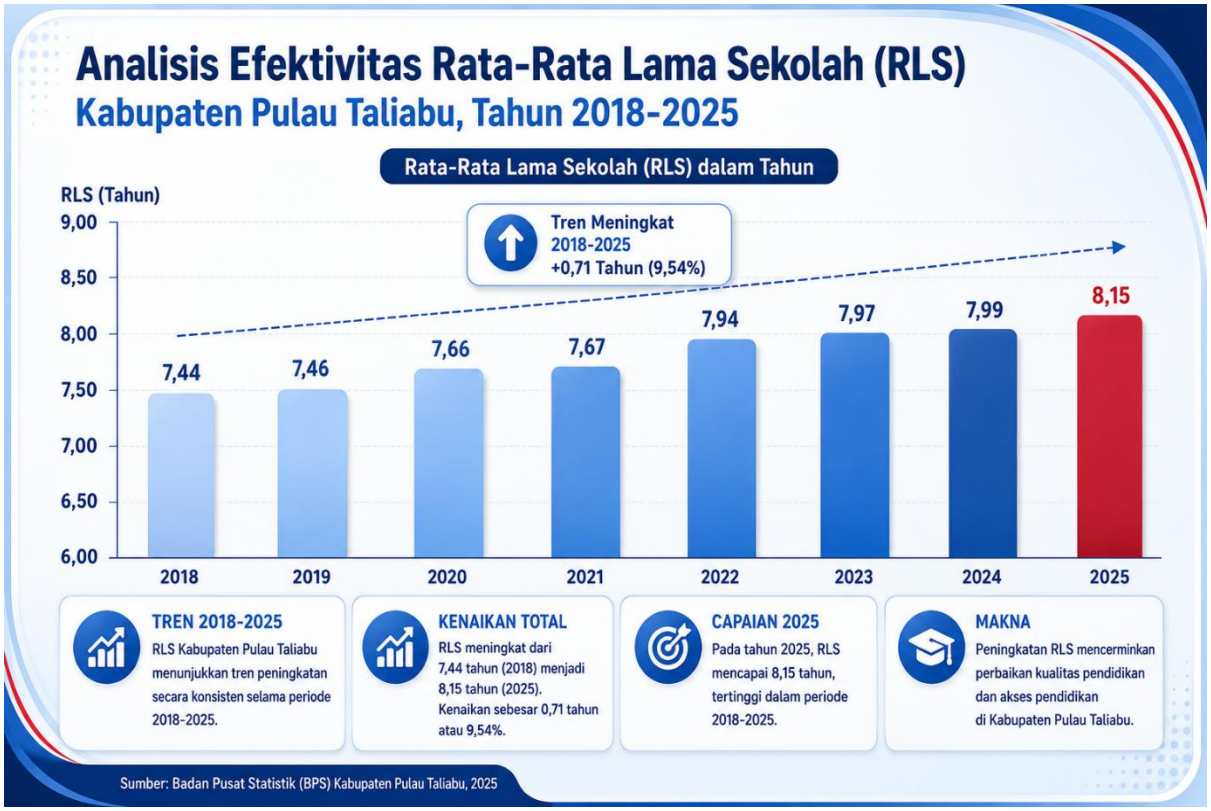
Peningkatan terbesar terjadi pada **tahun 2022** dan **2025**, sedangkan pada tahun-tahun lainnya peningkatan berlangsung secara bertahap. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program

pembangunan pendidikan, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan angka putus sekolah, pendidikan kesetaraan, serta peningkatan layanan pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan tingkat pendidikan masyarakat.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, capaian **RLS sebesar 8,15 tahun pada tahun 2025** mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pulau Taliabu baru menyelesaikan pendidikan hingga sekitar **kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP)**. Dengan demikian, masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan angka kelulusan jenjang pendidikan menengah dan memperluas akses menuju pendidikan tinggi.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu terus mengalami perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertahankan bahkan memperkuat kebijakan pembangunan pendidikan melalui peningkatan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, penguatan pendidikan kesetaraan, pengembangan pendidikan vokasi, serta peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi. Strategi tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, serta memperkuat daya saing Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.

c. Efektivitas



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan hasil **Analisis Efektivitas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **kinerja yang efektif**. Hal ini tercermin dari meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah secara konsisten dari **7,44 tahun pada 2018** menjadi **8,15 tahun pada 2025**, atau mengalami kenaikan sebesar **0,71 tahun (9,54%)**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak

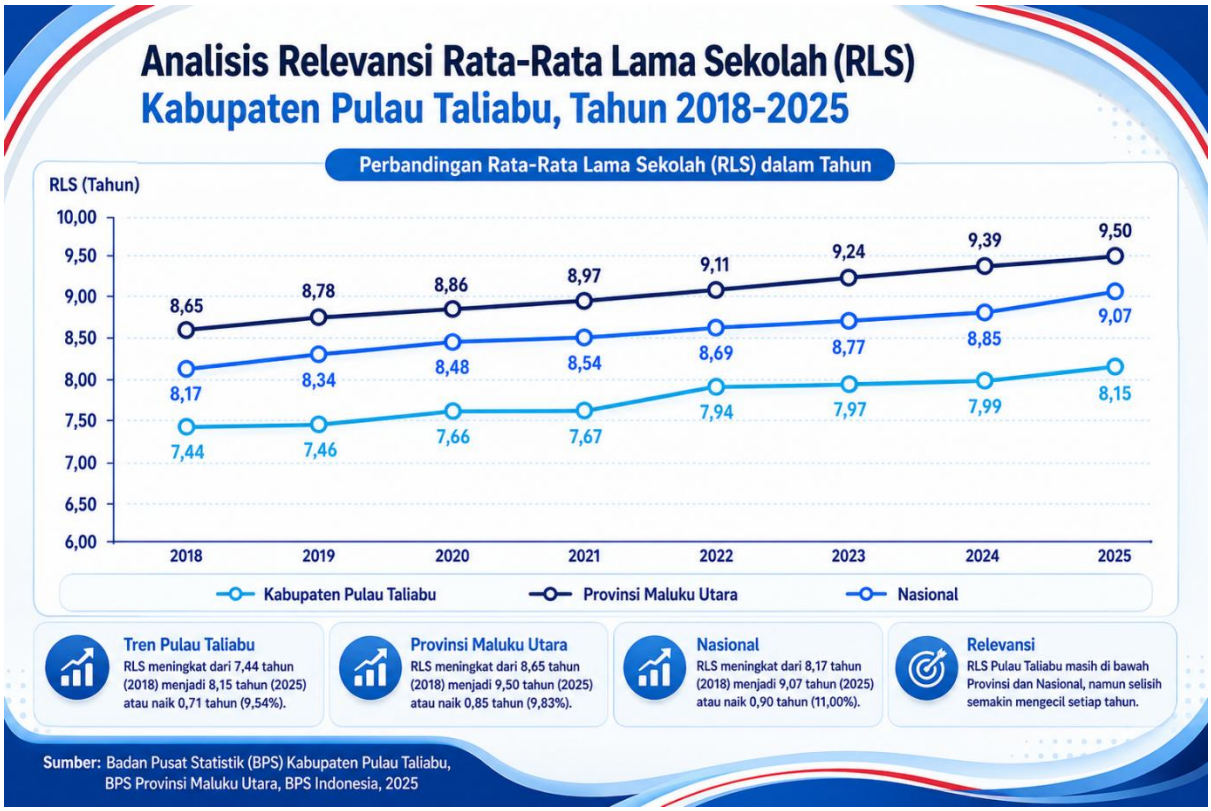
penduduk usia 25 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan garis tren linear periode 2018–2025, sebagian besar capaian tahunan berada **di atas atau mendekati garis tren**, yang mengindikasikan bahwa peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah berlangsung sesuai bahkan sedikit lebih baik dari target pertumbuhan rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan pendidikan, seperti peningkatan akses pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, penguatan pendidikan kesetaraan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, capaian **Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 8,15 tahun pada tahun 2025** masih berada **di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (9,50 tahun) maupun nasional (9,07 tahun)**. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pulau Taliabu masih menyelesaikan pendidikan hingga sekitar **kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP)**, sehingga percepatan peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

Oleh karena itu, efektivitas pembangunan pendidikan perlu terus ditingkatkan melalui kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi, penguatan pendidikan kesetaraan, pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan tenaga pendidik. Dengan strategi tersebut, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan berlangsung lebih cepat sehingga mampu mempersempit kesenjangan dengan capaian provinsi dan nasional, sekaligus mempercepat peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

d. Relevansi



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, **Neraca Pendidikan Daerah (NPD)** dan **Data Pokok Pendidikan (Dapodik)**, Tahun 2025, diolah

Berdasarkan hasil **Analisis Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, dapat disimpulkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren peningkatan yang konsisten**, dari **7,44 tahun pada 2018** menjadi **8,15 tahun pada 2025**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas terus mengalami perbaikan sebagai hasil dari meningkatnya akses dan kesempatan memperoleh pendidikan formal.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup baik, **Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional** sepanjang periode 2018–2025. Pada tahun 2025, RLS Kabupaten Pulau Taliabu tercatat **8,15 tahun**, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai **9,50 tahun** dan nasional **9,07 tahun**. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan sebesar **1,35 tahun** terhadap rata-rata provinsi dan **0,92 tahun** terhadap rata-rata nasional.

Namun demikian, apabila dilihat dari arah perkembangannya, **selisih capaian Kabupaten Pulau Taliabu terhadap wilayah pembanding cenderung semakin mengecil**, yang menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu berjalan **selaras (relevan)** dengan arah pembangunan pendidikan di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program pemerintah di bidang pendidikan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ke depan, percepatan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah perlu terus dilakukan melalui perluasan akses pendidikan menengah dan perguruan tinggi, peningkatan angka kelulusan SMA/sederajat, penguatan pendidikan kesetaraan bagi penduduk dewasa, pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu memperkecil kesenjangan dengan capaian Provinsi Maluku Utara dan nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, serta memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

3.3.4. Analisis Masalah Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta mempercepat pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga indikator utama pendidikan, yaitu **Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu.

ANALISIS MASALAH BIDANG PENDIDIKAN

Indikator Utama: Angka Partisipasi Sekolah (APS)

1. Posisi Relatif

APS Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional, terutama pada kelompok usia pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Perbandingan APS Tahun 2024 (%)

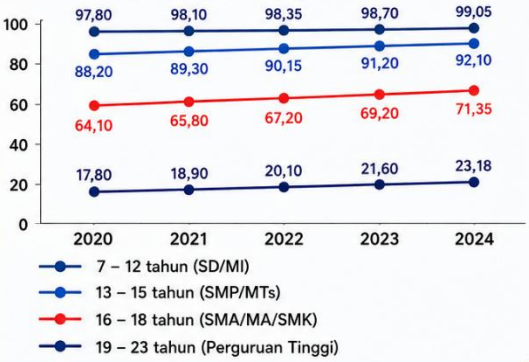
Kelompok Usia Pendidikan	Pulau Taliabu	Maluku Utara	Nasional
7 – 12 tahun (SD/MI)	99,05	99,32	99,42
13 – 15 tahun (SMP/MTs)	92,10	94,85	95,41
16 – 18 tahun (SMA/MA/SMK)	71,35	78,98	81,27
19 – 23 tahun (Perguruan Tinggi)	23,18	29,45	31,45

APS Pulau Taliabu masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan Nasional.

2. Perkembangan Antar Waktu

APS menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatannya belum mampu menutup kesenjangan dengan rata-rata provinsi dan nasional.

Tren APS Pulau Taliabu (%)



ANALISIS MASALAH BIDANG PENDIDIKAN

Indikator Utama: Angka Partisipasi Sekolah (APS)

3. Efektivitas

Program wajib belajar dan perluasan akses pendidikan telah meningkatkan partisipasi sekolah, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat, khususnya untuk mencegah putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan pada wilayah terpencil.

Upaya yang telah dilakukan

- Program Wajib Belajar 9 Tahun
- Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan
- Bantuan pendidikan dan beasiswa
- Transportasi sekolah pada daerah terpencil

Efektivitas program perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

4. Relevansi

APS merupakan indikator utama akses pendidikan. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang memperoleh layanan pendidikan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan.



Investasi pada peningkatan APS adalah investasi untuk masa depan generasi muda dan kemajuan daerah.





Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Sistem Informasi APK/APM; Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Indeks Pembangunan Manusia (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah); hasil analisis penulis.

Analisis Permasalahan Strategis Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis ketiga indikator tersebut, dapat diidentifikasi beberapa **permasalahan strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu**, yaitu:

1. **Akses pendidikan belum sepenuhnya merata**, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, sehingga Angka Partisipasi Sekolah masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional.
2. **Harapan Lama Sekolah masih belum optimal**, yang menunjukkan bahwa peluang anak-anak untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi masih perlu ditingkatkan melalui pemerataan akses pendidikan, penyediaan sarana prasarana, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
3. **Rata-rata Lama Sekolah masih relatif rendah**, mengindikasikan bahwa sebagian penduduk usia produktif belum menyelesaikan pendidikan menengah. Kondisi ini berdampak terhadap kualitas tenaga kerja, produktivitas ekonomi, dan daya saing daerah.
4. **Efektivitas program pembangunan pendidikan telah menunjukkan hasil positif**, ditandai dengan meningkatnya APS, HLS, dan RLS dari tahun ke tahun. Namun demikian, laju peningkatan tersebut masih belum cukup cepat untuk mengejar rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional.
5. **Masih terdapat kesenjangan pendidikan antarwilayah**, terutama pada daerah terpencil dan kepulauan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, akses transportasi, ketersediaan tenaga pendidik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kesimpulan Analisis

Secara umum, pembangunan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **tren yang positif**, ditandai dengan meningkatnya **Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**. Meskipun demikian, capaian ketiga indikator tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional sehingga memerlukan percepatan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Ke depan, pembangunan pendidikan perlu difokuskan pada **peningkatan akses pendidikan yang merata**, pengurangan angka putus sekolah, peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan, perluasan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, serta penguatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan pada akhirnya mempercepat **pengentasan kemiskinan** serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang berkelanjutan.

3.4. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG KESEHATAN

3.4.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, yang disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan maupun penanganannya, bukan karena kecelakaan atau penyebab insidental lainnya, per 100.000 kelahiran hidup pada periode tertentu.

a. Posisi relatif



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan analisis **Posisi Relatif Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**, Kabupaten **Pulau Taliabu** memiliki **Angka Kematian Ibu tertinggi** di Provinsi Maluku Utara, yaitu **899 kematian per 100.000 kelahiran hidup**. Nilai tersebut jauh melampaui kabupaten/kota lainnya dan sekitar **4,5 kali lebih tinggi** dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara (**200 per 100.000 kelahiran hidup**). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan ibu masih menjadi salah satu permasalahan strategis yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Tingginya AKI mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri, keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan kepulauan, serta belum optimalnya sistem rujukan ibu hamil risiko tinggi. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya beban sosial-ekonomi keluarga, dan berpotensi memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, penurunan Angka Kematian Ibu perlu menjadi **prioritas pembangunan daerah** melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu secara berkesinambungan, peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan (ANC) yang berkualitas, persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan kompeten, penguatan layanan PONED dan PONEK, peningkatan efektivitas sistem rujukan maternal-neonatal, serta edukasi kepada masyarakat mengenai deteksi dini kehamilan risiko tinggi. Dengan intervensi tersebut, diharapkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pulau Taliabu dapat ditekan secara signifikan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan mendukung percepatan pembangunan serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

b. Perkembangan antar waktu

Data Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pulau Taliabu secara historis belum tersedia secara lengkap untuk periode 2018–2024. Berdasarkan publikasi resmi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, data AKI per kabupaten/kota yang dipublikasikan baru tersedia untuk Tahun 2024, sehingga analisis pada dokumen ini menggunakan data Tahun 2024 sebagai dasar untuk menggambarkan posisi relatif Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara. Meskipun belum dapat dilakukan analisis tren jangka panjang, data Tahun 2024 tetap memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi terkini kesehatan ibu di Kabupaten Pulau Taliabu dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan serta prioritas pembangunan kesehatan daerah.

c. Efektivitas

Analisis efektivitas **Angka Kematian Ibu (AKI)** Kabupaten Pulau Taliabu **belum dapat dilakukan secara runtut waktu** karena **data AKI per tahun untuk periode 2018–2024 belum dipublikasikan secara lengkap** oleh instansi resmi. Publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara hanya menyajikan **data AKI per kabupaten/kota pada Tahun 2024**, sehingga tidak tersedia deret waktu yang memadai untuk menyusun analisis tren maupun mengevaluasi efektivitas program penurunan AKI berdasarkan perkembangan tahunan.

Meskipun demikian, **capaian AKI Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2024 sebesar 899 per 100.000 kelahiran hidup**, yang merupakan **nilai tertinggi di Provinsi Maluku Utara**, menunjukkan bahwa upaya penurunan kematian ibu masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, penguatan layanan antenatal care (ANC), persalinan di fasilitas kesehatan, optimalisasi pelayanan obstetri dan neonatal emergensi (PONED/PONEK), serta penguatan sistem rujukan maternal, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Evaluasi efektivitas program secara lebih komprehensif diharapkan dapat dilakukan setelah tersedia data AKI yang berkesinambungan untuk beberapa tahun ke depan.

a. Relevansi

Analisis **relevansi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Provinsi Maluku Utara dan nasional untuk periode 2018–2024 belum dapat dilakukan secara runtut waktu**, karena **data AKI per kabupaten/kota yang dipublikasikan secara resmi baru tersedia pada Tahun 2024**. Dengan demikian, perbandingan perkembangan tahunan antara Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan nasional selama periode tersebut belum dapat disajikan secara komprehensif.

Meskipun demikian, **data Tahun 2024** memberikan gambaran yang cukup representatif mengenai posisi Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan wilayah pembanding. Pada tahun tersebut, **AKI Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 899 per 100.000 kelahiran hidup**, jauh lebih tinggi dibandingkan **rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 200 per 100.000 kelahiran hidup**, sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan yang sangat besar dalam upaya menurunkan kematian ibu. Tingginya AKI ini mengindikasikan masih perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu, peningkatan akses terhadap pelayanan obstetri emergensi, optimalisasi sistem rujukan maternal, serta pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

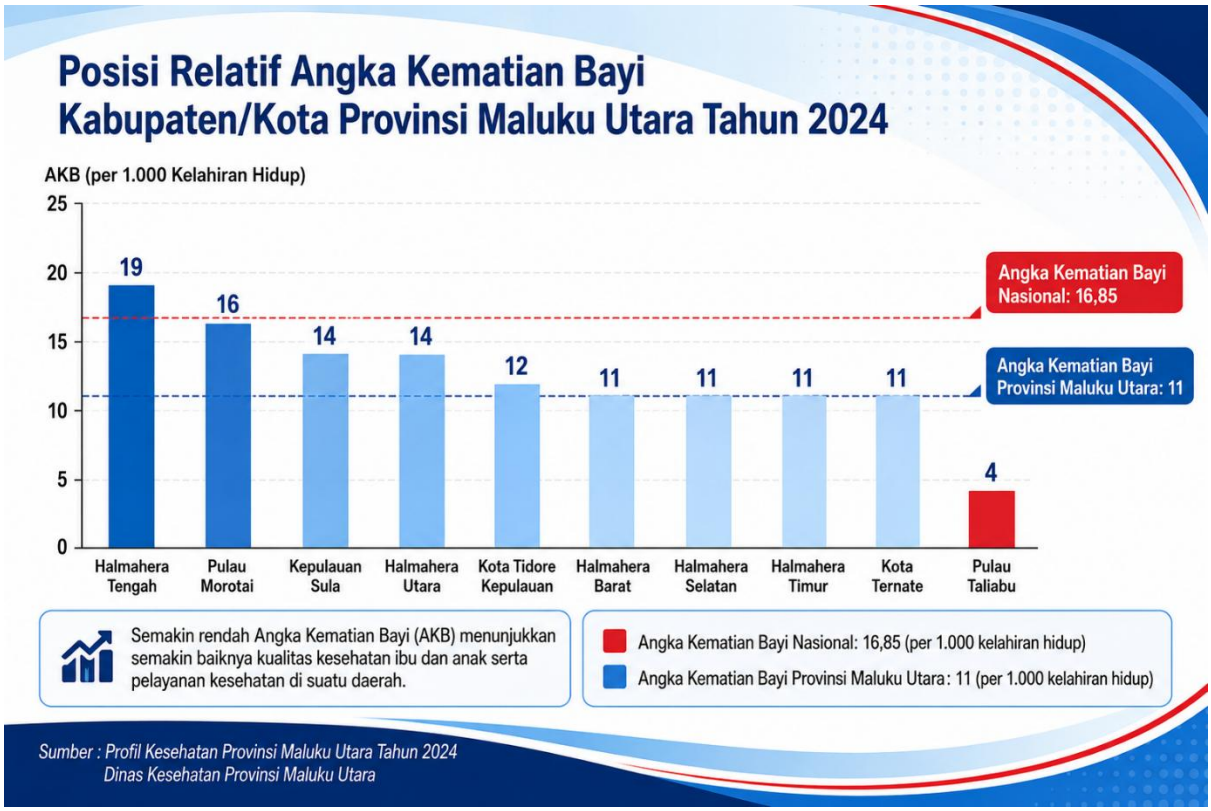
Oleh karena itu, meskipun analisis relevansi secara deret waktu belum dapat dilakukan akibat keterbatasan data historis, **hasil perbandingan Tahun 2024 telah menunjukkan bahwa penurunan Angka Kematian Ibu harus menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu**. Evaluasi relevansi secara lebih komprehensif di masa mendatang diharapkan dapat dilakukan setelah tersedia publikasi data AKI per kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk beberapa tahun berikutnya.

3.4.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang terjadi sebelum mencapai usia satu tahun (0–11 bulan) dalam satu tahun tertentu untuk setiap 1.000 kelahiran hidup pada periode yang

sama. AKB merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, khususnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, kondisi sosial ekonomi, status gizi, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Semakin rendah nilai Angka Kematian Bayi, semakin baik kualitas pelayanan kesehatan, status kesehatan masyarakat, serta tingkat kesejahteraan suatu daerah. Sebaliknya, nilai AKB yang tinggi menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan pada pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, gizi, sanitasi, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

a. Posisi relatif



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan **Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**, Kabupaten **Pulau Taliabu** memiliki **Angka Kematian Bayi terendah**, yaitu **4 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup**. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan **rata-rata Provinsi Maluku Utara (11 per 1.000 kelahiran hidup)** maupun **rata-rata nasional (16,85 per 1.000 kelahiran hidup)**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan kesehatan anak di Kabupaten Pulau Taliabu telah memberikan hasil yang relatif baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.

Rendahnya Angka Kematian Bayi mengindikasikan bahwa berbagai program kesehatan ibu dan anak, seperti peningkatan cakupan pelayanan antenatal (ANC), persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan neonatal esensial, imunisasi, serta upaya perbaikan gizi bayi dan balita telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh, terutama dalam upaya menurunkan **Angka Kematian Ibu (AKI)** yang masih relatif tinggi. Dengan mempertahankan capaian AKB yang rendah serta memperkuat pelayanan kesehatan maternal, diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, produktivitas masyarakat semakin baik, dan tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

b. Perkembangan antar waktu

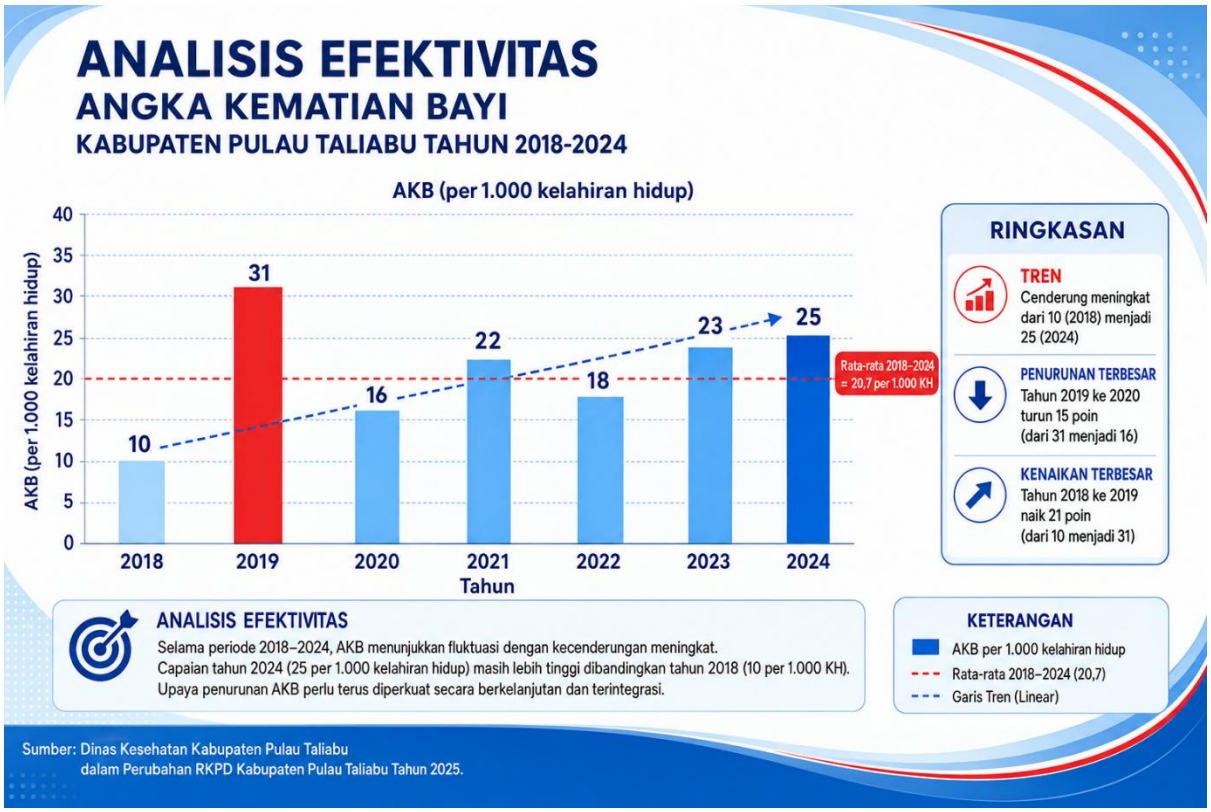


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan perkembangan **Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2024**, terlihat bahwa AKB mengalami **fluktuasi dari tahun ke tahun**. Nilai AKB meningkat tajam pada tahun 2019, kemudian menurun pada tahun 2020, namun kembali mengalami kenaikan hingga mencapai **25 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024**. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kematian bayi belum berlangsung secara konsisten dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, status gizi, penyakit penyerta, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Secara keseluruhan, tren perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa **target penurunan Angka Kematian Bayi masih memerlukan perhatian yang lebih serius**. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kualitas pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan yang aman di fasilitas kesehatan, pelayanan neonatal esensial, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan gizi ibu dan bayi, serta penguatan sistem rujukan. Upaya tersebut diharapkan mampu menurunkan Angka Kematian Bayi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak awal kehidupan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

d. Efektivitas



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan **Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2024**, terlihat bahwa **upaya penurunan Angka Kematian Bayi belum menunjukkan hasil yang konsisten**. Selama periode tersebut, AKB mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dari **10 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018** menjadi **25 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024**. Meskipun pada beberapa tahun terjadi penurunan, peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa efektivitas program kesehatan ibu dan anak masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa berbagai intervensi yang telah dilaksanakan, seperti peningkatan pelayanan antenatal (ANC), persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan neonatal, imunisasi, dan perbaikan gizi bayi, **belum sepenuhnya mampu menurunkan Angka Kematian Bayi secara berkelanjutan**. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program yang lebih terintegrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, optimalisasi sistem rujukan neonatal, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan akses pelayanan di wilayah terpencil dan kepulauan, serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan ibu dan bayi.

Dengan penguatan kebijakan dan intervensi yang lebih komprehensif, diharapkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pulau Taliabu dapat menurun secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

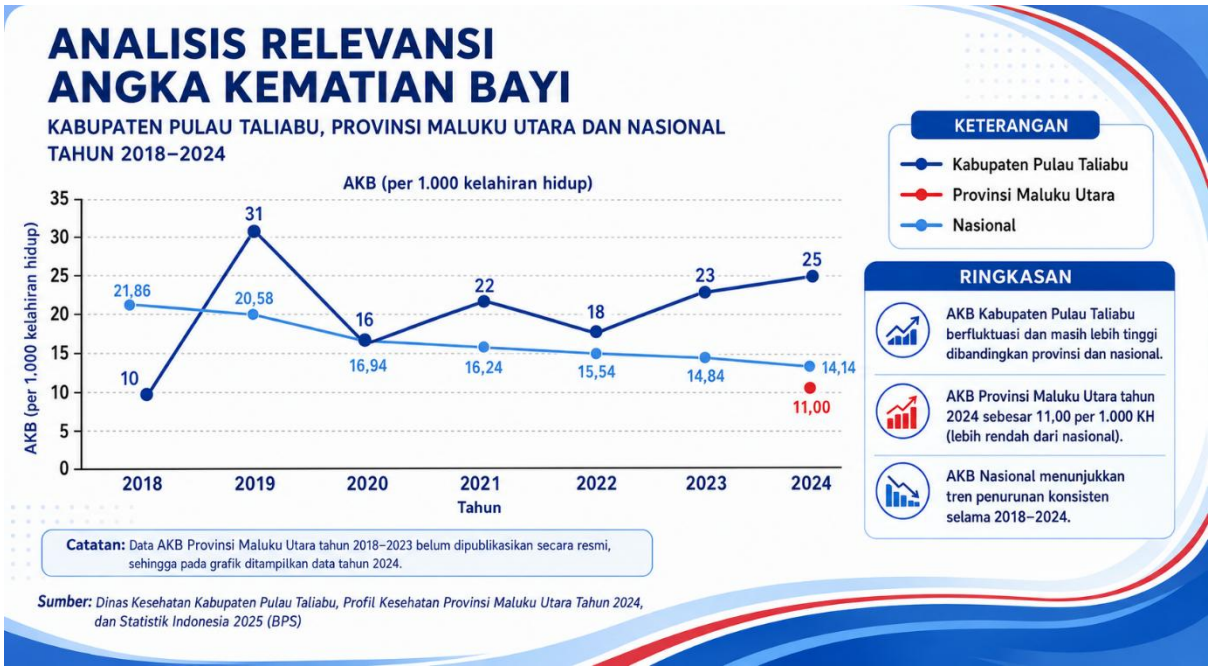
e. Relevansi

Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2018–2024, terlihat bahwa Angka Kematian Bayi Kabupaten Pulau Taliabu masih

berfluktuasi dan cenderung lebih tinggi dibandingkan angka nasional pada sebagian besar periode pengamatan. Sementara itu, angka nasional menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten, mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat nasional. Di sisi lain, data AKB Provinsi Maluku Utara secara runtut waktu belum dipublikasikan, sehingga perbandingan provinsi hanya dapat dilakukan berdasarkan data tahun 2024.

Pada tahun 2024, Angka Kematian Bayi Kabupaten Pulau Taliabu mencapai 25 kematian per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara (11 per 1.000 kelahiran hidup) maupun nasional (14,14 per 1.000 kelahiran hidup). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, terutama terkait pemerataan akses layanan kesehatan, kualitas pelayanan neonatal, penanganan bayi risiko tinggi, serta penguatan sistem rujukan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Oleh karena itu, penurunan Angka Kematian Bayi perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan, peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan neonatal yang berkualitas, peningkatan status gizi bayi, serta perluasan akses pelayanan kesehatan yang merata. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, dan mendukung tercapainya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

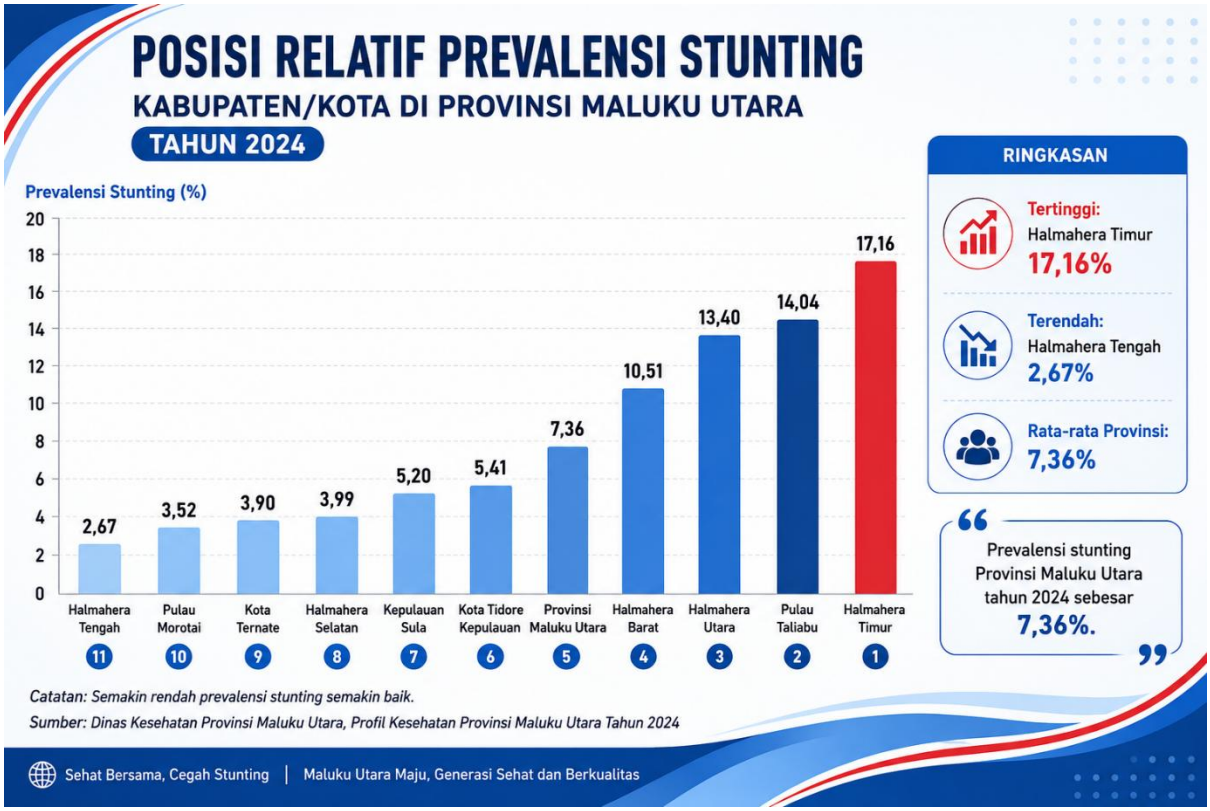
3.4.3. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting adalah persentase balita usia di bawah lima tahun (0–59 bulan) yang memiliki panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah minus dua standar deviasi (< -2 SD) berdasarkan Standar Pertumbuhan Anak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO Child Growth Standards). Stunting merupakan indikator yang menggambarkan gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, infeksi berulang, serta kurang optimalnya pola asuh dan pelayanan

kesehatan sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama kehidupan (1000 Hari Pertama Kehidupan/HPK).

Stunting tidak hanya mencerminkan masalah gizi, tetapi juga menjadi indikator kualitas pembangunan manusia karena berdampak terhadap perkembangan fisik, kemampuan kognitif, prestasi belajar, produktivitas kerja, serta daya saing sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, prevalensi stunting merupakan salah satu indikator prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional maupun daerah.

a. Posisi Relatif



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan **Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024**, **Kabupaten Pulau Taliabu memiliki prevalensi stunting sebesar 14,04%**, menempati **peringkat kedua tertinggi** setelah Kabupaten Halmahera Timur (17,16%). Angka tersebut juga **berada jauh di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 7,36%**, yang menunjukkan bahwa masalah stunting di Kabupaten Pulau Taliabu masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tingginya prevalensi stunting mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak, sanitasi lingkungan, akses air minum layak, serta pola asuh keluarga. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja di masa depan, serta memperbesar risiko terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Oleh karena itu, **percepatan penurunan prevalensi stunting perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu** melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif, antara

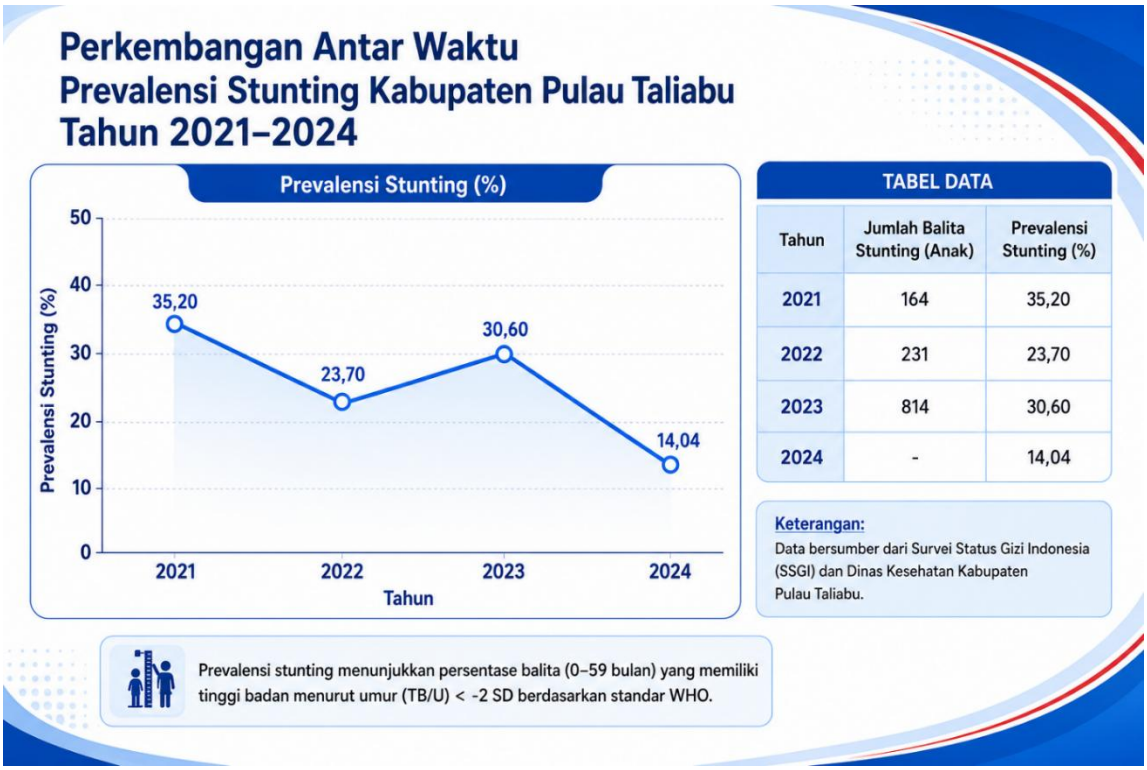
lain peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), perbaikan status gizi, peningkatan cakupan imunisasi, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, edukasi gizi kepada keluarga, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan prevalensi stunting dapat terus ditekan sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

b. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Stunting Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021–2024, prevalensi stunting menunjukkan **tren yang berfluktuasi**. Pada tahun 2021 prevalensi stunting tercatat sebesar **35,20%**, kemudian menurun menjadi **23,70%** pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi **30,60%**, sebelum akhirnya menurun secara signifikan menjadi **14,04%** pada tahun 2024. Penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan kondisi gizi balita serta semakin optimalnya pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu.

Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi selama periode pengamatan mengindikasikan bahwa permasalahan stunting masih memerlukan perhatian dan pengendalian yang berkelanjutan. Keberhasilan penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 perlu dipertahankan melalui penguatan intervensi pada **1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi ibu hamil dan balita, peningkatan cakupan imunisasi, penyediaan air minum dan sanitasi yang layak, serta edukasi kepada keluarga mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi.

Dengan mempertahankan tren penurunan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan program yang konsisten, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.



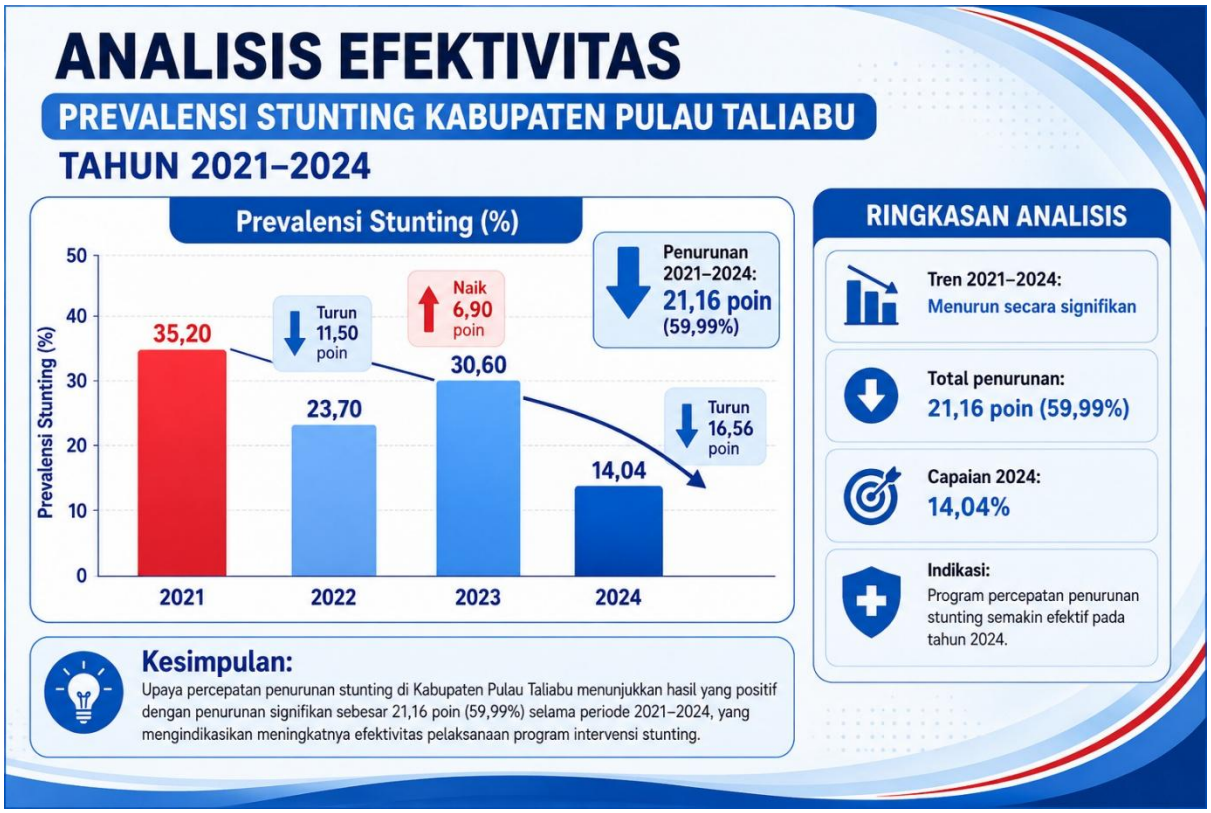
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

c. Efektivitas

Analisis Efektivitas Prevalensi Stunting Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021–2024, terlihat bahwa program percepatan penurunan stunting telah menunjukkan **hasil yang semakin efektif**. Meskipun prevalensi stunting sempat meningkat dari **23,70% pada tahun 2022 menjadi 30,60% pada tahun 2023**, pada tahun 2024 terjadi **penurunan yang sangat signifikan menjadi 14,04%**. Secara keseluruhan, prevalensi stunting berhasil turun **21,16 poin persentase** dibandingkan tahun 2021, atau mengalami penurunan sekitar **60,1%** selama periode 2021–2024.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi yang dilaksanakan pemerintah, seperti penguatan program **1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan bagi balita, peningkatan cakupan imunisasi, edukasi gizi, serta kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting mulai memberikan dampak yang nyata terhadap perbaikan status gizi balita di Kabupaten Pulau Taliabu.

Meskipun capaian tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang sangat baik, upaya percepatan penurunan stunting tetap perlu dipertahankan dan diperkuat agar hasil yang telah dicapai dapat berkelanjutan. Penguatan intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan akses air minum layak, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan gizi keluarga menjadi faktor penting untuk menurunkan prevalensi stunting secara lebih konsisten. Dengan demikian, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.



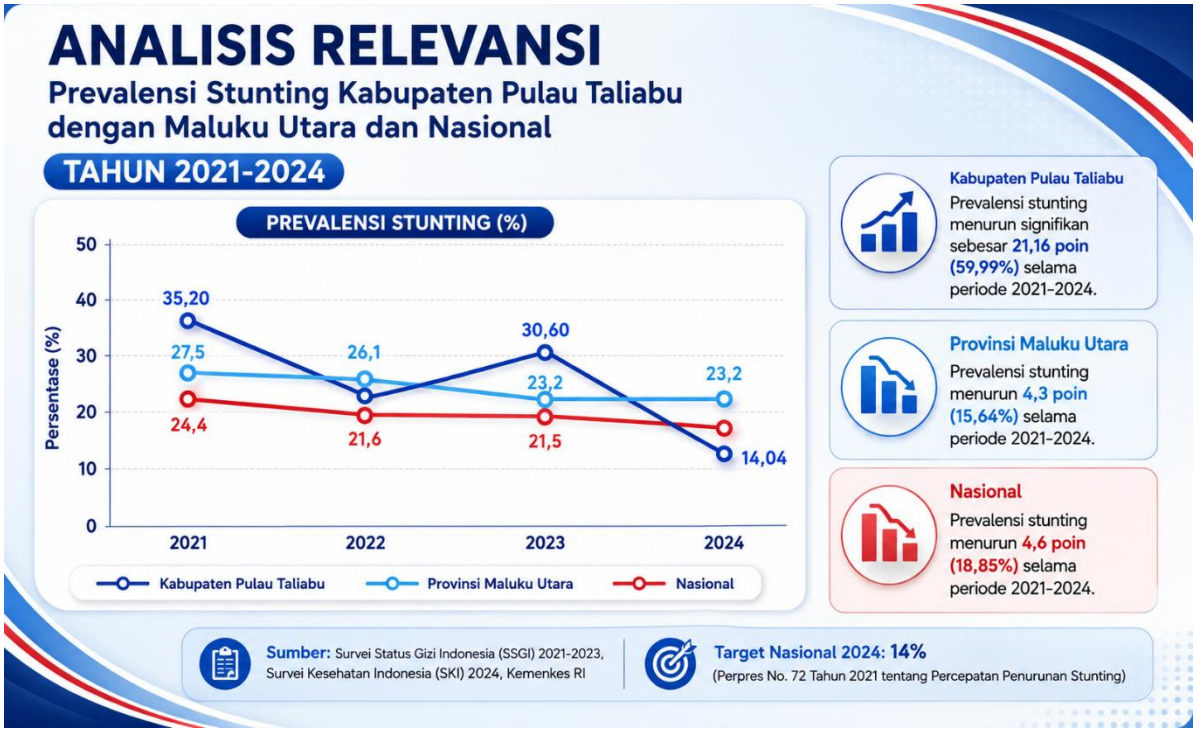
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

d. Relevansi

Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2021–2024, prevalensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan tingkat Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Selama periode tersebut, prevalensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu berhasil turun dari 35,20% pada tahun 2021 menjadi 14,04% pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 21,16 poin persentase (sekitar 60,1%). Sebagai perbandingan, prevalensi stunting Provinsi Maluku Utara menurun dari 27,5% menjadi 23,2%, sedangkan tingkat nasional turun dari 24,4% menjadi 19,8% pada periode yang sama.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Taliabu telah memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan wilayah pembanding. Penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi balita, pemberian makanan tambahan, edukasi keluarga, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting secara signifikan.

Meskipun demikian, upaya penurunan stunting perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar capaian tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat intervensi spesifik dan sensitif, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperbaiki akses air minum dan sanitasi layak, serta memperluas edukasi mengenai gizi dan pola asuh keluarga. Dengan konsistensi pelaksanaan program tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu mempertahankan tren penurunan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

3.4.4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir apabila selama hidupnya mengalami pola mortalitas (angka kematian) yang berlaku pada suatu periode tertentu. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat dan menjadi komponen penting dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semakin tinggi nilai Angka Harapan Hidup, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat semakin baik, pelayanan kesehatan semakin berkualitas, serta kualitas lingkungan, gizi, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sebaliknya, nilai Angka Harapan Hidup yang rendah mengindikasikan masih tingginya risiko kematian akibat penyakit, rendahnya akses pelayanan kesehatan, buruknya kondisi lingkungan, maupun rendahnya kualitas hidup masyarakat.

a. Posisi Relatif



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan **Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**, Angka Harapan Hidup Provinsi Maluku Utara mencapai **71,47 tahun**, namun masih berada di bawah **rata-rata nasional sebesar 74,47 tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara masih memerlukan peningkatan agar mampu mencapai standar kesehatan nasional.

Di tingkat kabupaten/kota, **Kota Ternate** memiliki Angka Harapan Hidup tertinggi, yaitu **72,91 tahun**, sedangkan **Kabupaten Pulau Taliabu** memiliki Angka Harapan Hidup terendah, yaitu **67,92 tahun**. Nilai tersebut berada **3,55 tahun di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara** dan **6,55 tahun di bawah rata-rata nasional**, sehingga menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan kesehatan antarwilayah di Provinsi Maluku Utara.

Rendahnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pulau Taliabu mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan, status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, sanitasi lingkungan, akses air minum layak, serta pemerataan pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan Angka Harapan Hidup harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemerataan akses layanan kesehatan hingga wilayah terpencil. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkat secara berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan.

b. Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

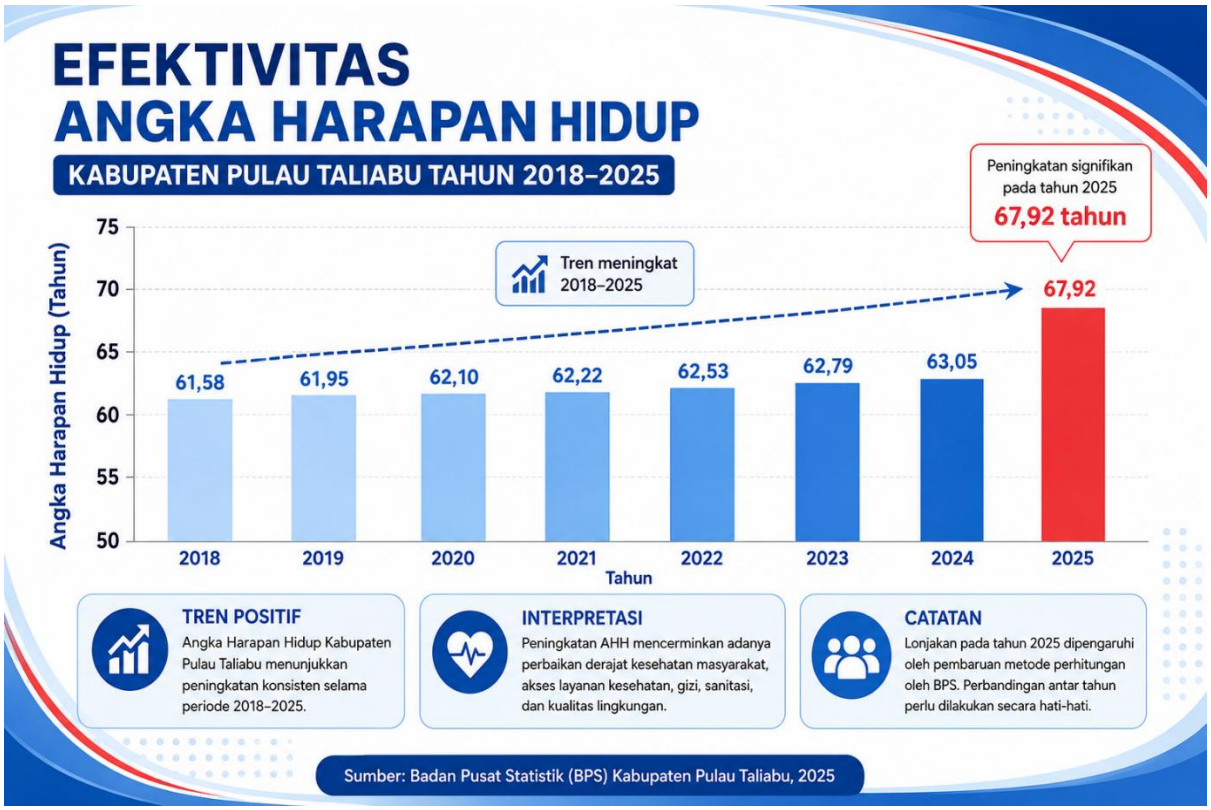
Berdasarkan **Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, Angka Harapan Hidup menunjukkan **tren peningkatan** selama periode pengamatan. Nilai AHH meningkat secara bertahap dari **61,58 tahun pada tahun 2018** menjadi **63,05 tahun pada tahun 2024**, yang mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, meskipun peningkatannya berlangsung secara relatif lambat. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam penyediaan pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pada tahun **2025**, Angka Harapan Hidup tercatat sebesar **67,92 tahun** berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena adanya **perubahan seri data (break in series)** atau penyempurnaan metodologi penghitungan AHH oleh BPS. Oleh karena itu, lonjakan nilai AHH pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan

perubahan kondisi kesehatan masyarakat dalam satu tahun, melainkan juga dipengaruhi oleh pembaruan metode estimasi statistik yang digunakan.

Secara umum, perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan arah yang positif dan menggambarkan semakin meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan. Meskipun demikian, upaya peningkatan Angka Harapan Hidup perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi, serta pemerataan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil. Dengan strategi tersebut, diharapkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus meningkat secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan mendukung percepatan pembangunan daerah serta pengentasan kemiskinan.

c. Efektivitas



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

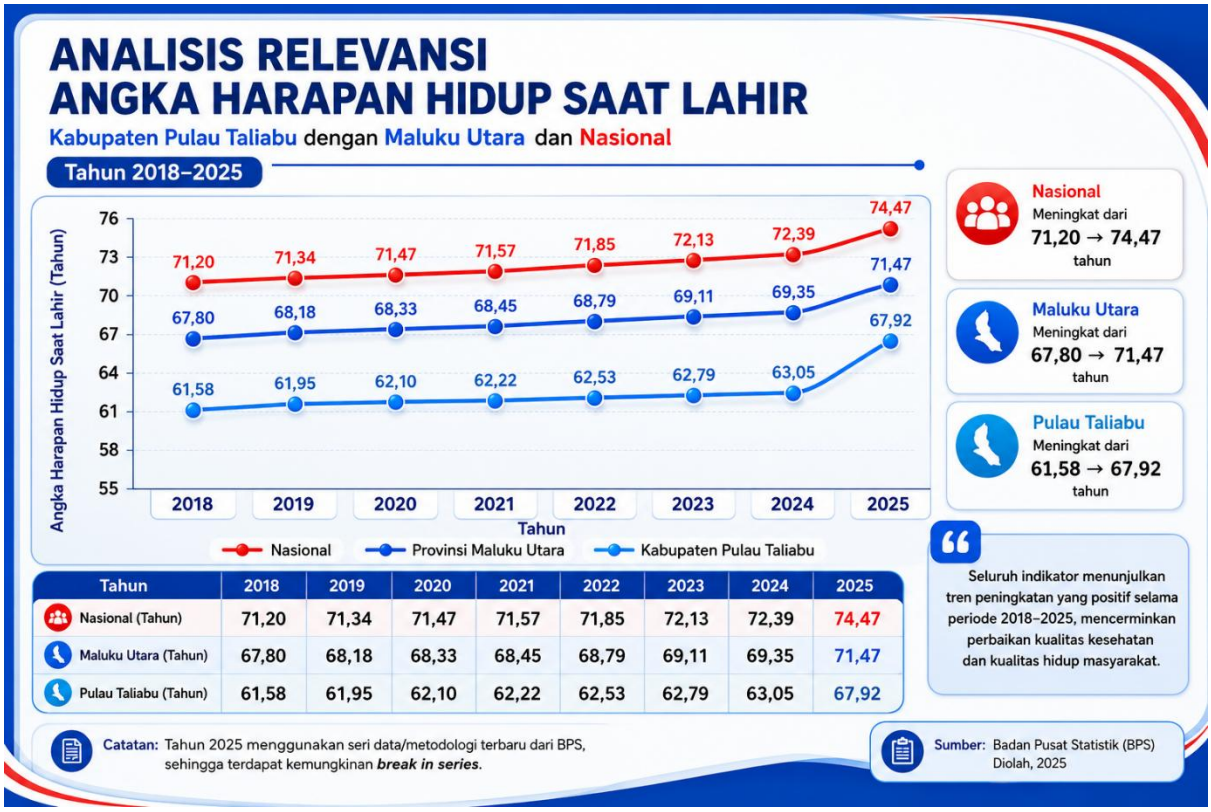
Berdasarkan **Analisis Efektivitas Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025**, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor kesehatan telah menunjukkan **efektivitas yang positif** dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup secara konsisten dari **61,58 tahun pada tahun 2018** menjadi **63,05 tahun pada tahun 2024**. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam penyediaan pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, serta membaiknya kondisi sanitasi dan lingkungan hidup.

Pada tahun **2025**, Angka Harapan Hidup meningkat menjadi **67,92 tahun**. Meskipun nilai tersebut menunjukkan capaian yang lebih baik, interpretasinya perlu dilakukan secara hati-hati karena adanya

penyempurnaan metodologi penghitungan Angka Harapan Hidup oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berpotensi menimbulkan **break in series**. Oleh karena itu, lonjakan nilai pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat dalam satu tahun, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan metode estimasi statistik.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, mengingat Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional, efektivitas program kesehatan perlu terus ditingkatkan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan, serta pemerataan akses layanan kesehatan hingga wilayah terpencil. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan Angka Harapan Hidup secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

d. Relevansi



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan **Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2018–2025**, ketiga wilayah menunjukkan **tren peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH)** selama periode pengamatan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi, pengendalian penyakit, serta meningkatnya kualitas pembangunan manusia baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Meskipun demikian, **Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu secara konsisten masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional**. Pada tahun 2025, AHH Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **67,92 tahun**, sedangkan Provinsi Maluku Utara mencapai **71,47 tahun** dan nasional **74,47 tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan sekitar **3,55 tahun** terhadap rata-rata provinsi dan **6,55 tahun** terhadap rata-rata nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu masih perlu ditingkatkan agar mampu mengejar capaian wilayah pembanding.

Selama periode 2018–2025, Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan AHH yang cukup baik, namun laju peningkatannya belum mampu mengurangi kesenjangan secara signifikan dengan tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa nilai AHH tahun 2025 berasal dari **seri data/metodologi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS)** sehingga terdapat kemungkinan **break in series**. Oleh karena itu, lonjakan nilai pada tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh penyempurnaan metode penghitungan statistik.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun masih diperlukan percepatan pembangunan kesehatan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan primer, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, peningkatan status gizi masyarakat, perbaikan sanitasi dan akses air minum layak, serta peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pelaksanaan program yang berkelanjutan dan terintegrasi, diharapkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus meningkat, kesenjangan dengan rata-rata provinsi dan nasional semakin berkurang, serta mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, dan percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

3.4.5. Kasus Penyakit Prioritas

Dalam penyusunan analisis kondisi kesehatan masyarakat, **indikator Angka Morbiditas** pada umumnya digunakan untuk menggambarkan tingkat kesakitan penduduk dalam suatu wilayah. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran terhadap publikasi resmi **Badan Pusat Statistik (BPS)** dan **Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara**, **data Angka Morbiditas (%) menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara belum tersedia atau belum dipublikasikan secara resmi**. Indikator tersebut umumnya hanya disajikan pada tingkat provinsi dan nasional melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sehingga tidak dapat digunakan untuk melakukan analisis komparatif pada tingkat Kabupaten Pulau Taliabu.

Oleh karena itu, dalam kajian ini **analisis kondisi morbiditas dilakukan menggunakan indikator Kasus Penyakit Prioritas**, yang meliputi **Angka Penemuan Tuberkulosis (TBC), Keberhasilan Pengobatan TBC, Kasus Baru HIV/AIDS, Penemuan Kasus Baru Kusta, Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API), serta Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)**. Indikator-indikator tersebut merupakan data resmi yang dipublikasikan setiap tahun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan tersedia hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai beban penyakit di masing-masing wilayah.

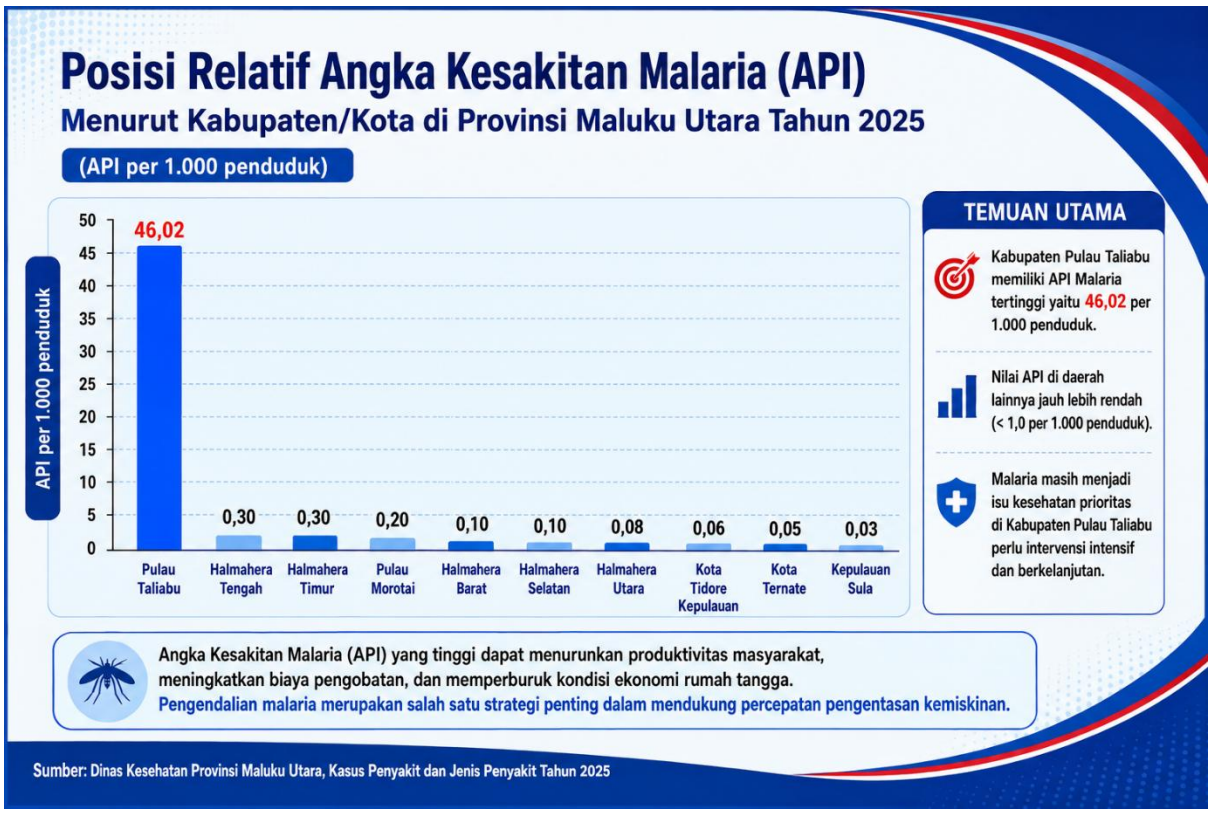
Penggunaan **Kasus Penyakit Prioritas** sebagai pengganti indikator morbiditas juga dinilai lebih relevan dalam mendukung analisis pembangunan daerah karena mampu menunjukkan penyakit-penyakit yang menjadi prioritas penanganan pemerintah. Melalui indikator tersebut dapat diidentifikasi wilayah dengan tingkat risiko kesehatan yang tinggi sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, **indikator Kasus Penyakit Prioritas memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya pengentasan kemiskinan**. Tingginya kejadian penyakit, khususnya penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kehilangan hari kerja,

memperbesar pengeluaran rumah tangga untuk biaya pengobatan, serta mengurangi pendapatan keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat dan memperkuat siklus kemiskinan. Sebaliknya, keberhasilan pengendalian penyakit prioritas akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperbaiki produktivitas ekonomi, mengurangi beban biaya kesehatan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, **analisis berdasarkan Kasus Penyakit Prioritas tetap dapat digunakan sebagai pendekatan yang representatif untuk menggambarkan kondisi morbiditas masyarakat sekaligus mengevaluasi kontribusi sektor kesehatan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu**. Pendekatan ini juga sejalan dengan praktik penyusunan dokumen **RPJMD**, **Renstra Dinas Kesehatan**, dan evaluasi pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, yang menempatkan pengendalian penyakit prioritas sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

a. Posisi Relatif



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

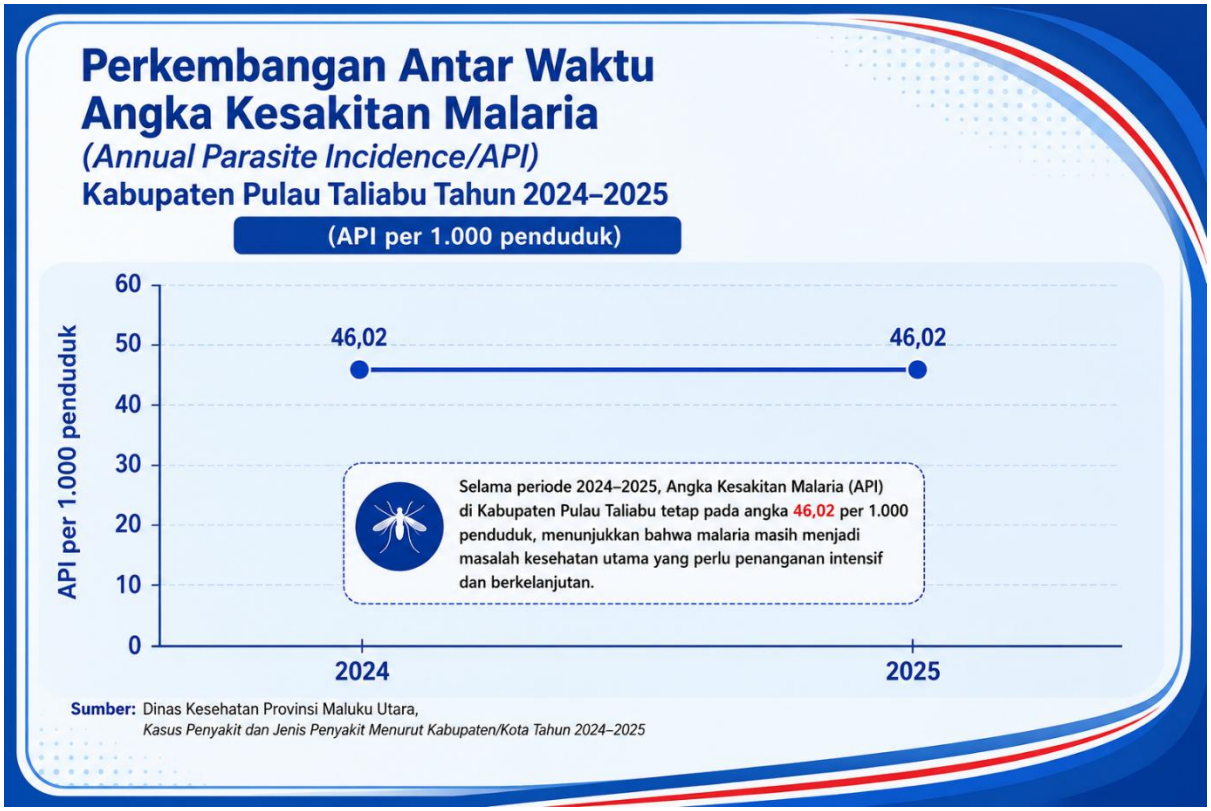
Berdasarkan **Posisi Relatif Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki **Angka Kesakitan Malaria tertinggi**, yaitu **46,02 per 1.000 penduduk**, jauh melampaui seluruh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara yang memiliki nilai API di bawah **0,30 per 1.000 penduduk**. Kesenjangan yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang paling serius di Kabupaten Pulau Taliabu dan memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan daerah.

Tingginya angka kesakitan malaria tidak hanya berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi. Masyarakat yang sering terinfeksi

malaria cenderung mengalami penurunan kapasitas kerja, kehilangan hari produktif, meningkatnya biaya pengobatan, serta berkurangnya pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko kemiskinan, terutama pada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pekerjaan informal yang sangat bergantung pada kondisi fisik.

Dengan demikian, **pengendalian malaria merupakan salah satu strategi penting dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu**. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan surveilans penyakit, peningkatan deteksi dini dan pengobatan yang cepat serta tepat, pengendalian vektor malaria, penyediaan kelambu berinsektisida, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan hingga wilayah terpencil. Keberhasilan menurunkan angka kesakitan malaria diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing sumber daya manusia, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan, dan pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

b. Perkembangan Antar Waktu



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

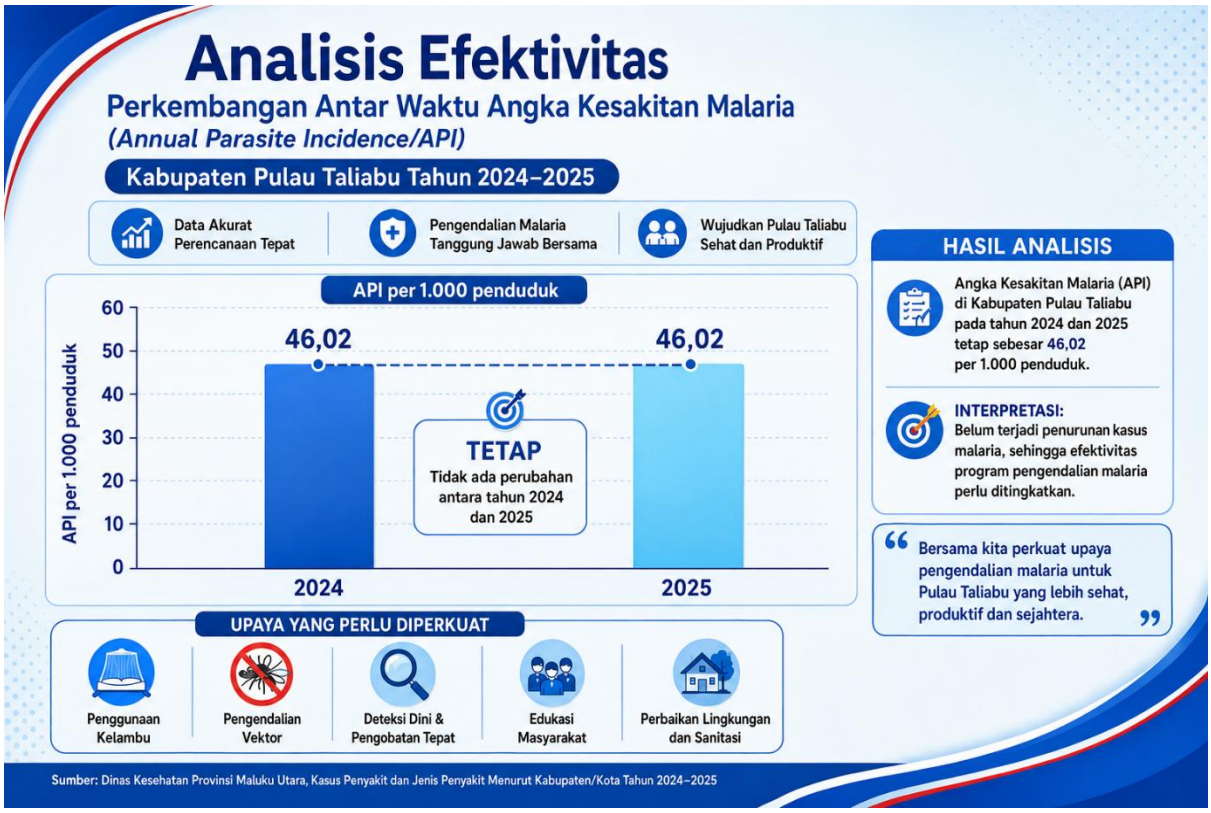
Berdasarkan **Perkembangan Antar Waktu Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024–2025**, Angka Kesakitan Malaria tercatat **tetap sebesar 46,02 per 1.000 penduduk** pada kedua tahun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan **belum terjadi penurunan angka kesakitan malaria**, sehingga malaria masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius di Kabupaten Pulau Taliabu.

Stabilnya nilai API pada tingkat yang sangat tinggi mengindikasikan bahwa upaya pengendalian malaria yang telah dilakukan belum mampu menurunkan tingkat penularan secara signifikan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik geografis wilayah kepulauan, keberadaan habitat vektor malaria, keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah, mobilitas penduduk, serta masih adanya faktor risiko lingkungan yang mendukung penularan penyakit.

Tingginya angka kesakitan malaria juga memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Selain meningkatkan beban pelayanan kesehatan, malaria dapat menyebabkan kehilangan hari kerja, menurunkan produktivitas masyarakat, meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk biaya pengobatan, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian malaria tidak hanya menjadi prioritas pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat program pengendalian malaria melalui peningkatan surveilans epidemiologi, deteksi dini dan pengobatan yang cepat dan tepat, pengendalian vektor secara terpadu, distribusi kelambu berinsektisida, edukasi masyarakat mengenai pencegahan malaria, serta peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan. Upaya yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu menurunkan Angka Kesakitan Malaria secara signifikan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat produktivitas ekonomi, dan mendukung tercapainya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Efektivitas



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

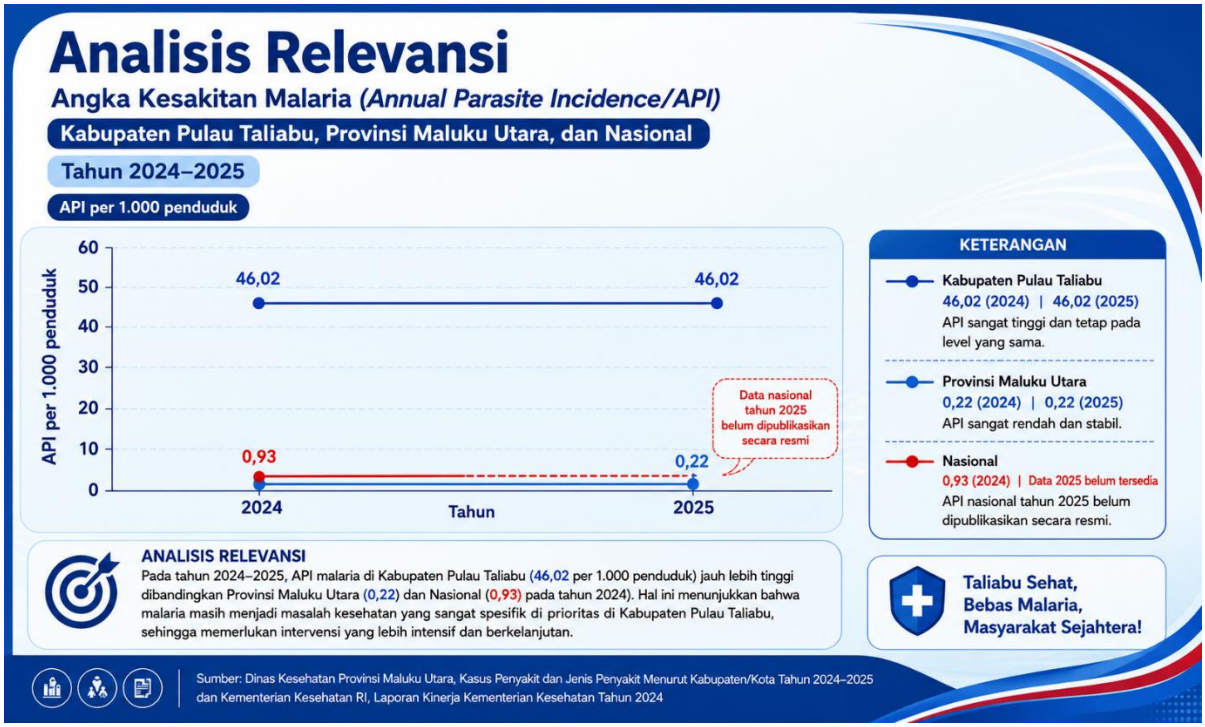
Berdasarkan **Analisis Efektivitas Perkembangan Antar Waktu Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024–2025**, Angka Kesakitan Malaria tercatat **tetap sebesar 46,02 per 1.000 penduduk** pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa **belum terjadi penurunan angka kesakitan malaria**, sehingga efektivitas program pengendalian malaria selama periode tersebut belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat penularan penyakit di Kabupaten Pulau Taliabu.

Tingginya nilai API yang bertahan pada level yang sama mengindikasikan bahwa penularan malaria masih berlangsung secara aktif dan berbagai faktor risiko belum dapat dikendalikan secara optimal. Kondisi geografis wilayah kepulauan, keberadaan habitat nyamuk Anopheles, mobilitas penduduk, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah terpencil diduga masih menjadi faktor yang memengaruhi tingginya kejadian malaria. Oleh karena itu, program pengendalian malaria yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi dan diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap penurunan angka kesakitan.

Dari perspektif pembangunan daerah, tingginya angka kesakitan malaria tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Malaria menyebabkan meningkatnya angka ketidakhadiran bekerja, menurunkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk biaya pengobatan, serta berpotensi memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian malaria merupakan salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat strategi pengendalian malaria melalui peningkatan surveilans epidemiologi, deteksi dini dan pengobatan sesuai standar, pengendalian vektor secara terpadu, distribusi kelambu berinsektisida, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, serta edukasi masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk menurunkan angka kesakitan malaria secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Angka Kesakitan Malaria dapat menurun secara signifikan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperkuat produktivitas ekonomi, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

d. Relevansi



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, *Profil Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024*; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah

Berdasarkan **Analisis Relevansi Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2024–2025**, terlihat bahwa **Kabupaten Pulau Taliabu memiliki tingkat kesakitan malaria yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional**. Pada tahun 2024, API Kabupaten Pulau Taliabu mencapai **46,02 per 1.000 penduduk**, sedangkan Provinsi Maluku Utara hanya **0,22 per 1.000 penduduk** dan nasional **0,93 per 1.000 penduduk**. Pada tahun 2025, API Kabupaten Pulau Taliabu tetap berada pada angka **46,02 per 1.000 penduduk**, sementara API Provinsi Maluku Utara tetap sebesar **0,22 per 1.000 penduduk**. Adapun data nasional tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan.

Perbedaan yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa **malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang bersifat spesifik dan menjadi isu strategis di Kabupaten Pulau Taliabu**. Tingginya angka kesakitan malaria mengindikasikan bahwa risiko penularan penyakit masih jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Maluku Utara maupun rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian dan intervensi yang lebih intensif dalam pengendalian malaria di Kabupaten Pulau Taliabu.

Dari perspektif pembangunan daerah, tingginya angka kesakitan malaria berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tujuan pembangunan. Masyarakat yang sering terinfeksi malaria cenderung mengalami penurunan produktivitas kerja, kehilangan hari kerja, peningkatan biaya pengobatan, serta penurunan pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, pengendalian malaria tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu menjadikan pengendalian malaria sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan melalui penguatan surveilans epidemiologi,

deteksi dini dan pengobatan sesuai standar, pengendalian vektor secara terpadu, distribusi kelambu berinsektisida, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, serta edukasi masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan mampu menurunkan Angka Kesakitan Malaria secara signifikan, memperkecil kesenjangan dengan rata-rata provinsi dan nasional, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

3.4.6. Analisis Masalah Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima indikator utama pembangunan kesehatan, yaitu **Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Kasus Penyakit Prioritas (Angka Kesakitan Malaria/API)**, masih terdapat beberapa permasalahan strategis yang memerlukan perhatian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.



ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Angka Kematian Ibu (AKI)

3. Efektivitas

Efektivitas program penurunan AKI belum dapat dievaluasi secara kuantitatif karena keterbatasan data deret waktu.

EVALUASI KUANTITATIF BELUM DAPAT DILAKUKAN

4. Relevansi

AKI merupakan indikator utama kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tingginya AKI berdampak pada meningkatnya beban sosial ekonomi keluarga serta berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

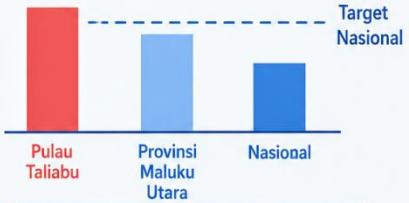
BERDAMPAK PADA KUALITAS SDM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Angka Kematian Bayi (AKB)

1. Posisi Relatif

AKB Kabupaten Pulau Taliabu masih menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan neonatal dan bayi dibandingkan wilayah dengan capaian lebih baik.



AKB Pulau Taliabu masih perlu ditingkatkan

2. Perkembangan Antar Waktu

Data perkembangan AKB secara berkelanjutan belum tersedia sehingga belum dapat menggambarkan kecenderungan peningkatan atau penurunan.

Data belum tersedia secara berkelanjutan

ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Angka Kematian Bayi (AKB)

3. Efektivitas

Efektivitas program kesehatan bayi belum dapat dinilai secara optimal akibat terbatasnya data historis.

Evaluasi belum optimal karena keterbatasan data

4. Relevansi

Penurunan AKB sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas generasi masa depan dan merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan kesehatan.

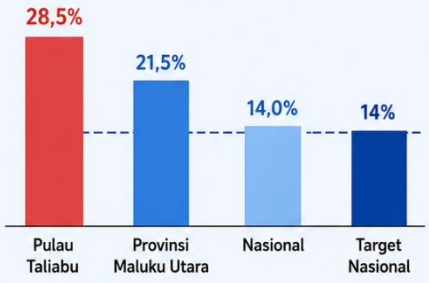
Berpengaruh pada kualitas generasi dan keberhasilan pembangunan kesehatan

ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Prevalensi Stunting

1. Posisi Relatif

Prevalensi stunting Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di atas target nasional sehingga memerlukan percepatan penurunan.



Prevalensi stunting Pulau Taliabu masih di atas target nasional

2. Perkembangan Antar Waktu

Selama periode 2021–2024 prevalensi stunting menunjukkan tren menurun, meskipun penurunannya belum mencapai target yang diharapkan.



Tren menurun, namun belum mencapai target nasional (14%)

ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Prevalensi Stunting

3. Efektivitas

Program percepatan penurunan stunting telah menunjukkan hasil positif, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar penurunan berlangsung lebih cepat.

HASIL PROGRAM

- ☑ Intervensi gizi spesifik
- ☑ Intervensi gizi sensitif
- ☑ Pemantauan tumbuh kembang
- ☑ Edukasi dan pemberdayaan keluarga

Hasil positif, efektivitas masih perlu ditingkatkan

4. Relevansi

Stunting berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, kemiskinan, dan daya saing daerah pada masa mendatang.

- Kualitas SDM meningkat
- Produktivitas ekonomi naik
- Kemiskinan berkurang
- Daya saing daerah meningkat

Sangat relevan untuk kualitas SDM, ekonomi, kemiskinan, dan daya saing daerah

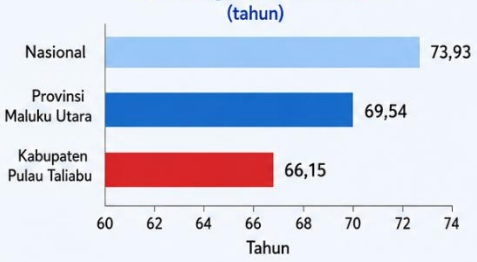
ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Angka Harapan Hidup (AHH)

1. Posisi Relatif

AHH Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional.

Perbandingan AHH Tahun 2024 (tahun)



Masih perlu peningkatan untuk mengejar capaian provinsi dan nasional.

2. Perkembangan Antar Waktu

Tahun 2018–2025 menunjukkan tren peningkatan AHH yang cukup konsisten.

Tren AHH Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2018–2025 (tahun)



Tren meningkat secara konsisten.

*Data 2025: proyeksi

ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Angka Harapan Hidup (AHH)

3. Efektivitas

Peningkatan AHH menunjukkan pembangunan kesehatan berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan percepatan untuk mengejar capaian provinsi dan nasional.

Program Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan
- Gizi Masyarakat
- Sanitasi & Lingkungan
- Pencegahan Penyakit
- Promosi Kesehatan

Program berjalan efektif, perlu percepatan untuk hasil lebih optimal.

4. Relevansi

AHH mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pelayanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan lingkungan hidup.



Berpengaruh pada kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

ANALISIS MASALAH BIDANG KESEHATAN

Indikator Utama: Kasus Penyakit Prioritas (API Malaria)

1. Posisi Relatif

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki Angka Kesakitan Malaria (API) tertinggi di Provinsi Maluku Utara, jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional.



API Kabupaten Pulau Taliabu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

2. Perkembangan Antar Waktu

Tahun 2024–2025 API malaria tidak mengalami penurunan dan tetap berada pada angka yang sangat tinggi.



Tidak ada penurunan, API malaria tetap sangat tinggi.



Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulau Taliabu; Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia*; Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara; Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu; data diolah.

Analisis Permasalahan Strategis Bidang Kesehatan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa **permasalahan strategis pembangunan kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu**, yaitu:

1. **Kualitas kesehatan ibu dan bayi masih perlu ditingkatkan**, yang tercermin dari masih adanya kasus kematian ibu dan bayi serta belum tersedianya sistem data historis yang lengkap untuk mengevaluasi keberhasilan program secara berkelanjutan.
2. **Prevalensi stunting masih relatif tinggi**, sehingga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas penduduk, dan daya saing daerah apabila tidak ditangani secara komprehensif.
3. **Angka Harapan Hidup masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional**, yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pelayanan kesehatan, status gizi, sanitasi, dan lingkungan.
4. **Malaria masih menjadi penyakit prioritas yang paling serius di Kabupaten Pulau Taliabu.** Tingginya Angka Kesakitan Malaria (API) menunjukkan bahwa pengendalian penyakit menular belum berjalan optimal dan memerlukan intervensi yang lebih intensif melalui penguatan surveilans, pengendalian vektor, peningkatan akses diagnosis dan pengobatan, serta pemberdayaan masyarakat.
5. **Keterbatasan ketersediaan data deret waktu** pada beberapa indikator kesehatan (terutama AKI dan AKB) menjadi kendala dalam melakukan evaluasi efektivitas program pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi kesehatan daerah menjadi salah satu kebutuhan strategis.

Kesimpulan Analisis

Secara keseluruhan, pembangunan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu telah menunjukkan kemajuan, terutama melalui **peningkatan Angka Harapan Hidup** dan **penurunan prevalensi stunting**. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar berupa **tingginya Angka Kesakitan Malaria**, masih adanya **kasus kematian ibu dan bayi**, serta **kesenjangan kualitas kesehatan dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional**. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan ke depan perlu difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular khususnya malaria, peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta penguatan sistem informasi kesehatan. Upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, dan percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

3.5. ANALISIS KARAKTERISTIK BIDANG KETENAGAKERJAAN

Karakteristik bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Kondisi ketenagakerjaan mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja, menyerap angkatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ketenagakerjaan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Secara umum, karakteristik ketenagakerjaan dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), jumlah penduduk bekerja, serta distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha. Tingginya TPAK menunjukkan semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan rendahnya TPT mengindikasikan semakin baiknya kemampuan daerah dalam menyediakan kesempatan kerja.

Struktur ketenagakerjaan juga memberikan gambaran mengenai tingkat transformasi ekonomi suatu daerah. Daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian umumnya memiliki karakteristik tenaga kerja dengan produktivitas relatif lebih rendah dibandingkan sektor industri maupun jasa. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi, diharapkan terjadi pergeseran tenaga kerja menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah.

Selain aspek kuantitas, kualitas tenaga kerja juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Tingkat pendidikan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi sangat memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kewirausahaan menjadi strategi penting dalam menghadapi perubahan pasar kerja yang semakin dinamis.

Di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan masih meliputi terbatasnya kesempatan kerja formal, tingginya proporsi pekerja di sektor informal, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha (skill mismatch), serta rendahnya produktivitas pada sebagian sektor ekonomi. Kondisi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, analisis karakteristik ketenagakerjaan berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan investasi, pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga pada penciptaan pekerjaan yang

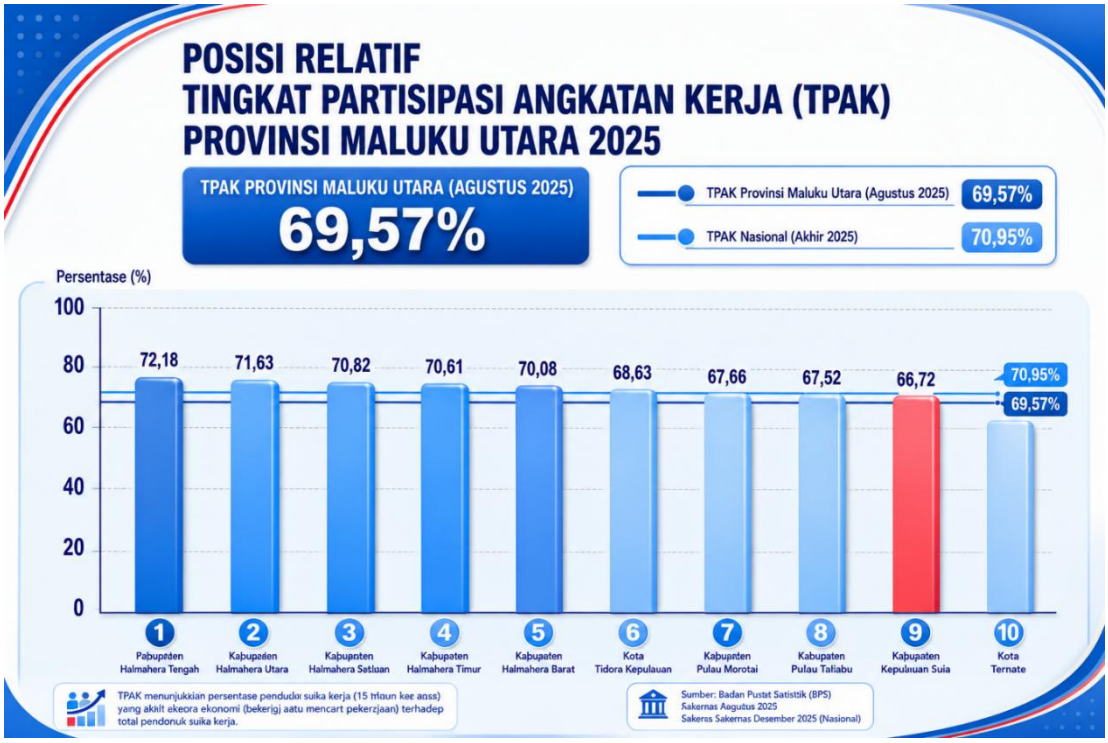
layak (decent work), peningkatan produktivitas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Analisis karakteristik ketenagakerjaan yang komprehensif diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pasar kerja daerah, mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi, serta menjadi landasan dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data, pembangunan ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing daerah, serta percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

3.5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan (pengangguran), terhadap total penduduk usia kerja. Indikator ini menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi serta mencerminkan potensi ketersediaan tenaga kerja di suatu daerah.Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam pasar kerja, sehingga menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, TPAK yang rendah mengindikasikan masih banyak penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur umur penduduk, tingkat pendidikan, kondisi perekonomian, kesempatan kerja, tingkat upah, budaya masyarakat, serta partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan TPAK tidak hanya bergantung pada pertumbuhan lapangan kerja, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan keterampilan, dan penciptaan iklim usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

a. Posisi Relatif



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2025 tercatat sebesar **69,57 persen**, sedikit lebih rendah dibandingkan **TPAK nasional yang mencapai 70,95 persen** pada akhir tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi di Provinsi Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sekitar **1,38 poin persentase**. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian penduduk usia kerja yang belum berpartisipasi secara aktif dalam pasar kerja, baik karena masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, maupun alasan lainnya.

Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, terdapat variasi tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup besar. **Kabupaten Halmahera Tengah** mencatat TPAK tertinggi sebesar **72,18 persen**, diikuti **Kabupaten Halmahera Utara (71,63 persen)** dan **Kabupaten Halmahera Selatan (70,82 persen)**. Sebaliknya, **Kota Ternate** memiliki TPAK terendah sebesar **63,74 persen**, sedangkan **Kabupaten Pulau Taliabu** berada pada posisi menengah dengan TPAK sebesar **67,52 persen**, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional.

Perbedaan TPAK antarwilayah tersebut mencerminkan adanya variasi kesempatan kerja, struktur perekonomian, karakteristik demografi, serta tingkat aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, serta peningkatan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Dengan upaya tersebut, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Perkembangan Antar Waktu



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah maupun nasional. Pada awal periode, TPAK mengalami peningkatan dari **73,75 persen pada tahun 2018** menjadi **75,02 persen pada tahun 2019**, yang menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

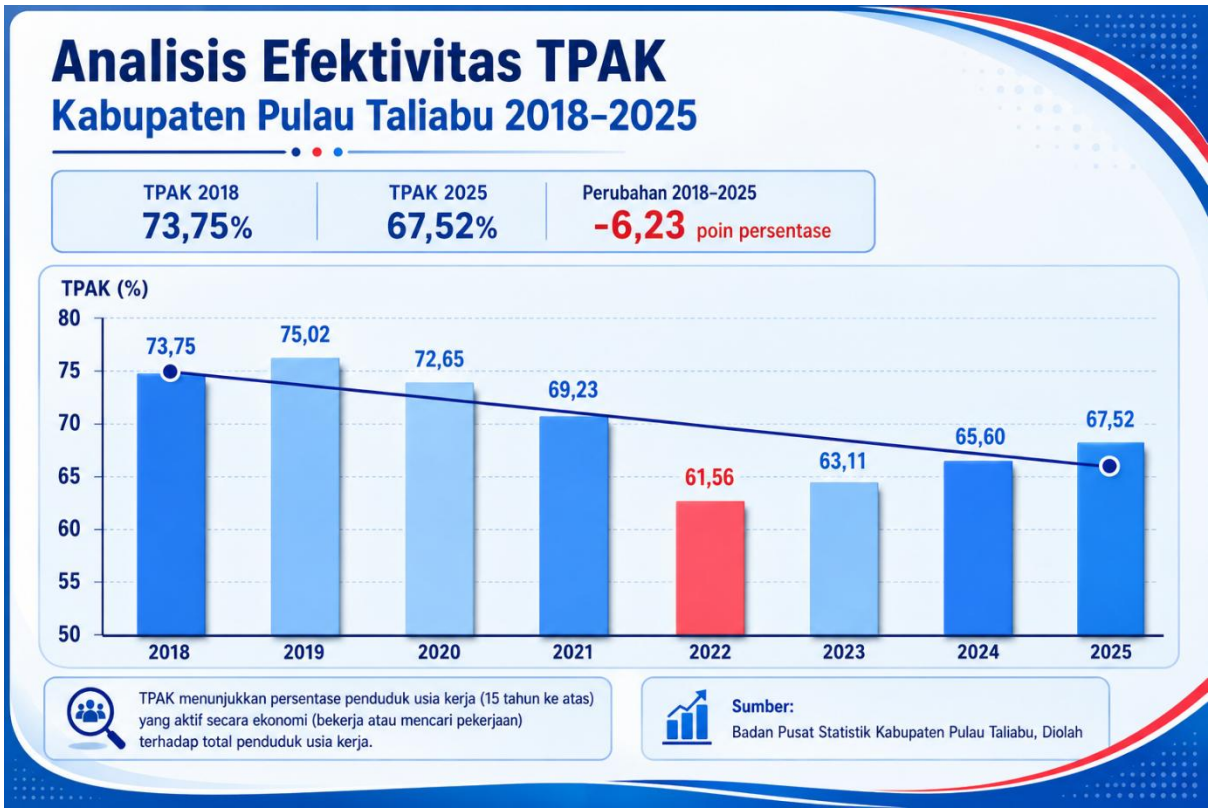
Namun, sejak tahun **2020 hingga 2022** TPAK mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai TPAK turun menjadi **72,65 persen pada tahun 2020**, **69,23 persen pada tahun 2021**, dan mencapai titik terendah sebesar **61,56 persen pada tahun 2022**. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, berkurangnya kesempatan kerja, serta meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak aktif dalam pasar kerja.

Memasuki tahun **2023 hingga 2025**, kondisi ketenagakerjaan mulai menunjukkan tren pemulihan. TPAK meningkat secara bertahap menjadi **63,11 persen pada tahun 2023**, **65,60 persen pada tahun 2024**, dan **67,52 persen pada tahun 2025**. Tren positif ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi daerah yang diikuti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam dunia kerja.

Meskipun mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, **TPAK Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2025 masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi**, yaitu sekitar **7,50 poin persentase lebih rendah dibandingkan tahun 2019**. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan pasar kerja masih berlangsung dan memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, memperkuat sektor-sektor ekonomi unggulan, mengembangkan kewirausahaan dan UMKM, serta menarik investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Dengan strategi tersebut, diharapkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat kembali mencapai bahkan melampaui tingkat sebelum pandemi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

c. Efektivitas



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

Berdasarkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025**, efektivitas pembangunan ketenagakerjaan menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi. Pada tahun **2018**, TPAK tercatat sebesar **73,75 persen**, kemudian meningkat menjadi **75,02 persen pada tahun 2019**, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini mencerminkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi.

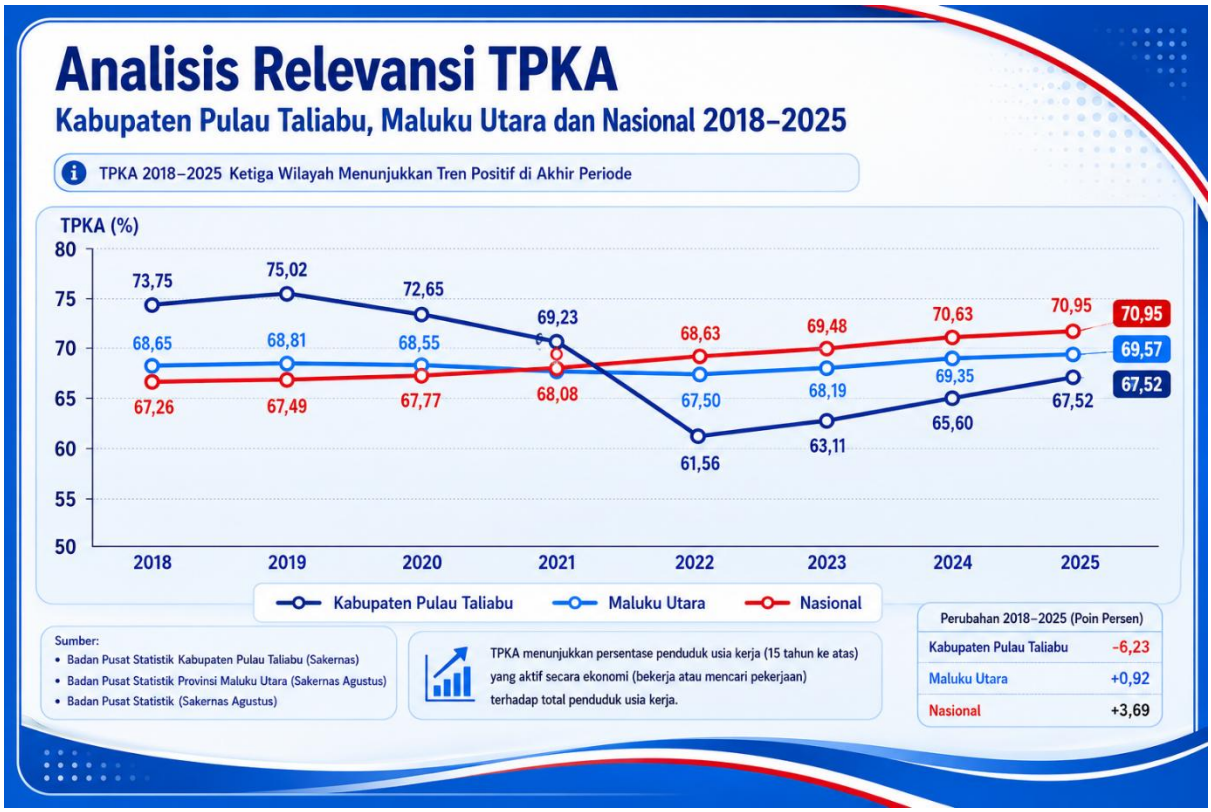
Namun demikian, pada periode **2020–2022** terjadi penurunan TPAK secara berturut-turut hingga mencapai **61,56 persen pada tahun 2022**. Penurunan tersebut mengindikasikan berkurangnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, yang dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor usaha dan lapangan pekerjaan.

Sejak **2023**, efektivitas pembangunan ketenagakerjaan mulai menunjukkan perbaikan. TPAK meningkat menjadi **63,11 persen pada tahun 2023**, **65,60 persen pada tahun 2024**, dan **67,52 persen pada tahun 2025**. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi daerah telah mendorong semakin banyak penduduk usia kerja kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi awal periode, **TPAK tahun 2025 masih lebih rendah sebesar 6,23 poin persentase dibandingkan tahun 2018**. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan ketenagakerjaan belum sepenuhnya kembali pada kondisi sebelum terjadinya perlambatan ekonomi. Dengan kata lain, pemulihan telah berlangsung, namun belum mencapai tingkat partisipasi tenaga kerja sebagaimana pada awal periode pengamatan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengembangan investasi padat karya, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja secara berkelanjutan, memperkuat produktivitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berdaya saing.

d. Relevansi



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

Analisis perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu memiliki pola perkembangan yang berbeda dibandingkan Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional. Pada awal periode, TPAK Kabupaten Pulau Taliabu berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu **73,75 persen pada tahun 2018**, bahkan melampaui capaian Provinsi Maluku Utara (**68,65 persen**) dan nasional (**67,26 persen**). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di Pulau Taliabu pada saat itu tergolong sangat baik.

Namun demikian, sejak tahun **2020 hingga 2022** Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan TPAK yang jauh lebih tajam dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional. Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Pulau Taliabu turun menjadi **61,56 persen**, sedangkan Provinsi Maluku Utara masih berada pada **67,50 persen** dan nasional **68,63 persen**. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dampak perlambatan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja di Kabupaten Pulau Taliabu lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

Pada periode **2023–2025**, ketiga wilayah sama-sama menunjukkan tren peningkatan TPAK sebagai indikator mulai pulihnya aktivitas ekonomi. Kabupaten Pulau Taliabu meningkat menjadi **67,52 persen pada tahun 2025**, Provinsi Maluku Utara mencapai **69,57 persen**, sedangkan nasional meningkat menjadi **70,95 persen**. Meskipun mengalami perbaikan, laju pemulihan Kabupaten Pulau Taliabu masih lebih lambat sehingga capaian TPAK tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional.

Jika dibandingkan antara tahun 2018 dan 2025, Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan sebesar **6,23 poin persentase**, sedangkan Provinsi Maluku Utara justru meningkat sekitar **0,92 poin persentase**, dan nasional meningkat sekitar **3,69 poin persentase**. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan penguatan agar mampu mengejar laju peningkatan partisipasi angkatan kerja sebagaimana yang terjadi di tingkat provinsi dan nasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu mengakselerasi kebijakan pembangunan ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan investasi yang padat karya, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan UMKM, serta optimalisasi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan jasa. Dengan strategi tersebut, diharapkan TPAK Kabupaten Pulau Taliabu dapat meningkat secara berkelanjutan, memperkecil kesenjangan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.

3.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau telah memperoleh pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Semakin rendah nilai TPT, semakin baik kondisi pasar kerja karena menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, TPT yang tinggi mengindikasikan bahwa kesempatan kerja yang tersedia belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja, sehingga masih banyak penduduk yang belum memperoleh pekerjaan.

Besarnya Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi, investasi, perkembangan sektor usaha, kualitas sumber daya manusia, kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (*skill mismatch*), serta kondisi sosial dan demografi masyarakat. Oleh karena itu, penurunan TPT tidak hanya bergantung pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kewirausahaan.

a. Posisi Relatif

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 4,44 persen, lebih rendah dibandingkan **TPT nasional sebesar 4,74 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pasar kerja di Provinsi Maluku Utara dalam menyerap angkatan kerja relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Dengan demikian, secara umum kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Maluku Utara dapat dikategorikan cukup kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

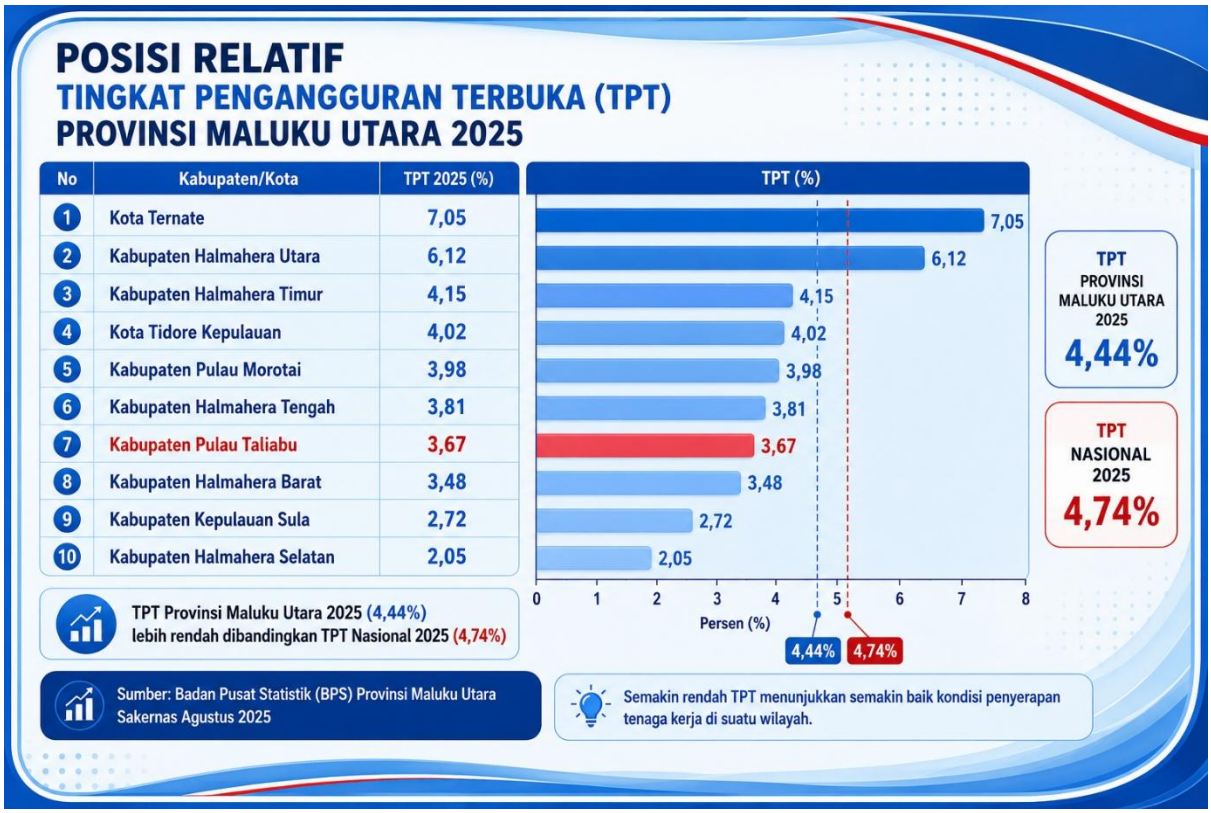
Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, terdapat perbedaan tingkat pengangguran yang cukup signifikan. **Kota Ternate** mencatat TPT tertinggi sebesar **7,05 persen**, diikuti **Kabupaten Halmahera Utara sebesar 6,12 persen**. Tingginya angka pengangguran di kedua wilayah tersebut

mengindikasikan bahwa pertumbuhan angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja baru, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki dinamika pasar kerja lebih tinggi.

Sebaliknya, **Kabupaten Halmahera Selatan** memiliki TPT terendah sebesar **2,05 persen**, disusul **Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 2,72 persen** dan **Kabupaten Halmahera Barat sebesar 3,48 persen**. Rendahnya TPT pada wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi, meskipun perlu tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja yang tersedia.

Sementara itu, **Kabupaten Pulau Taliabu mencatat TPT sebesar 3,67 persen**, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Pulau Taliabu relatif terkendali dan kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja tergolong cukup baik. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas kesempatan kerja melalui pengembangan investasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan sektor UMKM, serta optimalisasi sektor-sektor unggulan daerah agar penyerapan tenaga kerja semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, posisi relatif TPT tahun 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki kinerja ketenagakerjaan yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Tantangan ke depan bukan hanya menurunkan tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan daya saing tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, layak, dan berkelanjutan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

b. Perkembangan Antar Waktu



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun **2018**, TPT tercatat sebesar **5,07 persen**, kemudian menurun menjadi **4,68 persen pada tahun 2019**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, pada periode **2020–2021** TPT kembali mengalami peningkatan. Setelah berada pada **4,75 persen pada tahun 2020**, TPT meningkat tajam menjadi **6,10 persen pada tahun 2021**, yang merupakan tingkat pengangguran tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan investasi, serta berkurangnya kesempatan kerja di berbagai sektor usaha.

Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, TPT Kabupaten Pulau Taliabu mengalami penurunan secara konsisten pada periode **2022–2024**. Nilai TPT turun menjadi **4,17 persen pada tahun 2022**, **3,15 persen pada tahun 2023**, dan mencapai titik terendah sebesar **2,86 persen pada tahun 2024**. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi telah diikuti oleh meningkatnya kemampuan daerah dalam menciptakan dan menyerap kesempatan kerja.

Pada **tahun 2025**, TPT meningkat kembali menjadi **3,67 persen**. Meskipun terjadi kenaikan sebesar **0,81 poin persentase** dibandingkan tahun 2024, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan kondisi pada awal periode maupun saat puncak pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar kerja Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif baik, meskipun terdapat tantangan baru yang perlu diantisipasi agar peningkatan pengangguran tidak berlanjut.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun **2018**, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulau Taliabu pada **tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,40 poin persentase**, dari **5,07**

persen menjadi 3,67 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu telah memberikan hasil yang positif melalui peningkatan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan kewirausahaan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga tren penurunan tingkat pengangguran, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

c. Efektivitas



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

Analisis efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan secara umum telah memberikan hasil yang positif, meskipun sempat mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi pada masa pandemi. Pada tahun **2018**, TPT tercatat sebesar **5,07 persen**, kemudian menurun menjadi **4,68 persen pada tahun 2019**, yang mengindikasikan meningkatnya kemampuan daerah dalam menyerap angkatan kerja.

Pada periode **2020–2021**, TPT mengalami kenaikan hingga mencapai **6,10 persen pada tahun 2021**, yang merupakan tingkat pengangguran tertinggi selama delapan tahun terakhir. Peningkatan tersebut mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, menurunnya investasi, serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

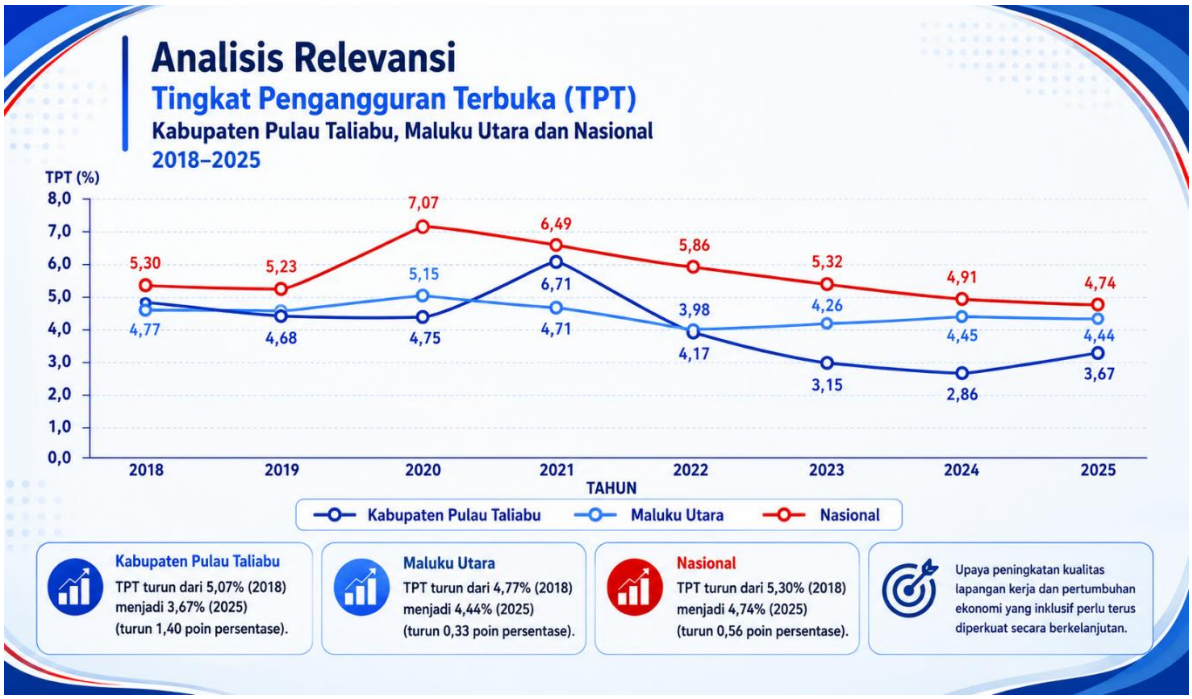
Memasuki periode **2022–2024**, kondisi pasar kerja menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. TPT turun secara bertahap menjadi **4,17 persen pada tahun 2022**, **3,15 persen pada tahun 2023**, dan mencapai **2,86 persen pada tahun 2024**. Penurunan tersebut menggambarkan semakin efektifnya penyerapan tenaga kerja seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi daerah dan meningkatnya kesempatan kerja.

Pada **tahun 2025**, TPT meningkat kembali menjadi **3,67 persen**. Meskipun terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada jauh di bawah kondisi awal periode maupun puncak pandemi. Dengan demikian, peningkatan pada tahun 2025 lebih menunjukkan adanya dinamika pasar kerja yang perlu diantisipasi daripada penurunan kinerja pembangunan ketenagakerjaan secara keseluruhan.

Secara kumulatif, **TPT Kabupaten Pulau Taliabu berhasil menurun sebesar 1,40 poin persentase selama periode 2018–2025**, dari **5,07 persen menjadi 3,67 persen**. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja relatif berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang.

Ke depan, efektivitas pembangunan ketenagakerjaan perlu terus diperkuat melalui peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta penguatan kewirausahaan. Dengan strategi tersebut, diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat terus ditekan, kualitas pekerjaan semakin meningkat, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

d. Relevansi



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Data dipublikasikan dalam Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka, dan Berita Resmi Statistik (BRS) Ketenagakerjaan

Analisis relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan tingkat nasional selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu memiliki pola yang relatif sejalan dengan

perkembangan di tingkat provinsi dan nasional, meskipun dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah yang berbeda. Pada awal periode tahun **2018**, TPT Kabupaten Pulau Taliabu sebesar **5,07 persen**, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Maluku Utara (**4,77 persen**), namun masih lebih rendah dibandingkan TPT nasional (**5,30 persen**).

Selama periode **2020–2021**, ketiga wilayah mengalami peningkatan tingkat pengangguran sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kabupaten Pulau Taliabu mencatat TPT tertinggi sebesar **6,10 persen pada tahun 2021**, sementara Provinsi Maluku Utara berada pada **4,71 persen** dan nasional **6,49 persen**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap pasar kerja di Kabupaten Pulau Taliabu relatif lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi, namun masih lebih rendah dibandingkan tingkat nasional.

Pada periode **2022–2025**, ketiga wilayah memperlihatkan tren penurunan tingkat pengangguran sebagai indikasi membaiknya kondisi pasar kerja. Kabupaten Pulau Taliabu berhasil menurunkan TPT menjadi **3,67 persen pada tahun 2025**, lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku Utara (**4,44 persen**) maupun nasional (**4,74 persen**). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Pulau Taliabu dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2025 berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

Apabila dibandingkan antara tahun **2018 dan 2025**, Kabupaten Pulau Taliabu mencatat penurunan TPT sebesar **1,40 poin persentase**, lebih besar dibandingkan penurunan Provinsi Maluku Utara yang mencapai **0,33 poin persentase** maupun nasional sebesar **0,56 poin persentase**. Hal ini mengindikasikan bahwa secara jangka panjang efektivitas pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Meskipun demikian, tantangan pembangunan ketenagakerjaan masih tetap perlu mendapat perhatian, terutama dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta keberlanjutan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung investasi produktif, pengembangan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pengembangan kewirausahaan. Dengan strategi tersebut, diharapkan tingkat pengangguran dapat terus ditekan, kualitas kesempatan kerja semakin meningkat, dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3.5.3. Analisis Masalah Bidang Ketenagakerjaan

Analisis bidang ketenagakerjaan Kabupaten Pulau Taliabu dilakukan berdasarkan dua indikator utama, yaitu **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** dan **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**. Kedua indikator tersebut dianalisis melalui empat aspek, yaitu **posisi relatif**, **perkembangan antar waktu**, **efektivitas**, dan **relevansi** terhadap kondisi Provinsi Maluku Utara dan nasional.





Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; dan *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia*. Analisis: Hasil olahan tim penyusun berdasarkan perkembangan dan perbandingan indikator ketenagakerjaan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional

Permasalahan Utama Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa permasalahan strategis bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih relatif rendah** dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara dan nasional, yang menunjukkan masih terbatasnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi.

2. **Pemulihan TPAK pascapandemi belum sepenuhnya optimal**, sehingga partisipasi masyarakat dalam pasar kerja belum kembali pada kondisi sebelum tahun 2020.
3. **Kesempatan kerja formal masih terbatas**, sehingga sebagian besar tenaga kerja masih bergantung pada sektor informal dengan produktivitas dan tingkat pendapatan yang relatif rendah.
4. **Kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja masih perlu ditingkatkan**, terutama melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
5. **Terbatasnya investasi yang bersifat padat karya** menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja baru belum mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja secara signifikan.
6. **Rendahnya TPT belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang ideal**, karena masih terdapat penduduk usia kerja yang belum masuk dalam angkatan kerja (bukan angkatan kerja), sehingga peningkatan TPAK tetap menjadi tantangan utama.
7. **Perlu penguatan sektor ekonomi unggulan** seperti pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, dan pariwisata agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.

Kesimpulan

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan **dua karakteristik utama**, yaitu **tingkat pengangguran yang relatif rendah** namun **tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga pada **peningkatan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan**. Pendekatan tersebut akan menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

3.6. ANALISIS KARAKTERISTIK MASALAH BIDANG KESETARAAN GENDER

Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam seluruh aspek pembangunan. Analisis karakteristik masalah bidang kesetaraan gender bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi, kesenjangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian pembangunan yang responsif gender di suatu daerah. Analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

Secara umum, karakteristik kesetaraan gender diukur melalui berbagai indikator, antara lain **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin**, **keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan politik**, **tingkat pendidikan**, **akses terhadap pelayanan kesehatan**, serta **partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi**. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Permasalahan kesetaraan gender umumnya masih ditandai oleh adanya kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Selain itu, perempuan masih menghadapi tantangan berupa beban kerja domestik yang lebih tinggi, keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya keterwakilan

dalam jabatan strategis, serta masih adanya kekerasan berbasis gender yang berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas perempuan.

Dalam konteks pembangunan daerah, kesetaraan gender tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, penerapan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** menjadi strategi penting untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

Peningkatan kesetaraan gender juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Semakin tinggi partisipasi perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, kewirausahaan, dan kepemimpinan, maka semakin besar pula kontribusi perempuan terhadap peningkatan produktivitas, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan yang responsif gender akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis karakteristik masalah bidang kesetaraan gender perlu diarahkan pada upaya mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan perempuan, perluasan kesempatan kerja yang setara, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh perangkat daerah.

Dengan analisis yang komprehensif, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender, mempercepat pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)** khususnya **Tujuan 5: Kesetaraan Gender**, serta mewujudkan pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3.6.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan memperhatikan kesenjangan antara **laki-laki dan perempuan**. IPG menunjukkan perbandingan capaian **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki**, sehingga menggambarkan tingkat kesetaraan gender dalam memperoleh manfaat pembangunan.

IPG dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu:

1. **Umur panjang dan hidup sehat**, yang diukur melalui **Angka Harapan Hidup (AHH)**.
2. **Pengetahuan**, yang diukur melalui **Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**.
3. **Standar hidup layak**, yang diukur melalui **pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan**.

Semakin tinggi nilai IPG dan semakin mendekati **100**, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, nilai IPG yang semakin rendah menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami ketertinggalan dalam memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan dibandingkan laki-laki.

a. Posisi Relatif

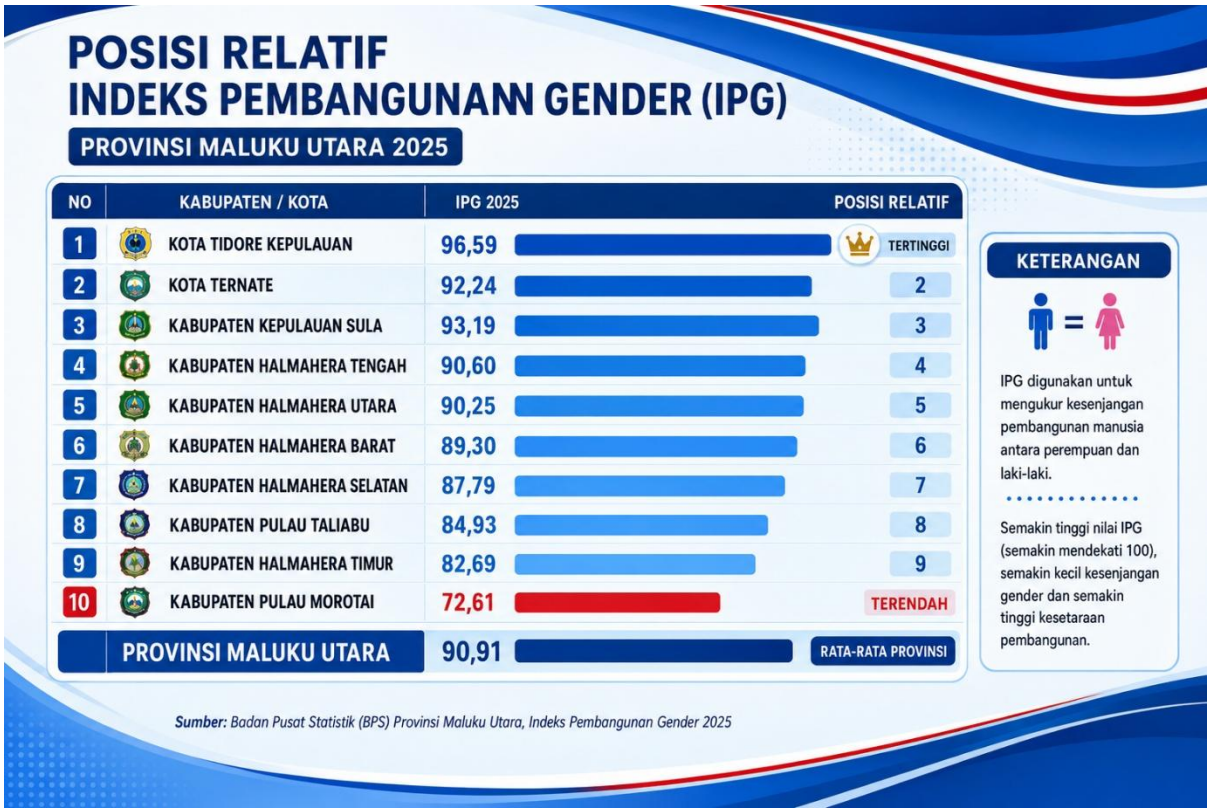
Berdasarkan data **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025** (data IPG 2024 yang dipublikasikan BPS tahun 2025), **Provinsi Maluku Utara** memiliki nilai IPG sebesar **90,91**. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Maluku Utara relatif kecil, meskipun masih terdapat perbedaan antar kabupaten/kota yang cukup signifikan.

Kota Tidore Kepulauan mencatat nilai IPG tertinggi sebesar **96,59**, diikuti **Kabupaten Kepulauan Sula (93,19)** dan **Kota Ternate (92,24)**. Tingginya nilai IPG pada wilayah tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh akses dan kesempatan yang relatif setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang lebih responsif gender.

Sebaliknya, **Kabupaten Pulau Morotai** memiliki nilai IPG terendah sebesar **72,61**, sedangkan **Kabupaten Halmahera Timur** dan **Kabupaten Pulau Taliabu** masing-masing memiliki nilai **82,69** dan **84,93**. Nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut masih relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Kabupaten Pulau Taliabu dengan IPG sebesar **84,93** berada pada kelompok kabupaten dengan capaian menengah ke bawah di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia bagi perempuan masih memerlukan perhatian, terutama dalam peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, analisis posisi relatif IPG menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Maluku Utara telah mencapai tingkat pembangunan gender yang cukup baik, pemerataan hasil pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG)** melalui kebijakan yang lebih responsif gender, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perluasan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai IPG di seluruh kabupaten/kota, mengurangi kesenjangan gender, dan mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

b. Perkembangan Antar Waktu

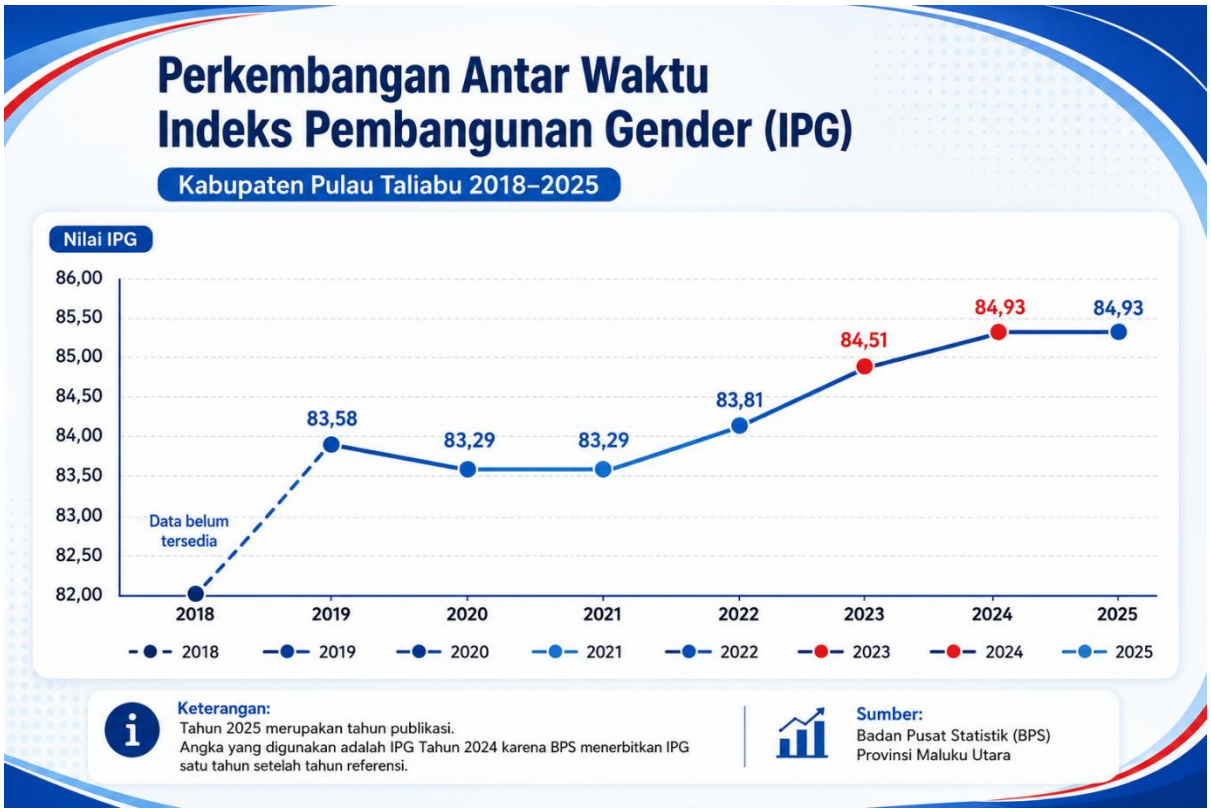
Perkembangan **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, meskipun peningkatannya berlangsung secara bertahap. Berdasarkan data BPS, IPG Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **83,58 pada tahun 2019**, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi **83,29 pada tahun 2020** dan bertahan pada angka yang sama pada **tahun 2021**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut belum terjadi peningkatan yang signifikan dalam kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Memasuki tahun **2022**, nilai IPG mulai menunjukkan tren positif dengan meningkat menjadi **83,81**, kemudian terus naik menjadi **84,51 pada tahun 2023**, dan mencapai **84,93 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025). Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi sehingga kesenjangan pembangunan gender mulai berkurang.

Secara keseluruhan, selama periode **2019–2024**, IPG Kabupaten Pulau Taliabu meningkat sebesar **1,35 poin**, dari **83,58** menjadi **84,93**. Walaupun peningkatannya belum terlalu besar, tren tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang responsif gender telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dibandingkan periode sebelumnya.

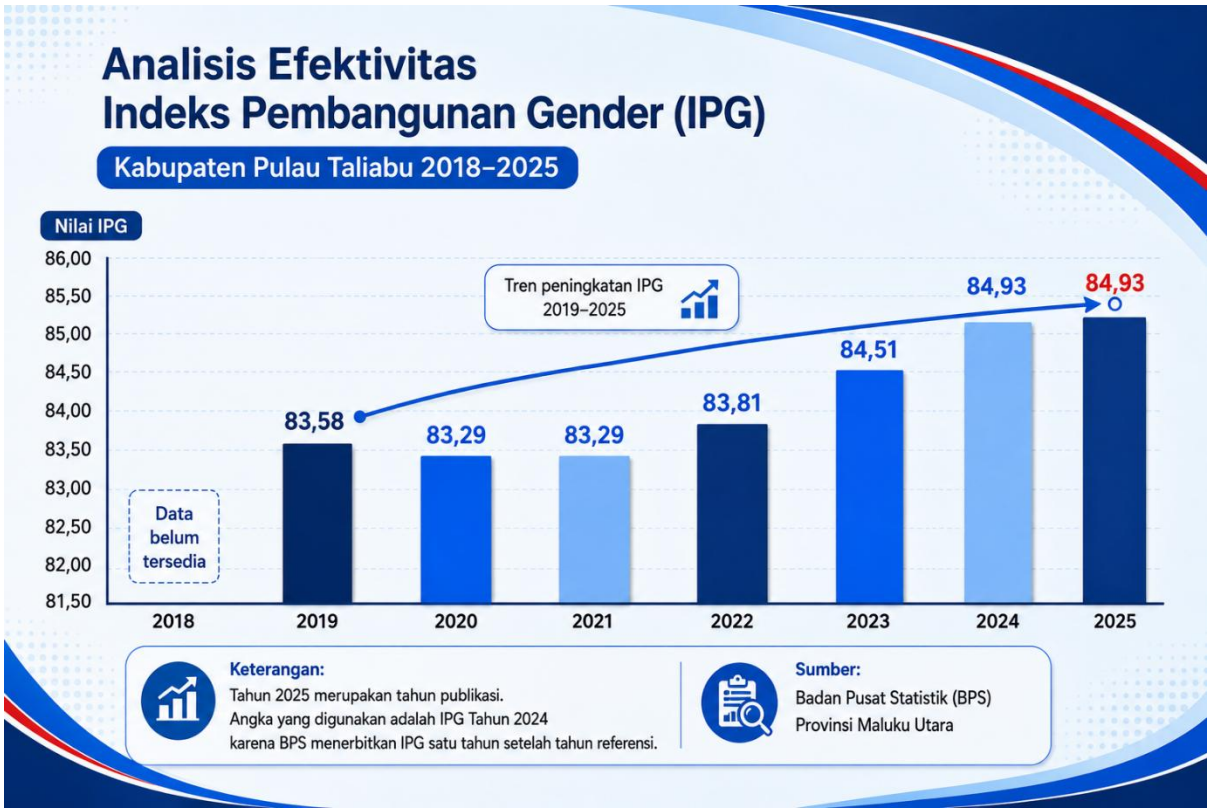
Namun demikian, apabila dibandingkan dengan **rata-rata Provinsi Maluku Utara yang mencapai 90,91**, capaian IPG Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan perhatian yang lebih besar, khususnya dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, pelayanan kesehatan yang berkualitas, kesempatan kerja yang setara, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu difokuskan pada penguatan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** di seluruh sektor pembangunan, peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan, perluasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kualitas layanan publik yang responsif gender. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan nilai IPG Kabupaten Pulau Taliabu sehingga semakin mendekati rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun target pembangunan nasional, sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

c. Efektivitas



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

Analisis efektivitas **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa pembangunan yang responsif gender telah memberikan hasil yang positif. Meskipun pada awal periode terjadi sedikit penurunan, dalam jangka panjang nilai IPG memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten, yang mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan data BPS, IPG meningkat dari **83,58 pada tahun 2019** menjadi **84,93 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025), atau mengalami peningkatan sebesar **1,35 poin**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga kesenjangan gender semakin berkurang.

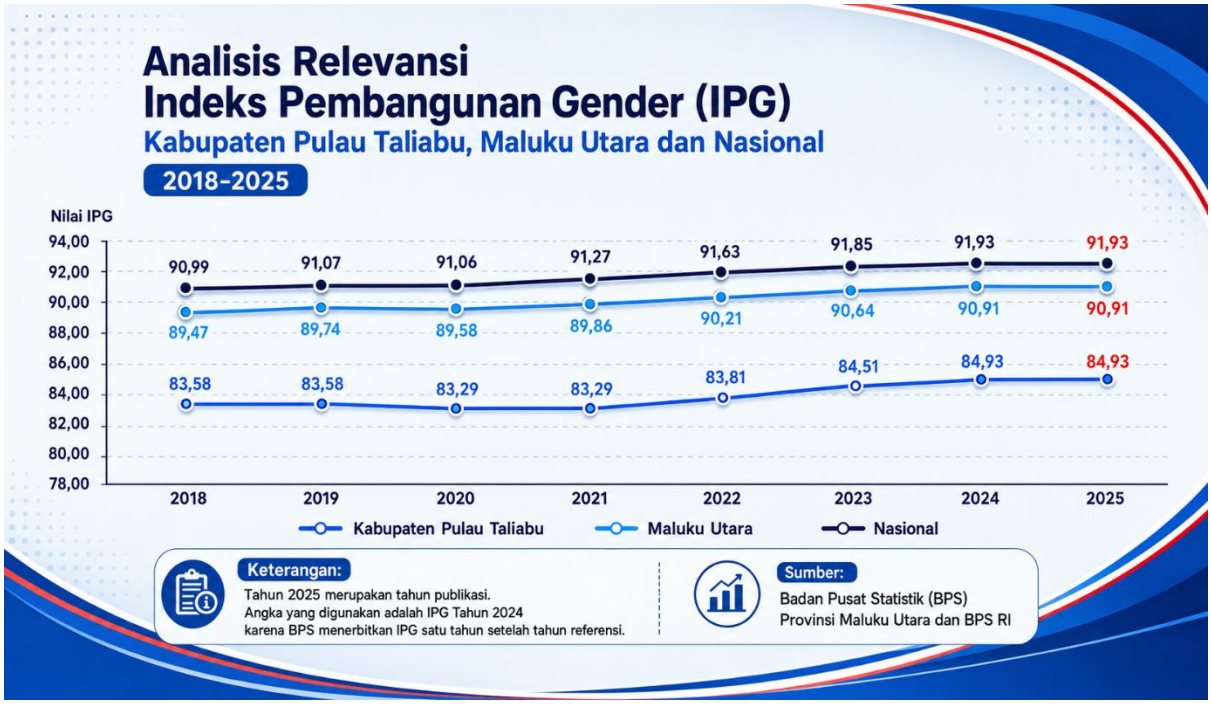
Apabila ditinjau dari efektivitas pembangunan, peningkatan IPG tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** di Kabupaten Pulau Taliabu telah berjalan ke arah yang positif. Namun demikian, laju peningkatannya masih relatif lambat sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah agar percepatan pembangunan gender dapat berlangsung lebih optimal.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang baik, nilai **IPG Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 84,93** masih berada di bawah rata-rata **Provinsi Maluku Utara sebesar 90,91**. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam aspek pendidikan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta akses terhadap pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

Oleh karena itu, efektivitas pembangunan gender ke depan perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pendidikan perempuan, perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis, serta penguatan implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG)** di seluruh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan IPG selama periode **2019–2025** menunjukkan bahwa arah pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu semakin mendukung terwujudnya kesetaraan gender. Dengan komitmen kebijakan yang lebih kuat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan nilai IPG dapat terus meningkat sehingga mendekati rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun target nasional, sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

d. Relevansi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

Analisis relevansi **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa ketiga wilayah memiliki arah perkembangan yang sama, yaitu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan yang responsif gender terus mengalami kemajuan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Kabupaten Pulau Taliabu mencatat peningkatan IPG dari **83,58 pada tahun 2019** menjadi **84,93 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025), atau meningkat sebesar **1,35 poin**. Pada periode yang sama, **Provinsi Maluku Utara** meningkat dari **89,47 pada tahun 2018** menjadi **90,91**, sedangkan **nasional** meningkat dari **90,99** menjadi **91,93**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang memperhatikan kesetaraan gender terus mengalami perbaikan di semua tingkatan.

Meskipun demikian, **nilai IPG Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional** pada setiap tahun pengamatan. Pada tahun 2025, selisih IPG

Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Provinsi Maluku Utara mencapai sekitar **5,98 poin**, sedangkan terhadap nasional mencapai sekitar **7,00 poin**. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih besar dibandingkan wilayah pembanding.

Apabila dilihat dari pola perkembangannya, laju peningkatan IPG Kabupaten Pulau Taliabu relatif sejalan dengan tren provinsi dan nasional, namun belum mampu memperkecil kesenjangan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan yang responsif gender telah memberikan dampak positif, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh perempuan dan laki-laki.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG)** dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Prioritas kebijakan diarahkan pada peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, sinergi antarperangkat daerah dan pemanfaatan data terpilah gender perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, **relevansi perkembangan IPG Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang positif**, namun capaian daerah masih tertinggal dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan nasional. Dengan percepatan kebijakan yang lebih responsif gender dan berorientasi pada pemerataan pembangunan manusia, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu memperkecil kesenjangan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** yang mengukur kesenjangan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki, **IDG mengukur sejauh mana perempuan memiliki kesempatan, akses, dan peran strategis dalam pembangunan**.

IDG menggambarkan tingkat pemberdayaan perempuan melalui keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi di dunia kerja profesional, serta kontribusi terhadap kegiatan ekonomi. Semakin tinggi nilai IDG, semakin besar peran perempuan dalam pembangunan dan semakin baik tingkat kesetaraan gender dalam aspek pemberdayaan.

Di Indonesia, **Badan Pusat Statistik (BPS)** menghitung IDG berdasarkan tiga indikator utama, yaitu:

1. **Keterwakilan perempuan di parlemen**, yaitu persentase kursi legislatif yang diduduki oleh perempuan sebagai indikator partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
2. **Perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, administrasi, dan manajerial**, yaitu persentase perempuan yang bekerja pada jabatan strategis dan profesional dibandingkan total tenaga kerja pada kelompok jabatan tersebut.
3. **Sumbangan pendapatan perempuan**, yaitu kontribusi pendapatan perempuan terhadap total pendapatan rumah tangga yang mencerminkan peran ekonomi perempuan dalam pembangunan.

Semakin tinggi nilai ketiga indikator tersebut, maka semakin tinggi pula nilai IDG yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang semakin setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan.

a. Posisi Relatif

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2025 (data IDG Tahun 2024 yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2025), **Provinsi Maluku Utara** memiliki nilai IDG sebesar **80,08**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan di Provinsi Maluku Utara secara umum sudah berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antar kabupaten/kota.

Kota Ternate menempati posisi tertinggi dengan nilai **IDG sebesar 78,02**, diikuti oleh **Kabupaten Halmahera Utara (76,99)** dan **Kota Tidore Kepulauan (71,54)**. Tingginya nilai IDG pada wilayah tersebut mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam bidang politik, dunia kerja profesional, manajerial, serta kontribusi terhadap pendapatan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Di sisi lain, **Kabupaten Halmahera Timur** memiliki nilai IDG terendah sebesar **50,49**, sedangkan **Kabupaten Halmahera Selatan (53,87)** dan **Kabupaten Halmahera Tengah (54,58)** juga masih berada pada kelompok dengan tingkat pemberdayaan perempuan yang relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perempuan di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh kesempatan yang setara pada bidang ekonomi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.

Kabupaten Pulau Taliabu memperoleh nilai **IDG sebesar 57,46** dan berada pada **peringkat ke-7** dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Nilai tersebut masih berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara (**80,08**), yang menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan perhatian yang lebih serius. Tantangan utama meliputi masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik dan strategis, terbatasnya perempuan yang bekerja pada jabatan profesional dan manajerial, serta belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap aktivitas ekonomi daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

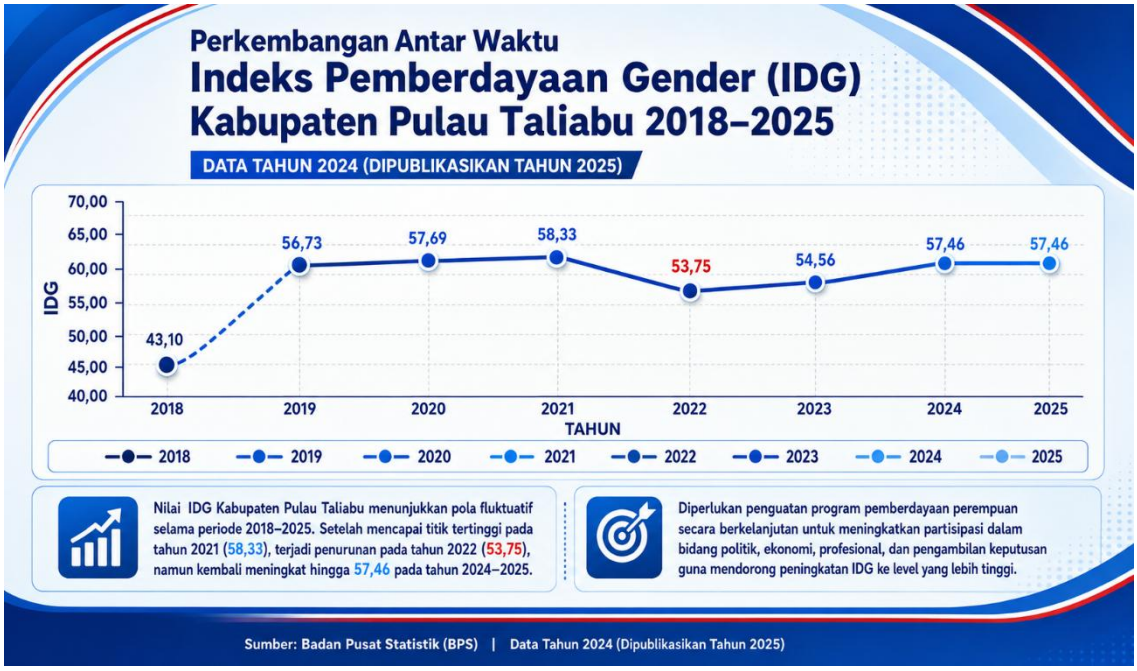
b. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara umum mengarah pada perbaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IDG meningkat dari **56,73 pada tahun 2019** menjadi **57,69 pada tahun 2020**, kemudian kembali meningkat menjadi **58,33 pada tahun 2021**. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, jabatan profesional, dan pengambilan keputusan.

Namun demikian, pada **tahun 2022** nilai IDG mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi **53,75**, atau turun **4,58 poin** dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kesempatan kerja pada jabatan strategis, rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, serta belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan ekonomi rumah tangga.

Memasuki periode **2023–2025**, kondisi IDG kembali menunjukkan tren yang positif. Nilai IDG meningkat menjadi **54,56 pada tahun 2023** dan mencapai **57,46 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025). Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pemberdayaan perempuan mulai memberikan hasil yang positif, terutama melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan **tahun dasar 2019**, nilai IDG Kabupaten Pulau Taliabu pada **tahun 2025 meningkat sebesar 0,73 poin**, dari **56,73 menjadi 57,46**. Walaupun peningkatannya belum terlalu besar, tren tersebut menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

c. Efektivitas

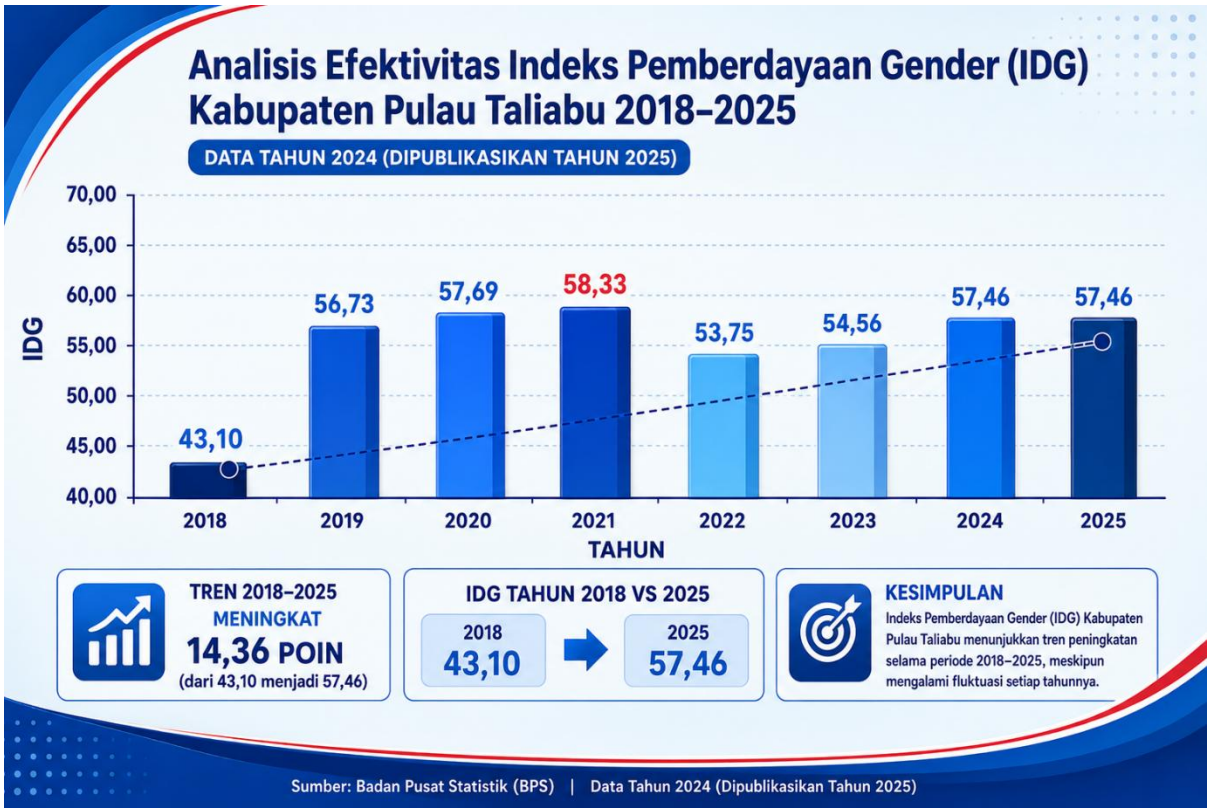
Analisis efektivitas **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Pulau Taliabu selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan telah memberikan hasil yang cukup positif, meskipun perkembangannya masih berfluktuasi. Secara umum, tren IDG menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan kondisi awal periode, yang mengindikasikan semakin besarnya peran perempuan dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi, profesi, maupun pengambilan keputusan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IDG meningkat dari **56,73 pada tahun 2019** menjadi **57,46 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025), atau mengalami kenaikan sebesar **0,73 poin**. Meskipun peningkatan tersebut relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Namun demikian, selama periode pengamatan masih terjadi fluktuasi yang cukup nyata. Setelah mencapai nilai tertinggi sebesar **58,33 pada tahun 2021**, IDG mengalami penurunan menjadi **53,75 pada tahun 2022**. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan masih rentan terhadap berbagai faktor, seperti terbatasnya kesempatan perempuan menduduki jabatan strategis, rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, serta belum optimalnya kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi formal.

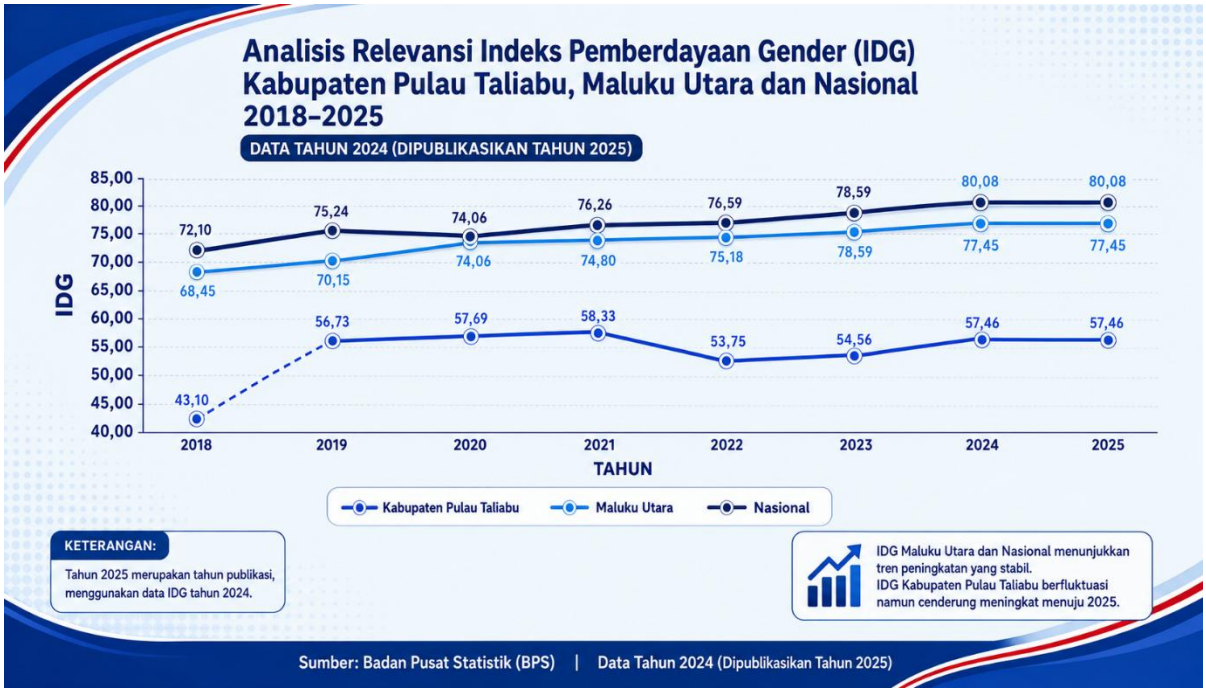
Memasuki tahun **2023** dan **2024**, nilai IDG kembali mengalami peningkatan hingga mencapai **57,46**. Perbaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dalam berbagai aspek pemberdayaan perempuan, meskipun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata **Provinsi Maluku Utara**, sehingga efektivitas pembangunan gender masih perlu terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa **efektivitas pembangunan pemberdayaan gender di Kabupaten Pulau Taliabu telah berjalan ke arah yang positif**, tetapi belum berlangsung secara konsisten. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, perluasan kesempatan kerja pada sektor formal dan profesional, pengembangan kewirausahaan perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan pengambilan keputusan, serta penguatan pelaksanaan **Pengarusutamaan Gender (PUG)** di seluruh perangkat daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

d. Relevansi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, *Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka*; Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*; berdasarkan **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**.

Analisis relevansi **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Pulau Taliabu dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan nasional selama periode **2018–2025** menunjukkan bahwa ketiga wilayah memiliki kecenderungan peningkatan dalam pemberdayaan perempuan, meskipun dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

Kabupaten Pulau Taliabu mencatat nilai **IDG sebesar 56,73 pada tahun 2019** dan meningkat menjadi **57,46 pada tahun 2024** (dipublikasikan pada tahun 2025). Namun, peningkatan tersebut masih relatif terbatas dan diwarnai oleh fluktuasi, terutama ketika nilai IDG turun menjadi **53,75 pada tahun 2022** sebelum kembali meningkat pada dua tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu belum berlangsung secara stabil.

Sebaliknya, **Provinsi Maluku Utara** memperlihatkan tren peningkatan yang lebih konsisten, yaitu dari **68,45 pada tahun 2018** menjadi **80,08 pada tahun 2024**. Demikian pula pada tingkat **nasional**, IDG meningkat secara bertahap dari **72,10 pada tahun 2018** menjadi **77,45 pada tahun 2024**. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi dan nasional berlangsung lebih cepat dibandingkan Kabupaten Pulau Taliabu.

Apabila dibandingkan secara langsung, **Kabupaten Pulau Taliabu masih berada di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional** selama seluruh periode pengamatan. Pada tahun 2025, selisih IDG Kabupaten Pulau Taliabu terhadap **Provinsi Maluku Utara mencapai sekitar 22,62 poin**, sedangkan terhadap **nasional mencapai sekitar 19,99 poin**. Kesenjangan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Pulau Taliabu masih memiliki keterbatasan dalam memperoleh kesempatan yang setara, terutama pada aspek keterwakilan dalam pengambilan keputusan, jabatan profesional dan manajerial, serta kontribusi terhadap kegiatan ekonomi.

Dari sisi relevansi pembangunan, pola perkembangan IDG Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan arah yang sama dengan provinsi dan nasional, yaitu cenderung meningkat setelah melewati berbagai tantangan pembangunan. Namun demikian, laju peningkatannya masih belum mampu mengejar capaian wilayah pembanding. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG)** melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, antara lain dengan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan lembaga legislatif, memperluas kesempatan perempuan pada sektor profesional dan formal, memperkuat program kewirausahaan dan UMKM perempuan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memperluas akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, **relevansi perkembangan IDG Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren yang positif**, namun tingkat pemberdayaan perempuan masih tertinggal dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan nasional. Dengan penguatan kebijakan yang lebih responsif gender dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan secara berkelanjutan, diharapkan kesenjangan tersebut dapat diperkecil sehingga perempuan memiliki kesempatan yang semakin setara untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

3.6.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan dan hasil pembangunan. IKG menggambarkan besarnya kehilangan potensi pembangunan manusia yang disebabkan oleh

adanya kesenjangan gender pada aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja.

Berbeda dengan **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** yang membandingkan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki, serta **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** yang mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan, **IKG mengukur besarnya ketimpangan yang masih terjadi akibat perbedaan akses dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki**.

a. Posisi Relatif

Berdasarkan data **Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2025** (data IKG Tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2025), **Provinsi Maluku Utara** memiliki nilai **IKG sebesar 0,508**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Provinsi Maluku Utara masih berada pada tingkat sedang. Mengingat IKG merupakan indikator yang mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek **kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja**, maka **semakin rendah nilai IKG menunjukkan kondisi kesetaraan gender yang semakin baik**.

Secara relatif, **Kota Tidore Kepulauan** menjadi daerah dengan kondisi kesetaraan gender terbaik di Provinsi Maluku Utara dengan **IKG sebesar 0,414**, diikuti oleh **Kota Ternate (0,438)** dan **Kabupaten Pulau Morotai (0,480)**. Nilai IKG yang lebih rendah pada ketiga daerah tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki relatif lebih kecil, baik dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sebaliknya, **Kabupaten Halmahera Tengah** memiliki nilai **IKG tertinggi sebesar 0,620**, disusul **Kabupaten Halmahera Timur (0,601)** dan **Kabupaten Kepulauan Sula (0,581)**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di wilayah tersebut masih relatif tinggi sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan, memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta memperbesar partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki **IKG sebesar 0,577** dan berada pada **peringkat ke-6** dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Nilai tersebut masih **lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara (0,508)**, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Pulau Taliabu masih relatif lebih besar dibandingkan kondisi rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat implementasi **Pengarusutamaan Gender (PUG)** melalui kebijakan yang lebih terarah, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, memperluas akses pendidikan bagi perempuan, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik dan lembaga legislatif, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan UMKM dan kewirausahaan, serta memperluas kesempatan kerja yang setara antara perempuan dan laki-laki.

Secara keseluruhan, analisis posisi relatif menunjukkan bahwa **ketimpangan gender di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara**. Dengan penguatan kebijakan yang responsif gender, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, serta sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan nilai **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** Kabupaten Pulau Taliabu dapat terus menurun sehingga kesenjangan gender semakin kecil, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan pembangunan daerah menjadi lebih inklusif, adil, serta berkelanjutan.